

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Vol. 8, No. 03, Mei - Agustus 2019

ISSN 2089 - 0338
E-ISSN 2502-7921

Akreditasi
Kemenristekdikti Nomor
21/E/KPT/2018

- SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN PERLINDUNGAN ANAK:
STUDI KASUS SAKTI PEKSOS DI KEMENTERIAN SOSIAL

Tarmizi Ahmad, Irman Hermadi dan Wisnu Ananta Kusuma

- PERMASALAHAN DAN PROSPEK PEJABAT FUNGSIONAL
PEKERJA SOSIAL DI DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

Habibullah

- KARANG TARUNA, AGEN PERUBAHAN DAN PENGEMBANGAN
MASYARAKAT DI PANDEGLANG

Suradi

- DINAMIKA KEBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR
PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BOMBANA SULAWESI TENGGARA

Syafruddin, Sumardjo, Prabowo Tjitropranoto dan Anna Fatchiya

- KONSTRUKSI SOSIAL TENTANG PENDIDIKAN PADA
KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA
HARAPAN DI KABUPATEN SIDOARJO

Munari Kustanto

- PROBLEMATIKA PENANGANAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
KEKERASAN SEKSUAL SELAMA MENJALANKAN PROSES HUKUM:
KASUS DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nyi R. Irmayani

- DUKUNGAN SOSIAL DAN FUNGSI KELUARGA PASCAGEMPA DI
WILAYAH PEGUNUNGAN DAN PESISIR KABUPATEN LOMBOK TIMUR

R Sukarni, Diah Krisnatuti dan Tin Herawati

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Vol. 8, No. 03, Mei - Agustus 2019

ISSN 2089 - 0338
E-ISSN 2502-7921

Akreditasi
Kemenristekdikti Nomor
21/E/KPT/2018

Sebuah Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial menyajikan karangan ilmiah dalam bentuk hasil penelitian lapangan bidang kesejahteraan sosial. Terbit setahun tiga kali periode April, Agustus, dan Desember.

SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial mulai terbit Vol 1 No. 1 September - Desember 2011, merupakan kelanjutan dari “Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial” yang terbit pertama kali Vol 1 No. 1 Januari 1995 sampai dengan Vol 16 No. 2 Mei - Agustus 2011. Terhitung mulai edisi Vol 5 No.2 Januari - April 2016 Jurnal Ilmiah "SOSIO KONSEPSIA" menggunakan *Open Journal System (OJS)*. Penulis yang akan mengajukan naskahnya untuk dimuat di Sosio Konsepsia melakukan pengiriman naskah melalui *Open Journal System (OJS)*: <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/sosiokonsepsia>

Penyunting Ahli / Mitra Bestari

1. Prof. Adi Fahrudin, Ph.D. *Praktek dan Pendidikan Pekerjaan Sosial, Psikososial, dan Disaster Management (Universitas Muhammadiyah Jakarta)*
2. Prof. Irwanto, Ph.D. *Psikologi, Perkembangan Anak dan Studi Keluarga, HIV/AIDS, Disabilitas (Universitas Atmajaya Jakarta)*
3. Prof. Isbandi Rukminto Adi, M.Kes., Ph.D *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial, Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (Universitas Indonesia)*
4. Binahayati Rusyidi, Ph.D *Program dan Kebijakan Kesejahteraan Sosial, Gender Based Violence, Perlindungan Anak, Etika Praktek Kesejahteraan Sosial, Etika Penelitian (Universitas Padjajaran)*
5. DR. Bambang Rudito *Antropologi, Interkultural, Corporate Social Responsibility (Institut Teknologi Bandung)*
6. DR. Santoso Tri Raharjo *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Sosiologi (Universitas Pajajaran, Bandung)*
7. Makmur Sunusi Ph.D *Pekerjaan Sosial (Universitas Muhammadiyah, Jakarta)*

Pengarah : Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial
Pembina : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Penanggung Jawab : Kepala Bidang Penelitian Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial

Editor Bagian

1. Drs. Suradi, M.Si
2. Drs. Setyo Sumarno, M.Si
3. Badrun Susantyo, Ph.D
4. DR. Hari Harjanto Setiawan
5. Drs. B. Mujiyadi, M.SW
6. Drs. Muhtar, M.Si
7. Sugiyanto, S.Pd, M.Si
8. Nyi R Irmayani, SH, M.Si
9. Habibullah, S.Sos, M.Kesos

Diterbitkan oleh **Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial**



Alamat

Jl. Dewi Sartika No.200 Cawang III Jakarta Timur 13630 Telp. (021) 8017146, Fax (021) 8017126
Email : sosiokonsepsia@gmail.com Website: puslit.kemsos.go.id
Ejournal: <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/sosiokonsepsia>

SOSIO KONSEPSIA

ISSN 2089-0338
E-ISSN 2502-7921

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Volume 8, No. 03, Mei - Agustus 2019

Akreditasi
Kemenristekdikti Nomor:
21/E/KPT/2018

DAFTAR ISI

HALAMAN

■ PENGANTAR REDAKSI	iii
■ Sistem Manajemen Pengetahuan Perlindungan Anak: Studi Kasus Sakti Peksos di Kementerian Sosial Tarmizi Ahmad, Irman Hermadi dan Wisnu Ananta Kusuma	213 - 226
■ Permasalahan dan Prospek Pejabat Fungsional Pekerja Sosial di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Habibullah	227 - 240
■ Karang Taruna, Agen Perubahan dan Pengembangan Masyarakat di Pandeglang Suradi	241 - 254
■ Dinamika Keberdayaan Masyarakat di Sekitar Pertambangan di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara Syafruddin, Sumardjo, Prabowo Tjitropranoto dan Anna Fatchiya	255 - 266
■ Konstruksi Sosial Tentang Pendidikan pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Sidoarjo Munari Kustanto	267 - 286
■ Problematika Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum: Kasus di Provinsi Kalimantan Barat Nyi R. Irmayani	287 - 302
■ Dukungan Sosial dan Fungsi Keluarga Pascagempa di Wilayah Pegunungan dan Pesisir Kabupaten Lombok Timur R Sukarni, Diah Krisnatuti dan Tin Herawati	303 - 320

PENGANTAR REDAKSI

Pada Volume 8 No.03, Mei – Agustus 2019, SOSIO KONSEPSIA menyajikan artikel yang aktual, dan memerlukan perhatian semua pihak dalam upaya mewujudkan kesejahteraan anak, keluarga dan masyarakat.

Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) merupakan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial (SDM Kesos), merupakan unsur utama yang menentukan keberhasilan implementasi program kesejahteraan sosial, antara lain pada program perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan penyiapan secara optimal, sehingga memiliki pengetahuan dan ketarampilan dalam memberikan pendampingan bagi anak yang mengalami tindak kekerasan. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka pengembangan kapasitas Sakti Peksos sebaiknya dilakukan dengan berbasis pada website. Melalui media online ini akan terjadi proses peningkatan kapasitas Sakti Peksos seperti proses bola salju, terus membesar dan meluas cakupannya.

SDM Kesos yang juga menjadi penentu keberhasilan program kesejahteraan sosial adalah pekerja sosial fungsional. Mereka tersebar di tingkat Pusat, di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia, antara lain di Provinsi Jawa Tengah. Penempatan pekerja sosial fungsional tersebut sebagian besar di balai sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Permasalahan terjadi, di mana pekerja sosial terampil mengalami kejenuhan dalam tugasnya, sehingga etos kerja mereka cenderung menurun. Selain itu, gairah mereka juga menurun karena tunjangan yang diterima sangat kecil. Hal ini menunjukkan, bahwa pola pembinaan dan karier pekerja sosial fungsional belum tertata dengan baik.

Karang Taruna yang tersebar di seluruh desa/kelurahan, merupakan SDM Kesos dari unsur pemuda dan statusnya sebagai relawan sosial. Salah kasus, Karang Taruna Sukajadi di Pandeglang telah memposisikan diri sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat. Karang Taruna Sukajadi telah melaksanakan berbagai peran sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat, dengan melaksanakan kegiatan di bidang sosial, seperti: bantuan pendidikan anak yatim, bantuan kebutuhan pokok bagi orang miskin, dan perbaikan rumah bagi keluarga miskin, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pembinaan preman jalanan, pelestarian budaya melalui peletarian kesenian lokal. Kemudian di bidang ekonomi, bekerja sama dengan sebuah cafe untuk pemasaran kopi bakar.

Pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan badan usaha merupakan isu yang terus berkembang di masyarakat. Badan usaha memiliki tanggung jawab terhadap situasi sosial di lingkungannya dalam skema *Corporate Social Responcibility* (CSR). Kasus pemberdayaan masyarakat oleh badan usaha pertambangan di Bombata telah dilakukan, tetapi hasilnya belum optimal. Berbagai kendala masih dihadapi, baik internal maupun eksternal, yang semua itu memerlukan mengarah pada diperlukannya penguatan pada badan usaha, sehingga CSR yang dilakukan mencapai tujuan optimal, dan memberikan kontribusi nyata dalam pengurangan angka kemiskinan.

Program Keluarga Harapan (PKH) salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah akses Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada pelayanan pendidikan bagi anak-anak mereka. Pendidikan yang lebih baik pada anak-anak mereka, diasumsikan akan memotong mata rantai kemiskinan di masa depan. Efektivitas program ini dipengaruhi oleh konstruksi sosial KPM, sehingga diperoleh pemahaman KPM mengenai hakikat PKH pada sektor pendidikan. Konstruksi tentang pendidikan terbagi ke dalam empat kategori yaitu : pendidikan sebagai eksistensi sosial, pendidikan sebagai akses ekonomi, pendidikan sebagai jalan mobilitas vertikal, serta pendidikan sebagai warisan.

Permasalahan sosial yang cenderung meningkat jumlah kasusnya dari hari ke hari adalah anak berhadapan dengan hukum. Anak yang masih dalam pengasuhan orang tua/keluarga itu harus terpisah dan menjalani kehidupannya di Rumah Tahanan dan atau di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Terkait dengan permasalahan ini, bahwa anak memiliki hak untuk diversifikasi pada setiap tahapan hukum. Tetapi hal ini terkendala pada ketersediaan LPKS, dan tanggapan masyarakat terhadap perilaku anak. Akhirnya anak di bawah umur harus menjalani proses hukum, dan menempati Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan dan atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Kasus Kalimantan Barat, kehidupan anak-anak selama dalam sel cukup memprihatinkan, sementara anak di LPKS dapat melanjutkan kehidupannya.

Bencana alam tidak hanya menghancurkan lingkungan fisik, tetapi juga menghancurkan situasi psikososial keluarga. Fungsi keluarga menjadi lumpuh, dan kondisi ini memerlukan dukungan sosial dalam upaya pemulihan. Pada kasus Lombok Timur, ada perbedaan terdapat perbedaan yang nyata pada dukungan sosial dan fungsi keluarga antara keluarga korban bencana di daerah pegunungan dan pesisir. Kondisi geografis korban bencana, berpengaruh positif terhadap fungsi keluarga. Untuk mengurangi risiko akibat bencana, telah dilakukan dukungan sosial, dan memberikan pengaruh positif terhadap fungsi keluarga. Ke depan, kampung siaga bencana, dan dukungan psikososial untuk meningkatkan fungsi keluarga dan dukungan sosial, merupakan langkah-langkah yang perlu dioptimalkan dalam upaya menekan risiko bencana alam bagi masyarakat.

Redaksi

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa izin dan biaya.

Tarmizi Ahmad, Irman Hermadi dan Wisnu Ananta Kusuma (Department of Computer Science, Bogor Agricultural University, Kampus IPB Dramaga Bogor)

SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN PERLINDUNGAN ANAK: STUDI KASUS SAKTI PEKSOS DI KEMENTERIAN SOSIAL

SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.03, Agustus 2019, hal: 213-226.

Abstrak

Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) merupakan perpanjangan tangan Kementerian Sosial untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan. Dalam menjalankan tugasnya, sakti peksos masih mengalami kesulitan dalam menangani kasus anak di lapangan, baik karena kendala rotasi yang menyebabkan hilangnya pengetahuan dari sakti peksos yang berpengalaman ataupun minimnya kesempatan berbagi pengalaman antara sakti peksos yang sudah berpengalaman dengan yang masih baru. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sistem manajemen pengetahuan perlindungan anak (SIMPEPA) bagi Sakti Peksos di Kementerian Sosial yang didasarkan pada penerapan aplikasi berbasis *web*. *Web* dapat mempermudah Sakti Peksos dalam mengelola pengetahuan secara *online* berdasarkan pengalaman yang mereka miliki agar dapat dibagikan kepada Sakti Peksos yang lain. metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Knowledge Management System Life Cycle* (KMSLC). Empat tahapan telah diterapkan dalam penelitian ini yaitu: 1) menangkap pengetahuan; 2) mendesain *blueprint* system manajemen pengetahuan; 3) memverifikasi dan memvalidasi sistem manajemen pengetahuan; 4) mengimplementasikan sistem manajemen pengetahuan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya, pengetahuan yang dibuat tidak hanya dalam bentuk tulisan namun dapat berbentuk visual seperti video tutorial tentang bagaimana tahapan penanganan kasus anak yang telah ditangani dan disesuaikan dengan etika pekerja sosial.

Kata Kunci: *knowledge management system life cycle (KMSLC), satuan bakti pekerja sosial, perlindungan anak, SIMPEPA, Web.*

CHILD PROTECTION KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM: CASE STUDY SAKTI PEKSOS IN MINISTRY OF SOCIAL

SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.03, August 2019, page: 213-226.

Abstract

'Satuan Bakti Pekerja Sosial' (Sakti peksos) is a social worker who work on behalf of Ministry of Social Affairs and provide assistance to the children who experience violence. In dealing with the children issue, Sakti Peksos are still facing problems in handling the cases in the field, whether it is due to the sakti peksos rotation, which causes the loss of knowledge from experienced professionals or because of lack of knowledge sharing among 'Sakti Peksos', especially between the workers who have the experience and who are still new. The purpose of this study is to develop a child protection knowledge management system for 'Sakti Peksos' in the the Ministry of Social Affairs based on the application of web-based applications. The web can help

the 'Sakti Peksos' to manage knowledge online based on their experience so that it can be shared with other workers. This research was conducted by adopting the Knowledge Management System Life Cycle (KMSLC) method. There are four stages applied in this study, namely: 1) capturing knowledge; 2) designing the knowledge management system blueprint; 3) verificating and validating the knowledge management systems; 4) implementing knowledge management system. The study shows that the system work properly and based on the user needs. Suggestions for the development of further research is a knowledge that is created not only in the form of writing but also can be in the way of visuals such as video tutorials of how the stage in handling the child cases which is in line with the social workers code of ethics.

Keywords: knowledge management system life cycle (KMSLC), worker social unit, child protection, SIMPEPA, Web.

Habibullah (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)

PERMASALAHAN DAN PROSPEK PEJABAT FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL DI DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.03, Agustus 2019, hal: 227-240.

Abstrak

Pekerja sosial dalam konteks penelitian ini adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial pada instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya. Banyaknya pejabat fungsional di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tidak terlepas dari banyaknya Panti sosial sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan masalah dan prospek pejabat fungsional pekerja sosial fungsional di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan penempatan sebagian besar pejabat fungsional pekerja sosial di panti sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah tepat karena pejabat fungsional pekerja sosial dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilannya pada pemberian layanan langsung kepada penerima manfaat. Pejabat fungsional pekerja sosial terampil ditempatkan di panti sosial namun yang menjadi permasalahannya kualitas pejabat fungsional pekerja sosial terampil mengalami kejenuhan/monoton dalam tugas yang sama, sehingga etos kerja menurun. Program studi ilmu kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial. Tunjangan pejabat fungsional pekerja sosial sangat kecil dan tidak sebanding dengan resiko yang dihadapi. Saran dari penelitian ini memutasi pejabat fungsional pekerja sosial di Panti Sosial ke Panti Sosial lainnya. Kementerian Sosial RI perlu mengadvokasi dan mensosialisasikan pejabat fungsional pekerja sosial serta mengusulkan kenaikan tunjangan fungsional pekerja sosial.

Kata Kunci: Pekerja sosial, aparatur sipil negara, kinerja.

PROBLEMS AND PROSPECTS OF SOCIAL WORKER IN SOCIAL OFFICE OF THE CENTRAL JAVA PROVINCE

SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.03, August 2019, page: 227-240.

Abstract

Social workers are officials who are located as functional technical implementers who carry out social welfare service activities in government agencies and other social institutions/organizations. The number of functional officials in the Social Departement of Central Java Province is inseparable from the many social institutions as Regional Technical Implementation Units (UPTD) managed by the Social Departement of Central Java Province. The purpose of this study is to describe the problem and prospect of social workers functional official in the Social Departement of Central Java Province. The results showed that the most functional placement of social workers in social institutions owned by the Central Java Provincial Government was appropriate because functional social workers could implement their knowledge and skills in providing direct services to beneficiaries. Functionally skilled social workers were placed in social

institutions but the problem was quality skilled social workers experience saturation/monotony in the same task, so the work ethic decreases. The qualification of education comes from social welfare social work study programs for functional formation of CPNSD social workers, often not complied with by the Regional Government. Functional allowances for social workers are very small and not worth the risk Based on the results of this study, it is recommended to reduce the functional saturation of social workers to mutate the functional positions of social workers at Social Institutions to other Social Institutions. The Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia needs to advocate for and socialize the functional positions of social workers and propose increases in the functional allowances of social workers.

Keywords: *social worker, civil servant, performance.*

Suradi (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)

KARANG TARUNA, AGEN PERUBAHAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI PANDEGLANG

SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.03, Agustus 2019, hal: 241-254.

Abstrak

Peran pemuda sangat penting sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat. Karang Taruna yang tumbuh di desa/kelurahan, merupakan wahana bagi pemuda untuk memperlihatkan berbagai peran mereka. Karang Taruna hadir dalam upaya memenuhi harapan masyarakat untuk menanggulangi permasalahan sosial, khususnya permasalahan yang terjadi pada pemuda. Karena peran strategisnya itu, maka Kementerian Sosial RI menempatkan Karang Taruna sebagai salah satu pilar sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan peran Karang Taruna Sukajadi sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat. Data dan informasi dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan pengurus Karang Taruna, tokoh masyarakat, aparat desa, instansi pemerintah dan penerima layanan. Hasil penelitian, bahwa Karang Taruna Sukajadi telah melaksanakan berbagai peran sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat, dengan melaksanakan kegiatan di bidang sosial, seperti: bantuan pendidikan anak yatim, bantuan kebutuhan pokok bagi orang miskin, dan perbaikan rumah bagi keluarga miskin, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pembinaan preman jalanan, pelestarian budaya melalui pelestarian kesenian lokal. Kemudian di bidang ekonomi, bekerja sama dengan sebuah cafe untuk pemasaran kopi bakar. Meskipun demikian, berbagai peran tersebut masih perlu dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas anggota Karang Taruna.

Kata kunci: *karang taruna, agen perubahan, pengembangan masyarakat.*

KARANG TARUNA, AGENT OF CHANGE AND COMMUNITY DEVELOPMENT IN PANDEGLANG

SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.03, August 2019, page: 241-254.

Abstract

The role of youth is very important as an agent of change in community development. Karang Taruna that grows in the village / kelurahan, is a vehicle for young people to showcase their various roles. Karang Taruna on the basis of its social volunteerism helps the community to overcome social problems, especially problems for youth. Based on this strategic role, the Ministry of Social Affairs places it as a social pillar in the social welfare development. This research was conducted to describe the role of Karang Taruna Sukajadi as agents of change in community development. Data and information were collected through documentation studies and interviews with Karang Taruna officials, community leaders, village officials, government agencies and service recipients. The results of the research that Karang Taruna Sukajadi has carried out various roles as agents of change in community development, by carrying out activities in the social field, such as: education assistance for orphans, basic needs for the poor, and home improvement for poor families, prevention of drug abuse and fostering street thugs, preserving culture through the launch

of local art. Then in the economic field, working with a cafe for roasted coffee marketing. Nevertheless, these various roles still need to be optimized through capacity building for members of the Karang Taruna.

Keywords: karang taruna, agent of change, community development.

Syafruddin, Sumardjo, Prabowo Tjitropranoto dan Anna Fatchiya (Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia – IPB)

DINAMIKA KEBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BOMBANA SULAWESI TENGGARA

SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.03, Agustus 2019, hal: 255-266.

Abstrak

Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bombana menunjukkan ketidakberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya terutama di sekitar pertambangan. Masalah penelitian: (1) Bagaimanakah dinamika keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan di Kabupaten Bombana? (2) Faktor apakah yang mempengaruhi dinamika keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan? (3) Bagaimana strategi meningkatkan keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan? Tujuan penelitian: (1) menganalisis dinamika keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan di Kabupaten Bombana; (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan. (3) merumuskan strategi meningkatkan keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan. Penelitian menggunakan metode survei, analisis data secara deskriptif dan inferensial. Analisis inferensial menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan dinamika keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan di Kabupaten Bombana termasuk kategori rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya dinamika keberdayaan masyarakat adalah: Rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya motivasi, jumlah tanggungan keluarga, buruknya persepsi terhadap pertambangan dan terhadap pemberdayaan oleh perusahaan, dan rendahnya tingkat partisipasi; Rendahnya dukungan faktor eksternal; Tingginya konflik sosial; Rendahnya kompetensi adaptif masyarakat. Strategi pemberdayaan masyarakat di sekitar pertambangan adalah: Optimalisasi peran masyarakat sekitar pertambangan dalam pelaksanaan program pemberdayaan; Penguatan peran serta tenaga pendamping dalam program pemberdayaan; Melakukan pengelolaan terhadap konflik; Meningkatkan kompetensi adaptif masyarakat. Saran penelitian adalah untuk meningkatkan dinamika keberdayaan masyarakat di sekitar pertambangan di Kabupaten Bombana, pemerintah daerah harus mendorong perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Bombana untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap implementasi program tersebut.

Kata Kunci: dinamika, keberdayaan, strategi pemberdayaan.

DYNAMICS OF COMMUNITY EMPOWERMENT AROUND MINING IN BOMBANA DISTRICT SOUTHEAST SULAWESI

SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.03, August 2019, page: 255-266.

Abstract

The high poverty rate in Bombana District showed the powerlessness of the community to improve their welfare, especially the communities around mining. Research problems: (1) what were the dynamics of empowerment of communities around mining in Bombana District? (2) What factors influence the dynamics of empowerment of communities around mining? (3) How were the strategy to increase the empowerment of communities around mining? This research aimed to: (1) analyze the dynamics of empowerment of communities around mining in Bombana District; (2) analyze the factors that influence the dynamics of empowerment of communities around mining; (3) formulating the strategy to increase the empowerment of communities around mining. The research uses survey methods, descriptive and inferential data analysis. Inferential

analysis uses multiple linear regression. The results of the study showed that the dynamics of community empowerment around mining in Bombana District as a whole were low category. The factors that influence the low dynamics of community empowerment were: Weak internal factors: low level of education, low motivation, number of family dependents, poor perception of mining and poor perceptions of empowerment by companies, and low levels of participation: The low level of support from external factors; High social conflict; Low of community adaptive competency. The strategy of community empowerment around mining were: Optimizing the role of communities around mining in the implementation of empowerment programs; Strengthening the role of facilitators in empowerment programs; Managing conflict; Improve community adaptive competence. The suggestion of the research were to improve the dynamics of community empowerment around mining in Bombana District, the regional government must encourage mining companies operating in Bombana District to implement community empowerment programs and supervise the implementation of the program.

Keywords: *dinamics, empowerment, empowerment strategy.*

Munari Kustanto (Bidang Litbang dan Data, Bappeda Kabupaten Sidoarjo)

KONSTRUKSI SOSIAL TENTANG PENDIDIKAN PADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN SIDOARJO

SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.03, Agustus 2019, hal: 267-286.

Abstrak

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki kewajiban untuk mendorong dan memotivasi anaknya untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang ditentukan. Pemahaman KPM PKH tentang pendidikan dengan demikian menarik untuk dikupas. Pemahaman tersebut berkontribusi terhadap salah satu tujuan utama PKH yaitu pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi sosial tentang pendidikan pada KPM PKH di Kabupaten Sidoarjo. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian dilakukan pada dua kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki karakteristik berbeda yaitu Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Krembung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan yang ditentukan secara *snowball*. Adapun data sekunder berupa dokumen terkait pelaksanaan PKH di Kabupaten Sidoarjo yang berasal dari TKPKD Kabupaten Sidoarjo, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dan UPPKH Kabupaten Sidoarjo. Analisa dilakukan dengan menggunakan teori Konstruksi Sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi tentang pendidikan pada KPM PKH terjadi dalam tiga momen yaitu eksternalisasi pengetahuan orangtua, objektivasi lingkungan sosial, dan internalisasi sebagai hasil sosialisasi internal dan eksternal informan. Tidak terdapat perbedaan konstruksi sosial tentang pendidikan pada KPM PKH di Kecamatan Sidoarjo maupun Kecamatan Krembung. Konstruksi tentang pendidikan terbagi ke dalam empat kategori yaitu : pendidikan sebagai eksistensi sosial, pendidikan sebagai akses ekonomi, pendidikan sebagai jalan mobilitas vertikal, serta pendidikan sebagai warisan.

Kata Kunci: *konstruksi sosial, makna, pendidikan, program keluarga harapan.*

SOCIAL CONSTRUCTION OF EDUCATION AMONG THE FAMILY HOPE PROGRAM BENEFICIARY FAMILY IN SIDOARJO REGENCY

SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.03, August 2019, page: 267-286.

Abstract

Beneficiary Families (KPM) The Hope Family Program (PKH) has an obligation to encourage and motivate their children to continue their education to the specified level. An understanding of KPM PKH on education is thus interesting to explore. This comprehension contributes to PKH's main goal, which is

fulfilling basic needs in education sector. This study purpose to know the social construction of education at PKH KPM in Sidoarjo Regency. Using a qualitative approach, the study was conducted in two sub-districts in Sidoarjo Regency which had different characteristics, that is Sidoarjo District and Krembung District. Primary data in this study were obtained through observation and interviews with informants who determined by snowball. And the secondary data was form a documents that is related to the implementation of PKH in Sidoarjo Regency from the TKPKD in Sidoarjo Regency, the Social Service of Sidoarjo Regency and UPPKH Sidoarjo Regency. The analysis already done using the theory of Social Construction from Peter L. Berger and Thomas Luckmann. The results showed that the construction of education at PKH KPM occurred in three moments, which is externalization of parental knowledge, social environment objectivation, and internalization as a result of informants' internal and external socialization. There is no difference in social construction about education at PKH KPM in Sidoarjo District and Krembung District. The construction of education is divided into four categories: education as social existence, education as economic access, education as a way of vertical mobility, and education as inheritance.

Keywords: social construction, meaning, education, the hope family program.

Nyi R. Irmayani (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)

PROBLEMATIKA PENANGANAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK KEKERASAN SEKSUAL SELAMA MENJALANKAN PROSES HUKUM: KASUS DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.03, Agustus 2019, hal: 287-302.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menginformasikan tentang kondisi dan permasalahan anak pelaku pencabulan atau tindak pidana kejahatan seksual sebelum dan selama menjalankan proses hukum. Proses hukum dimulai dari penangkapan sampai putusan pengadilan. Anak mendapat hak untuk diversi pada setiap tahapan, namun terkendala pada ketersediaan LPKS, dan tanggapan masyarakat terhadap perilaku anak, akhirnya anak dibawah umur harus menjalani proses hukum. Selama menjalankan proses hukum, anak di tahan di Rumah Tahanan (Rutan) atau LP, tetapi ada anak yang ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Latar belakang anak melakukan pencabulan karena seringnya nonton tayangan pornografi dan faktor lingkungan sebaya, yang menjerumuskan anak melakukan pencabulan pada sesame teman sebaya. Kehidupan anak-anak selama dalam sel cukup memprihatinkan, sementara anak di LPKS dapat melanjutkan kehidupannya. Peran LPKS di harapkan dapat meminimalkan dampak pemenjaraan anak. Untuk itu, kajian ini merekomendasikan Optimalisasi Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai lembaga rehabilitasi psikososial bagi anak berkonflik hukum. Meningkatkan peran pendamping ABH menjadi Peksos Koreksional di LPKS dan di LP anak, sehingga anak dapat berkembang optimal.

Kata kunci: anak, pelaku, kekerasan seksual, proses hukum.

PROBLEMATICS ON HANDLING CHILDREN OF THE PERPETRATORS OF SEXUAL VIOLENCE DURING LEGAL PROCEEDINGS: CASE IN WEST KALIMANTAN PROVINCE

SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.03, August 2019, page: 287-302.

Abstract

This study aims to inform about the conditions and problems of child perpetrators of sexual abuse before and during legal proceedings. The legal process starts from arrests to judicial decisions. Children get the right to be diversified at each stage, but are constrained by the availability of LPKS, and the community's response to children's behavior, eventually underage children must undergo a legal process. During the legal process, children are held in detention centers or prisons, but there are children who are placed in the Social Welfare Institution (LPKS). The push factor of sexual abuse is the prequent viewing of pornography shows and peer environmental factors, which plunge the child into sexual abuse with peers. The lives

of children in the cell are quite alarming while children at LPKS can continue their lives. The role of LPKS is expected to minimize the impact of child imprisonment. For this reason, this study recommends the Optimization of Child Social Welfare Organizing Institutions (LPKSA) as institutions for psychosocial rehabilitation for children in legal conflict. Increasing the role of ABH facilitators to being Corrective Social Workers in LPKS and in children's LPs so that children can develop optimally.

Keywords: children, perpetrators, sexual violence, legal process.

R Sukarni, Diah Krisnatuti dan Tin Herawati (Program Studi Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor)

DUKUNGAN SOSIAL DAN FUNGSI KELUARGA PASCAGEMPA DI WILAYAH PEGUNUNGAN DAN PESISIR KABUPATEN LOMBOK TIMUR

SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.03, Agustus 2019, hal: 303-320.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dukungan sosial dan fungsi keluarga pascagempa di Kabupaten Lombok Timur yang dibedakan berdasarkan kondisi geografis yaitu daerah pegunungan dan pesisir. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 456 orang. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *random sampling disproportional*, dengan jumlah sampel 120 orang istri yang memiliki anak usia balita dari dua wilayah yang berbeda yaitu (60 orang dari pegunungan dan 60 orang dari pesisir). Data primer yang dikumpulkan menggunakan instrumen Multidimensional Scale of Perceived Sosial Support (MSPSP) untuk mengukur dukungan sosial dan The McMaster Family Assesment Device untuk melihat fungsi keluarga. Desain penelitian ini adalah *cross-sectional study*. Penelitian dilaksanakan selama bulan januari hingga februari 2019. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang nyata pada dukungan sosial dan fungsi keluarga antara keluarga korban bencana di daerah pegunungan dan pesisir. Pencapaian terendah dimensi fungsi keluarga adalah pada fungsi umum dengan nilai *mean*= 60.7 di wilayah pegunungan dan 65.1 di wilayah pesisir). Sedangkan nilai rata tertinggi adalah dimensi keterlibatan afeksi dengan nilai *mean*= 78.6 di wilayah pegunungan dan 79.2 di wilayah pesisir). Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah tempat tinggal berpengaruh positif terhadap fungsi keluarga yang dibuktikan dengan nilai $\beta=0.493$. Selain itu, dukungan sosial berpengaruh positif terhadap fungsi keluarga dengan nilai $\beta=0.398$. Rekomendasi yang diberikan adalah pemerintah diharapkan memberikan informasi yang akurat mengenai perkembangan penanganan rekonstruksi fisik korban pascabencana, dan meningkatkan pelatihan-pelatihan terkait program pemberdayaan perekonomian keluarga melalui wirausaha produk lokal untuk memotivasi masyarakat agar lebih berdaya. Selain itu, pemerintah diharapkan memaksimalkan program-program yang telah direncanakan seperti kampung siaga bencana, dan dukungan psikososial untuk meningkatkan fungsi keluarga dan dukungan sosial.

Kata Kunci: korban bencana di pegunungan dan pesisir, dukungan sosial, fungsi keluarga.

SOCIAL SUPPORT AND FAMILY FUNCTIONING POST EARTHQUAKE IN MOUNTAINOUS AND COASTAL AREAS OF LOMBOK TIMUR DISTRICTS

SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.03, August 2019, page: 303-320.

Abstract

The purpose of this study is to analyze social support and post-earthquake family functions in East Lombok Regency which are distinguished based on geographical conditions, namely mountainous and coastal areas. The population in this study amounted to 456 people. The sampling technique used in this study is *disproportional random sampling*, with a sample of 120 wives who have children under five from two different regions (60 people from the mountains and 60 people from the coast). Primary data collected uses the Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSP) instrument to measure social support and The McMaster Family Assessment Device to see family functions. The design of this study was a

cross-sectional study. The study was from January to February 2019. Based on the results of the study, it found that there were significant differences in social support and family functions between the families of disaster victims in mountainous and coastal areas. The lowest achievement of the family function dimension is the general function with a mean value = 60.7 in the mountainous region and 65.1 in the coastal region. While the highest average value is the dimensions of affection involvement, the mean value = 78.6 in the mountainous region and the mean value = 79.2 in the coastal area. The results showed that the area of residence had a positive effect on family function, as evidenced by the value $\beta = 0.493$. In addition, social support has a positive effect on family function with a value of $\beta = 0.398$. The recommendation given is that The government is expected to provide accurate information regarding the development of the handling of physical reconstruction of post-disaster victims and increase training related to family economic empowerment programs through local product entrepreneurship to motivate the community to be more empowered. In addition, the government is expected to maximize planned programs such as disaster preparedness villages, and psychosocial support to improve family functioning and social support.

Keywords: *disaster victims in the mountains and coast, social support, family functions.*

SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN PERLINDUNGAN ANAK: STUDI KASUS: SAKTI PEKSOS DI KEMENTERIAN SOSIAL

CHILD PROTECTION KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM: CASE STUDY: SAKTI PEKSOS IN MINISTRY OF SOCIAL

Tarmizi Ahmad, Irman Hermadi dan Wisnu Ananta Kusuma

Department of Computer Science, Bogor Agricultural University, Kampus IPB Dramaga Bogor

Jl. Meranti, Wing 20 Level 5-6, Bogor 16680

E-mail: tarmizi.ahmad@kemsos.go.id

Diterima: 4 Desember 2018, Direvisi: 3 April 2019; Disetujui: 15 Juli 2019

Abstrak

Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) merupakan perpanjangan tangan Kementerian Sosial untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan. Dalam menjalankan tugasnya, sakti peksos masih mengalami kesulitan dalam menangani kasus anak di lapangan, baik karena kendala rotasi yang menyebabkan hilangnya pengetahuan dari sakti peksos yang berpengalaman ataupun minimnya kesempatan berbagi pengalaman antara sakti peksos yang sudah berpengalaman dengan yang masih baru. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sistem manajemen pengetahuan perlindungan anak (SIMPEPA) bagi Sakti Peksos di Kementerian Sosial yang didasarkan pada penerapan aplikasi berbasis *web*. *Web* dapat mempermudah Sakti Peksos dalam mengelola pengetahuan secara *online* berdasarkan pengalaman yang mereka miliki agar dapat dibagikan kepada Sakti Peksos yang lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Knowledge Management System Life Cycle* (KMSLC). Empat tahapan telah diterapkan dalam penelitian ini yaitu: 1) menangkap pengetahuan; 2) mendesain *blueprint* sistem manajemen pengetahuan; 3) memverifikasi dan memvalidasi sistem manajemen pengetahuan; 4) mengimplementasikan sistem manajemen pengetahuan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya, pengetahuan yang dibuat tidak hanya dalam bentuk tulisan namun dapat berbentuk visual seperti video tutorial tentang bagaimana tahapan penanganan kasus anak yang telah ditangani dan disesuaikan dengan etika pekerja sosial.

Kata Kunci: *knowledge management system life cycle (KMSLC), satuan bakti pekerja sosial, perlindungan anak, SIMPEPA, Web.*

Abstract

'Satuan Bakti Pekerja Sosial' (Sakti peksos) is a social worker who work on behalf of Ministry of Social Affairs and provide assistance to the children who experience violence. In dealing with the children issue, Sakti Peksos are still facing problems in handling the cases in the field, whether it is due to the sakti peksos rotation, which causes the loss of knowledge from experienced professionals or because of lack of knowledge sharing among 'Sakti Peksos', especially between the workers who have the experience and who are still new. The purpose of this study is to develop a child protection knowledge management system for 'Sakti Peksos' in the the Ministry of Social Affairs based on the application of web-based applications. The web can help the 'Sakti Peksos' to manage knowledge online based on their experience so that it can be shared with other workers. This research was conducted by adopting the Knowledge Management System Life Cycle (KMSLC) method. There are four stages applied in this study, namely: 1) capturing knowledge; 2) designing the knowledge management system blueprint; 3) verificating and validating the knowledge management systems; 4) implementing knowledge management system. The study shows that the system work properly and based on the user needs. Suggestions for the development of further research is a knowledge that is

created not only in the form of writing but also can be in the way of visuals such as video tutorials of how the stage in handling the child cases which is in line with the social workers code of ethics.

Keywords: *knowledge management system life cycle (KMSLC), worker social unit, child protection, SIMPEPA, Web.*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal yang sama juga dijelaskan dalam Konvensi tentang Hak-hak Anak (*convention on the rights of the child*), bahwa anak adalah manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Hal ini merupakan perwujudan atas upaya perlindungan terhadap anak, agar tumbuh kembang anak menjadi lebih baik (Widodo 2016). Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak anak-anak yang belum terpenuhi hak-haknya dalam mendapatkan perlindungan (Astuti dan Suhendi 2014), dan mengalami berbagai masalah yang menyebabkan terampasnya hak-hak anak (Widodo *et al.* 2014).

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) juga merupakan salah satu contoh kasus dimana hak anak menjadi terabaikan. Di Indonesia, ABH banyak yang kehilangan haknya ketika menghadapi proses hukum. Menurut penelitian yang dilakukan oleh KPAI (2018), terdapat 1434 kasus anak yang menjalani proses hukum dan kehilangan hak-haknya.

Oleh sebab itu, di dalam kasus ABH, diperlukan adanya sistem perlindungan anak melalui sistem diversi (Noviana, 2015). Diversi sendiri diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Analiansyah dan Rahmatillah, 2015). Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan segala permasalahan terkait kriminalitas anak diluar proses peradilan sehingga mereka tidak kehilangan hak-haknya.

Kementerian Sosial, merupakan salah satu lembaga pemerintah yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dalam penanganan perlindungan anak. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) merupakan salah satu program yang dikembangkan Kementerian Sosial dalam merespon permasalahan kesejahteraan sosial anak. Salah satu pelaksana program ini adalah Pekerja Sosial yaitu Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos). Sakti Peksos adalah tenaga kesejahteraan sosial anak, yang ditunjuk dan diangkat oleh Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak sebagai pendamping pelaksana PKSA. Sesuai data direktorat kesejahteraan sosial anak pada tahun 2014 Sakti Peksos berjumlah 670 orang yang ditempatkan pada Dinas Sosial Kabupaten/Kota di Indonesia. Tugas Sakti Peksos adalah menjadi pendamping pelaksana PKSA dan mengatasi permasalahan OMKS di wilayah kerja masing-masing. Dalam hal penanganan anak, Sakti peksos mengatasi permasalahan anak dan kekeluargaan serta mendayagunakan berbagai sumber baik pada tingkat individu, keluarga, organisasi, maupun komunitas dan masyarakat. Sebelum

melaksanakan tugas pendampingan di lapangan, Sakti Peksos baru terlebih dahulu diberikan pembekalan pengetahuan awal berupa bimbingan teknis dan pendidikan dan pelatihan (Diklat) perlindungan anak yang diselenggarakan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional I-VI yang ada di Indonesia.

Hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan kepada Sakti Peksos, pasca Diklat yang telah dilakukan oleh BBPPKS Regional I Sumatera ternyata masih banyak dari Sakti Peksos mengalami kesulitan dalam penanganan kasus anak di lapangan. Penyebabnya adalah (1) kurangnya Diklat dalam penanganan masalah, terutama masalah yang belum pernah mereka kenal (Suryani & Hardiati, 2016), dan praktik lapangan yang belum sesuai dengan standar praktik pekerja sosial (Susilowati *et al.* 2016); (2) adanya Sakti Peksos yang mengundurkan diri atau rotasi penugasan dari satu wilayah ke wilayah yang lain menyebabkan hilangnya pengetahuan dari Sakti Peksos yang berpengalaman, sebelum pengetahuan tersebut dapat disimpan dan didokumentasikan dengan baik; (3) kurangnya berbagi pengetahuan dan pengalaman antara Sakti Peksos yang memiliki pengetahuan, karena saling sibuk menangani kasus dan rentan jarak wilayah penugasan yang jauh seringkali menjadi penghambat untuk melakukan *transfer knowledge*.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendesign Sistem Manajemen Pengetahuan Perlindungan Anak (SIMPEPA) bagi Sakti Peksos di Kementerian Sosial. Sistem ini merupakan sarana untuk berbagi pengetahuan antara Sakti Peksos, terutama pengetahuan dari Sakti Peksos yang lebih berpengalaman. Dengan kata lain, penggunaan SIMPEPA bertujuan untuk mengelola pengetahuan dari para Sakti Peksos yang lebih berpengalaman menjadi

lebih baik sehingga pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk penanganan permasalahan anak berikutnya (Assegaf *et al.* 2013). Sistem manajemen pengetahuan memungkinkan komunikasi secara masif dari kebijakan, prosedur, dan data membantu keberlangsungan dari pengetahuan (Satzinger *et al.* 2010). Selain itu, penggunaan sistem manajemen pengetahuan berbasis *web* dapat mempermudah mengelola pengetahuan dari pakar sehingga informasi dan pengetahuan yang dihasilkan akurat dan diakses dengan cepat (Nasution *et al.* 2014).

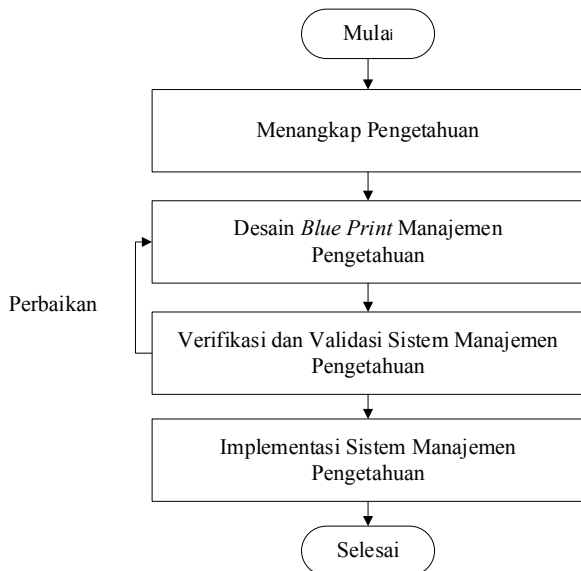
Dengan adanya SIMPEPA pengetahuan terkait dengan perlindungan anak yang relevan dapat diakumulasikan dan disistamkan, sehingga pengetahuan tersebut dapat digunakan oleh lingkungan internal dan eksternal secara optimal (Seminar *et al.* 2010). Oleh sebab itu SIMPEPA menjadi penting untuk membantu Sakti Peksos mendapatkan gambaran yang relevan bagaimana melakukan penanganan kasus anak di lapangan secara nyata.

METODE

Metode penelitian diadopsi dari metode *Knowledge Management System Life Cycle* (KMSLC) Awad dan Ghaziri (2010) dengan tahapan penelitian yang dilakukan mulai dari menangkap pengetahuan, desain *blue print* manajemen pengetahuan, verifikasi dan validasi manajemen pengetahuan sampai implementasi manajemen pengetahuan.

Untuk tehnik pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling, dengan menentukan informan yang paling mengetahui permasalahan. Dalam penelitian ini dipilih seorang sakti peksos dan satu orang widyaiswara dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional I Sumatera. Informan yang dipilih adalah yang telah berpengalaman lebih dari 5 tahun bertugas dengan dilakukan pengumpulan data,

wawancara, observasi dan pengumpulan data berupa dokumen penanganan kasus. Analisa kasus dilakukan dengan menggunakan metode KMSLC.



Gambar 1. Tahap penelitian.

Sumber (Awad dan Ghaziri 2010)

Tahap penjelasan dari metode KMSLC adalah sebagai berikut:

1. Menangkap Pengetahuan

Tahap menangkap pengetahuan dilakukan dengan wawancara kepada sakti peksos dan widyaiswara terpilih serta mencatat proses yang dilakukan pakar dalam menangani kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak. Pengetahuan dapat terkumpul secara efektif dan konsisten menggunakan pendekatan *storytelling* yang dikembangkan oleh Shaw dan Liu (2016) di mana pakar menceritakan pengalaman tentang penanganan kasus anak yang telah dilakukan dari waktu ke waktu ke dalam sistem. Informasi kasus yang ditangani terutama terkait isu ABH atau anak yang menghadapi proses hukum. Metode ini akan memudahkan para pengguna sistem, terutama sakti peksos yang belum memiliki

pengalaman dalam bertugas sehingga pengetahuan yang didapatkan tidak hanya berasal dari dokumen saja, namun juga pengetahuan berupa pengalaman yang diceritakan oleh pakar saat menangani kasus anak.

2. Desain *Blueprint* Manajemen Pengetahuan

- a. Kodifikasi pengetahuan: Kodifikasi pengetahuan dibangun menggunakan *Knowledge Map* untuk memetakan pengetahuan yang ada pada layanan penyelesaian kasus anak dan *Case-Based Reasoning* merupakan kumpulan pengetahuan berdasarkan pengalaman, termasuk kasus dan solusinya. Pengetahuan-pengetahuan yang telah terkumpul akan dimuat dalam suatu *platform* sistem manajemen pengetahuan berbentuk repository, contohnya yaitu kumpulan jurnal terkait penanganan kasus anak. Pengetahuan disimpan ke dalam repositori dengan pembobotan *term frequency* (TF) dan *Inverse Document Frequency* (IDF).
- b. Perancangan sistem manajemen pengetahuan: perancangan dilakukan menggunakan UML (*Unified Modelling Language*). Kendall dan Kendall (2011) UML adalah bahasa yang terstandarisasi yang digunakan untuk memodelkan suatu sistem dengan pendekatan *Object Oriented Programming* (OOP).

3. Verifikasi dan Validasi Sistem Manajemen Pengetahuan

Pengujian logikal menganalisis pengetahuan oleh pakar untuk membuktikan apakah pengetahuan-pengetahuan terkait dengan perlindungan anak sudah terjamin kebenarannya. Pengujian penerimaan pengguna merupakan pengujian fungsionalitas dari aplikasi yang dibangun,

dengan memastikan bahwa sistem yang dibuat sudah memiliki fungsi-fungsi yang tepat guna dan menghasilkan *output* yang tepat dengan menggunakan *blackbox testing*.

Pada tahapan akhir dilakukan pengujian *User Acceptance Testing* (UAT). UAT merupakan pengujian yang dilakukan oleh *end-user* di mana pengguna berinteraksi langsung dengan sistem dan dilakukan verifikasi apakah fungsi yang ada telah berjalan sesuai dengan kebutuhan/fungsi Perry (2006). Tes UAT dilakukan secara formal oleh pengguna untuk menentukan sebuah perangkat lunak diterima atau ditolak. Hasil penelitian Pasaribu dan Solichin (2017) menyatakan UAT dilakukan untuk menguji penerima sistem yang telah dihasilkan dengan skala likert yang menyajikan bobot penilaian digunakan pada pengujian terhadap sistem

4. Implementasi Sistem Manajemen Pengetahuan

Tahap implementasi sistem manajemen pengetahuan perlindungan anak akan mulai dioperasikan secara menyeluruh berbasis *web* yang menggunakan *framework* CakePHP bahasa pemrograman PHP dengan *Relational Database Management System* (RDBMS) MySQL.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menangkap Pengetahuan

Berdasarkan hasil studi literatur, observasi dan wawancara dengan Koordinator Sakti Peksos Kota Padang dan widyaiswara dari BBPPKS Regional I Sumatera. Hasil identifikasi sumber pengetahuan yang didapatkan dari studi literatur, observasi dan wawancara terhadap Sakti Peksos dan widyaiswara dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Identifikasi pengetahuan.

Pengetahuan	Pemilik		Penyimpanan	
	Sakti Peksos	Widyaiswara	Hard Copy	Soft Copy
Laporan sosial	√		√	√
Data respon kasus yang telah ditangani	√		√	√
Pengalaman lapangan	√			
Informasi lapangan	√			
Inovasi (Ide)	√	√		
Buku (Pedoman)		√	√	√
Materi Diklat/Bimtap/Bimtek		√	√	√
Modul Diklat		√	√	√
Peraturan perundang-undangan		√	√	√
Etika pekerja sosial		√		

Berdasarkan hasil identifikasi pengetahuan pada Tabel 1, maka pengetahuan yang ditangkap dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pengetahuan *explicit* dan pengetahuan *tacit*.

1. Pengetahuan *explicit*

Pengetahuan *explicit* adalah pengetahuan yang bersumber dari berbagai dokumen-dokumen tertulis berkaitannya dengan penyelesaian kasus perlindungan anak. Bentuk pengetahuan ini dapat berupa *upload* dokumen elektronik dan non-elektronik kedalam sistem dan tersimpan dalam *repository* sehingga dapat di-*download* kembali oleh Sakti Peksos. Pengetahuan tersebut antara lain adalah laporan sosial, data respon kasus yang telah ditangani, buku/pedoman, materi Diklat, modul Diklat dan peraturan perundang-undangan.

2. Pengetahuan *tacit*

Pengetahuan *tacit* adalah pengetahuan yang ada pada pengalaman pribadi dan sulit diekspresikan dengan kata-kata.

Pengetahuan *tacit* pada Sakti Peksos berupa pengalaman pribadi selama melaksanakan tugas di lapangan, hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan pengalamannya kedalam sistem secara *storytelling*. Contohnya, sakti peksos yang sudah melaksanakan tugas menyelesaikan kasus pemerkosaan anak, akan menceritakan bagaimana mekanisme penanganan kasus yang telah dilakukannya. Sedangkan pengetahuan *tacit* dari widyaiswara berupa verifikasi dan validasi terhadap pengetahuan yang telah dimasukkan sebelumnya oleh Sakti Peksos apakah pengetahuan tersebut telah sesuai dengan etika profesi pekerja social. Jika sudah, maka akan menghasilkan pengetahuan valid yang dapat dijadikan pedoman/panduan oleh Sakti Peksos lainnya untuk menangani kasus perlindungan anak di lapangan.

Desain *Blueprint* Manajemen Pengetahuan

Kodifikasi Pengetahuan

Pada penelitian ini *Knowledge Map* pengetahuan akan di buat berdasarkan jenis kasus anak. Untuk setiap jenis kasus anak terdapat subjek kasus anak diantaranya anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, dan anak sebagai saksi. Pada setiap jenis kasus di petakan berdasarkan propinsi, kabupaten, permasalahan dan asesmen yang ada pada kasus, sehingga dapat diketahui tindakan penanganan dan rekomendasi yang akan diberikan oleh sakti peksos terhadap kasus tersebut, Contohnya, jenis kasus pencurian dengan subjek kasus anak sebagai pelaku, akan dipetakan sesuai daerah kejadian/ daerah sakti peksos yang berpengalaman melakukan penanganan kasus (contoh, sumatera barat, kota padang). Lalu, pada menu tersebut juga dapat dilihat hasil asesmen yaitu anak merupakan anak tidak mampu dan kedua orangtuanya telah

berpisah. Proses penanganannya yaitu mendampingi klien dalam proses hukum bersama BK dan Bappas. Rekomendasinya klien dibina di LPKS. Alur *Knowledge Map* dapat dilihat pada Gambar 2.

Pada penelitian ini *Case-Based Reasoning* dikembangkan untuk memungkinkan Sakti Peksos memberikan solusi terhadap permasalahan perlindungan anak berdasarkan pengalaman kasus masa lalu yang telah diselesaikan untuk selanjutnya kasus serta solusinya disimpan dalam *database*. Selanjutnya dapat digunakan kembali untuk memecahkan kasus baru, jika kasus tersebut hampir sama atau mungkin sama dengan kasus terdahulu. Hal yang terpenting dalam CBR adalah bagaimana melakukan *retrieve, reuse, revise dan retain* terhadap dokumen pengetahuan yang tersimpan dalam *database*. Pada penelitian ini hal tersebut dilakukan dengan cara *indexing*. *Indexing* tersebut menggunakan perangkat lunak *lucene* yang mencakup tokenisasi, pembobotan, dan penyimpanan hasil *indexing* ke dokumen *lucene*.

Perancangan Sistem Manajemen Pengetahuan

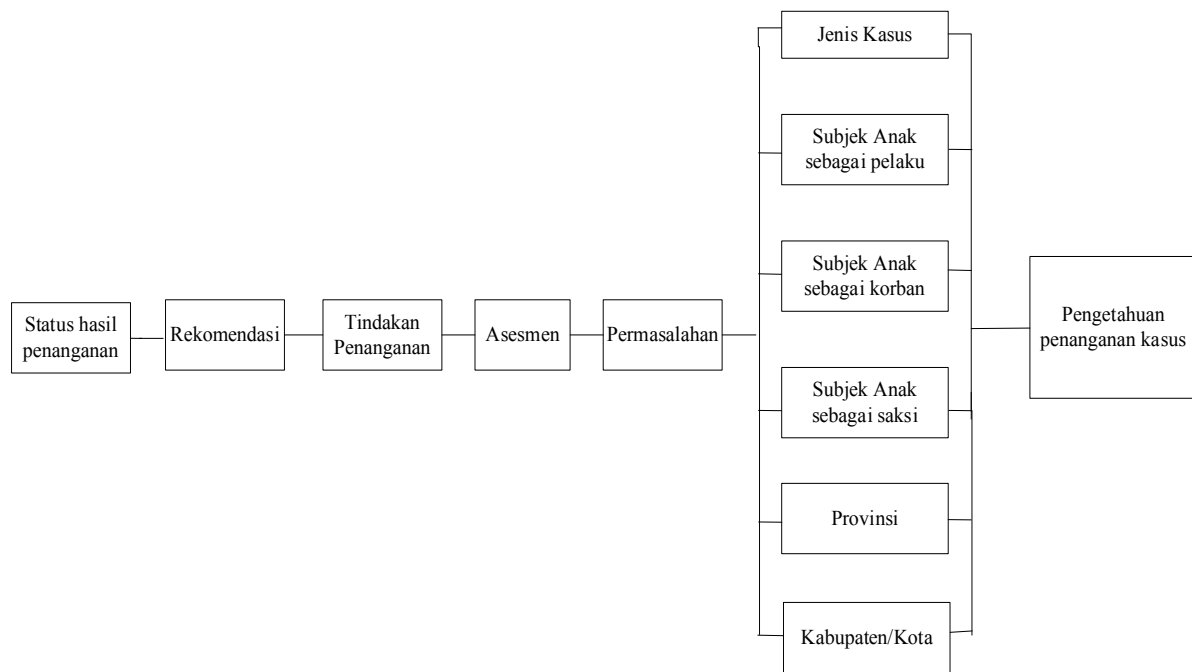
Pada tahapan perancangan ini terbagi atas:

1. Kebutuhan Fungsional (KF) Sistem

Kebutuhan fungsional perangkat lunak dari sistem manajemen pengetahuan perlindungan anak (SIMPEPA) meliputi beberapa fitur antara lain :

a. Fitur pengetahuan kasus

Fitur pengetahuan kasus ini memfasilitasi Sakti Peksos untuk mendokumentasikan pengetahuan-pengetahuan *tacit* dalam bentuk pengalaman dalam penanganan kasus



Gambar 2. Hasil kodifikasi *knowledge map*.

yang ditulis secara *storytelling* dan membagikan pengalaman tersebut kepada Sakti Peksos lain. Pengetahuan *tacit* merupakan pengetahuan penyelesaian kasus yang telah diselesaikan oleh Sakti Peksos mula dari permasalahan, asesmen, penanganan, rekomendasi, dan hasil penanganan kasus.

b. Fitur validasi pengetahuan kasus

Merupakan fitur bagi widyaiswara untuk melakukan *review* kembali hasil penanganan kasus anak yang telah buat Sakti Peksos pada fitur pengetahuan kasus, apakah pengetahuan tersebut telah sesuai dengan etika pekerja sosial. Jika sesuai maka pengetahuan tersebut dapat diterbitkan untuk digunakan kembali sebagai acuan dalam penanganan kasus bagi Sakti Peksos lainnya, jika belum sesuai maka widyawisara akan memberikan koreksian pada pengetahuan yang telah dibuat agar dilakukan perbaikan.

c. Fitur e-dokumen

Fitur e-dokumen merupakan fitur membagikan pengetahuan *explicit* oleh widyaiswara dalam bentuk *upload* dokumen elektronik kedalam sistem. Dokumen tersebut berupa materi pelatihan perlindungan anak, modul Diklat perlindungan anak, buku pedoman perlindungan anak, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

d. Fitur informasi pendidikan dan pelatihan

Fitur informasi Diklat memfasilitasi pengguna untuk dapat melihat keDiklatan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

e. Fitur forum diskusi

Fitur ini digunakan oleh pengguna sistem untuk saling berinteraksi melakukan diskusi mengenai topik atau suatu permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Dengan adanya fitur ini diharapkan pengguna sistem dapat menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi.

2. Kebutuhan Non Fungsional (KNF)

Kebutuhan ini dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori yaitu kebutuhan teknis, kebutuhan kinerja, kebutuhan kegunaan, kebutuhan keandalan, dan kebutuhan keamanan. Rincian kebutuhan non-fungsional tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kebutuhan teknis: Kebutuhan ini terkait dengan karakteristik operasional yang berkaitan dengan lingkungan, perangkat keras, dan sistem perangkat lunak.
- b. Kebutuhan kinerja: Sistem ini dapat diakses baik Sakti Peksos, widyaiswara dan admin kapan saja, di mana saja, dengan syarat koneksi ke server. Sistem memiliki waktu respon yang cukup baik disemua layar.
- c. Kebutuhan kegunaan: Tampilan antarmuka yang mudah dipelajari, dan digunakan (*user-friendly*) serta diaplikasikan menggunakan bahasa indonesia.
- d. Kebutuhan keandalan: Sistem ini juga dapat bekerja *full online* dan dapat di *update* setiap saat. Terdapat informasi petunjuk tatacara penggunaan sistem manajemen pengetahuan, berupa video tutorial masing-masing pengguna sistem.
- e. Kebutuhan keamanan: Kebutuhan ini terkait dengan keamanan sistem manajemen pengetahuan harus memiliki mekanisme *login* pengguna, dengan cara memasukkan email dan password.

3. Perancangan sistem

a. Use Case Diagram

Use case diagram berfungsi menggambarkan pengguna atau lebih dikenal aktor siapa saja yang berhak melakukan apa pada proses apa yang ada pada sistem tersebut dengan adanya suatu interaksi antara satu atau lebih

aktor dengan sistem. Pada penelitian ini terdapat 3 aktor yang terlihat dalam pengelolaan sistem manajemen pengetahuan perlindungan anak yaitu: 1) Sakti peksos; 2) Widyaiswara; dan 3) Admin.

Use case diagram menggambarkan fungsionalitas sistem manajemen pengetahuan yang akan dibangun dan interaksi antara aktor dengan sistem. Skenario *use case* yang menggambarkan alur jalannya proses *use case* dari sisi aktor dan sistem dapat dilihat pada Gambar 3.

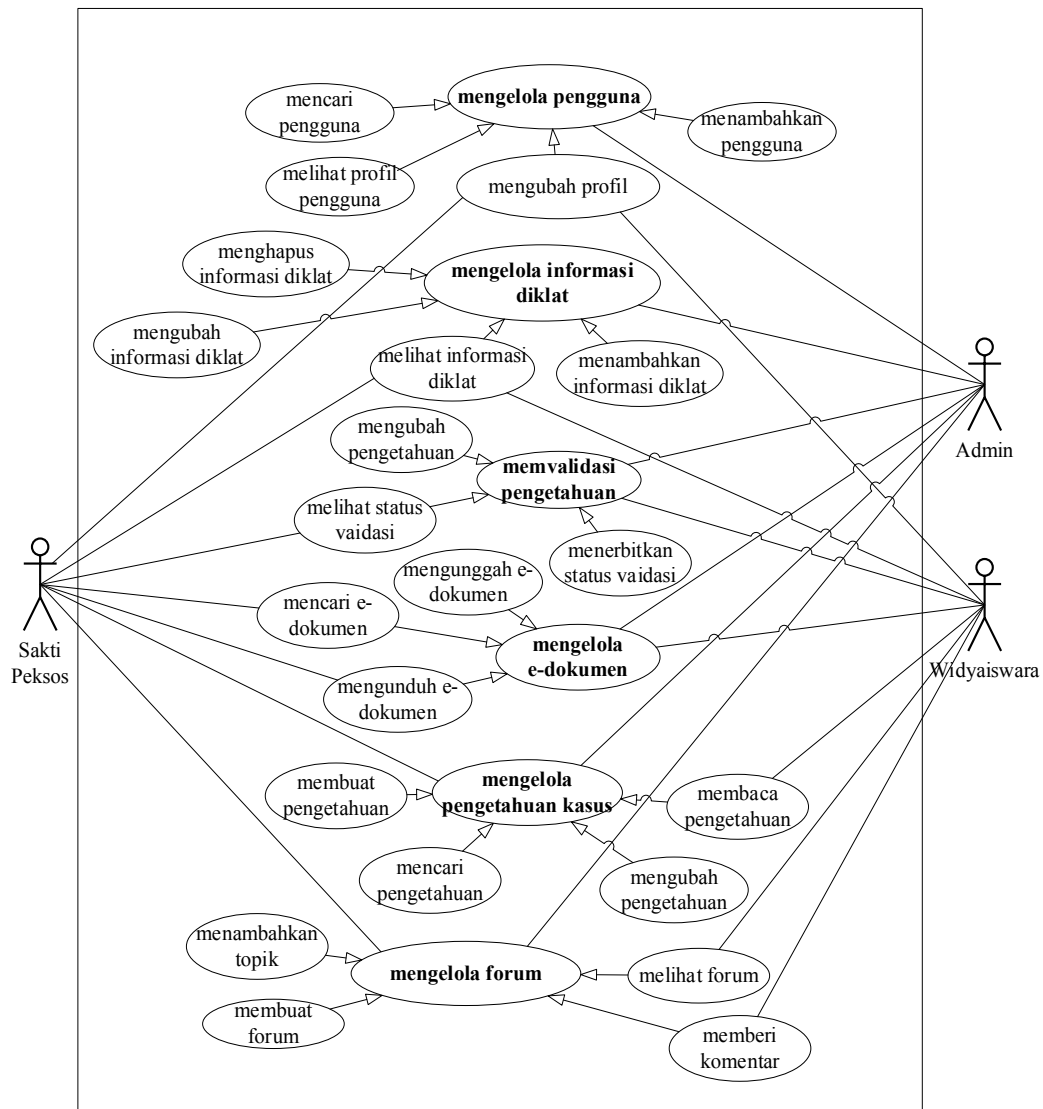
b. Activity diagram

Diagram aktivitas atau *activity diagram* menggambarkan aliran kerja atau aktivitas sebuah sistem yang ada pada perangkat lunak.

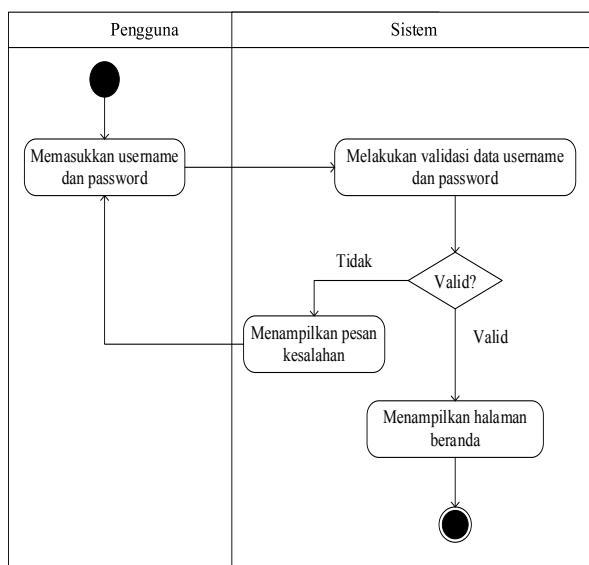
Semua pengguna harus melakukan *login* terlebih dahulu untuk memasuki semua fitur yang terdapat pada SIMPEPA. *Activity diagram* berikut menjelaskan pengguna terlebih dahulu memasukkan *username* dan *password* yang telah diberikan. Selanjutnya sistem akan merespon jika *username* dan *password* benar maka akan masuk ke dalam sistem jika salah akan menampilkan pesan kesalahan. *Activity diagram login* dapat dilihat pada Gambar 4.

c. Class diagram

Class Diagram menggambarkan struktur sistem saat pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem dan mempermudah pada saat proses *coding*. *Class diagram* dibuat sebagai gambaran untuk membuat desain *database*. *Class diagram* SIMPEPA dapat dilihat pada Gambar 5.

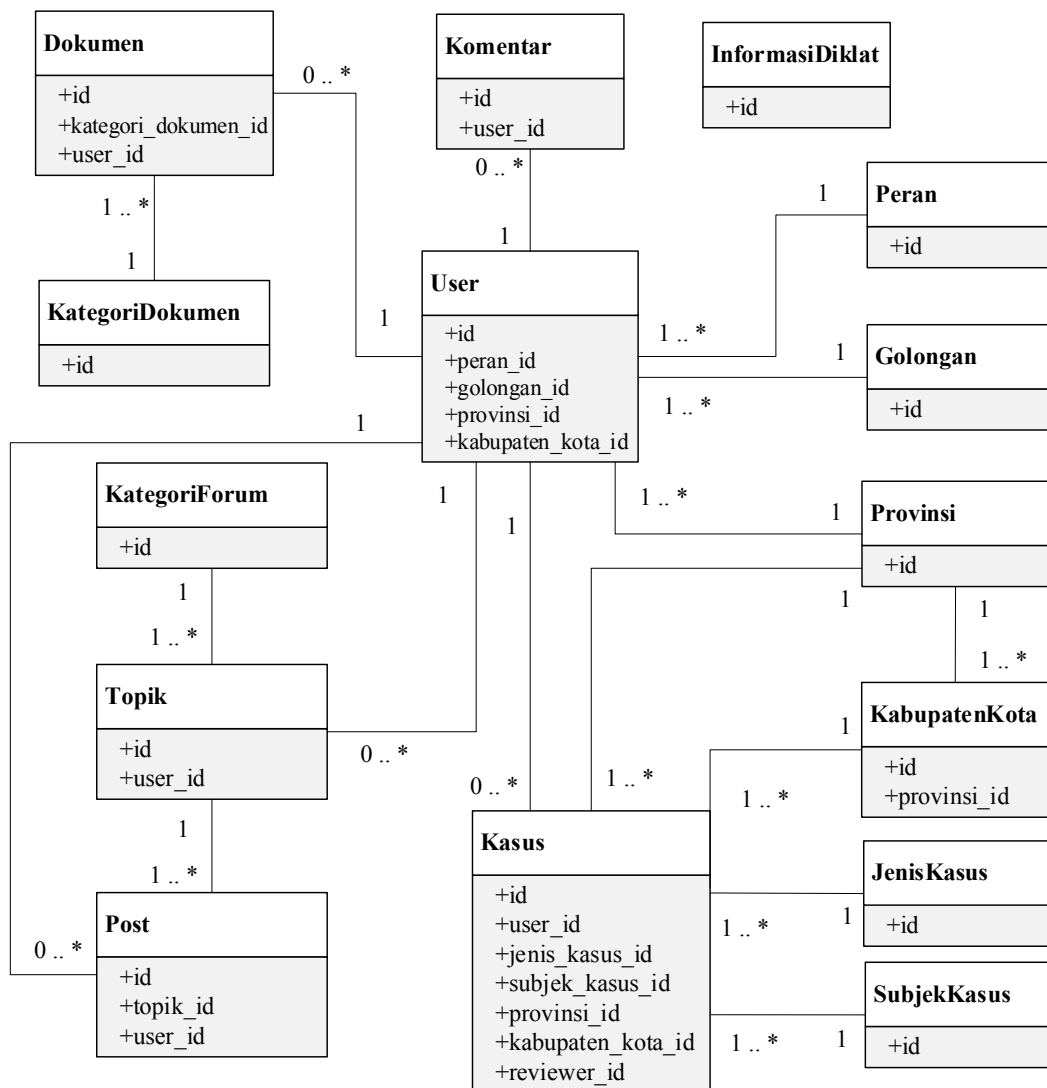


Gambar 3 Use case sistem manajemen pengetahuan perlindungan anak.



Gambar 4 . Activity diagram login

Class diagram SIMPEPA di atas memperlihatkan bahwa, *class diagram* yang akan digunakan untuk pembangunan sistem terdapat 15 kelas. Sementara itu, antara kelas yang satu dengan kelas yang lain saling terhubung dengan kardinalitas yang berbeda, tipe kardinalitas sendiri ada 3 yaitu, *one-to-one*, *one-to-many*, dan *many-to-many*. *Class diagram* Gambar 5 contohnya untuk kelas user memiliki kardinalitas *one-to-many* pada kelas Komentar yang artinya satu user bisa membuat 0 atau tidak sama sekali sampai bisa membuat banyak komentar.



Gambar 5. Class Diagram SIMPEPA.

Selain nama kelas juga terdapat atribut pada *class diagram*, atribut merupakan variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas, contohnya pada kelas user memiliki atribut id, peran_id, golongan_id, provinsi_id, dan kabupaten_kota_id begitu juga dengan atribut pada masing-masing kelas yang lain dapat dilihat pada *class diagram* SIMPEPA.

Verifikasi dan Validasi Sistem Manajemen Pengetahuan

Tahap verifikasi dilakukan dengan melakukan wawancara kepada Sakti Peksos dan widyaiswara berkaitan dengan kelengkapan dan keabsahan pengetahuan. Masukan

pengetahuan *tacit* dan *explicit* yang ada pada sistem telah dilakukan verifikasi. Hasil verifikasi menyatakan bahwa pengetahuan yang dimasukkan ke dalam sistem adalah benar dan berkaitan dengan perlindungan anak.

1. Verifikasi pengetahuan terhadap penanganan kasus anak. Sakti Peksos dapat menambah pengetahuan kasus anak yang akan dimasukkan ke dalam sistem, mulai dari jenis kasus sampai dengan hasil penanganan kasus. Widyaiswara dapat menambahkan dokumen yang akan disimpan berdasarkan kategori dokumen yang terdiri dari modul, materi, buku pedoman, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang akan disimpan kedalam sistem. Hasil

verifikasi pengetahuan terhadap penanganan kasus anak adalah benar dan sesuai.

2. Verifikasi pengetahuan berdasarkan hasil pencarian. Pengguna dapat melakukan pencarian pengetahuan dengan memasukkan kata kunci pada sistem dan sistem akan menampilkan pengetahuan yang berkaitan dengan kata kunci tersebut. Hasil verifikasi pengetahuan berdasarkan hasil pencarian adalah benar dan sesuai.

Tahap validasi dilakukan dengan cara menguji fungsionalitas sistem menggunakan metode *blackbox testing* dengan cara membuat kasus uji yang bersifat mencoba semua fungsi dengan kasus sesuai dan tidak sesuai, sampai menemukan kesalahan yang terdapat pada fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang, kesalahan *interface*, kesalahan terhadap nilai input dan validitas fungsional. Dari 39 kasus uji yang telah dilakukan maka hasil pengujian menyatakan bahwa semua fungsi pada sistem berjalan sesuai dengan perintah yang diberikan.

Pengujian UAT diimplementasikan oleh pengguna untuk mengetahui fungsionalitas aplikasi berjalan dengan baik atau tidak sehingga dapat ditetapkan aplikasi yang dibangun diterima atau ditolak oleh pengguna. Pengujian ini, kuesioner terdiri dari tujuh pertanyaan mengenai penilaian pengguna terhadap aplikasi yang telah dibuat.

Jumlah responden dalam pengujian sebanyak tujuh orang yang terdiri dari widyaiswara dan Sakti Peksos senior dan Sakti Peksos baru yang belum pernah mengenal ataupun menggunakan SIMPEPA. Responden telah menerima kuesioner dan petunjuk penggunaan aplikasi melalui video demo SIMPEPA yang dikirim melalui *whatsapp*. Untuk pengujian ini responden diminta mengakses prototipe SIMPEPA yang beralamat <http://178.128.93.17:8081>. Hasil rekapitulasi pengujian UAT dapat dilihat pada Gambar 6. Apabila dirata-ratakan dari satu

sampai tujuh pertanyaan yang telah dijawab oleh responden, maka yang mengatakan setuju sebesar 46,94% dan sangat setuju sebesar 53,06%, ini menunjukkan bahwa SIMPEPA berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya.

Implementasi Sistem Manajemen Pengetahuan

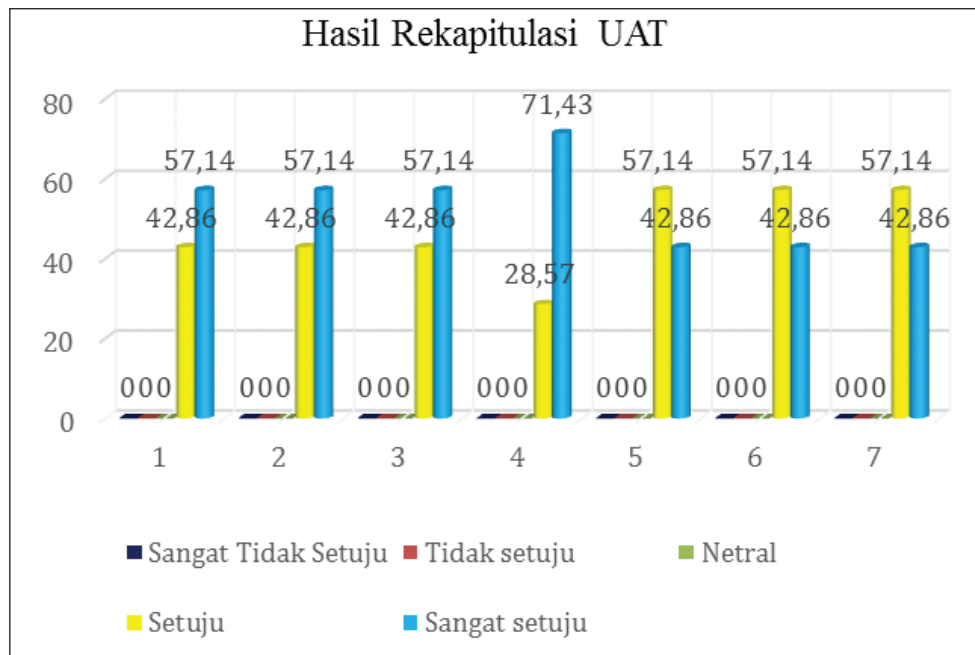
Pada tahapan implementasi SIMPEPA siap di instalasi ke dalam sebuah *server* yang berada di Kementerian Sosial yang dapat diakses via internet. Setelah proses instalasi selesai, maka SIMPEPA siap digunakan. Proses implementasi dilakukan dengan menginstall aplikasi SIMPEPA pada webserver Apache dan RDBMS MySQL di *server*.

Sebagai antar muka bagi pengguna agar dapat mengakses data, dapat menggunakan *web browser* (*mozilla*, *google chrome* dan *internet explorer*). Halaman implementasi *upload* e-dokumen dapat dilihat pada Gambar 7.

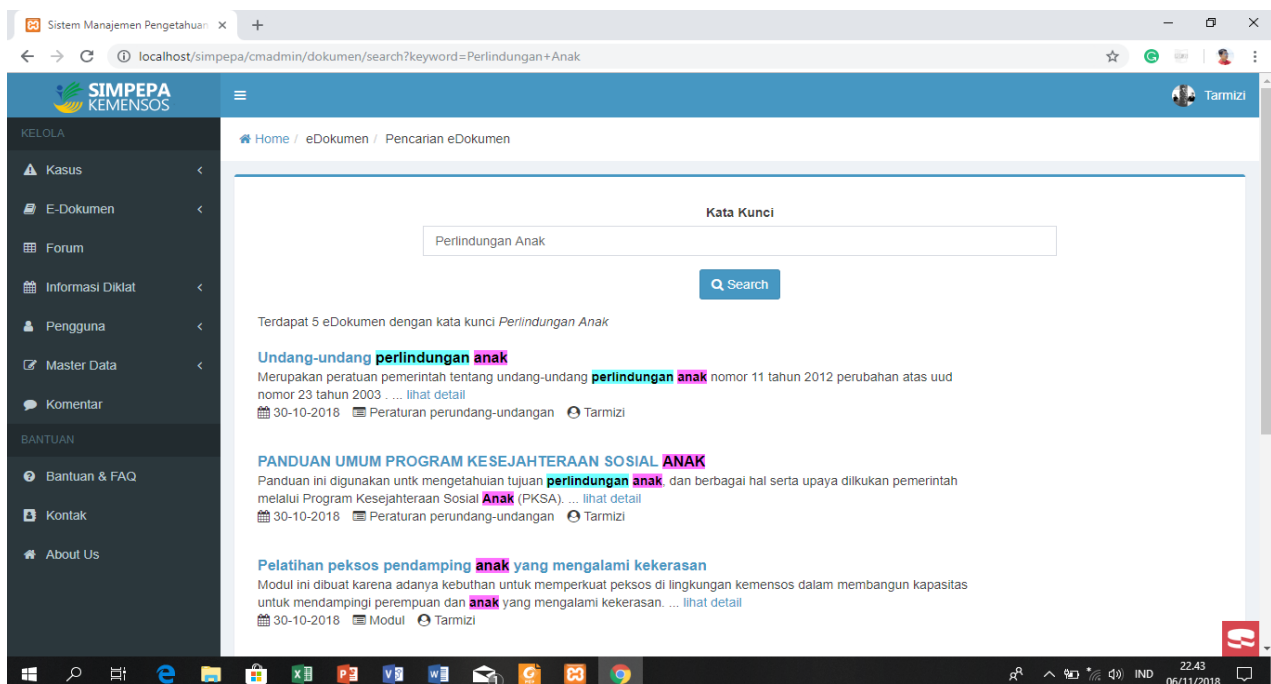
KESIMPULAN

Penelitian ini telah berhasil membuat sistem manajemen pengetahuan perlindungan anak bagi Sakti Peksos di Kementerian Sosial. Sistem manajemen pengetahuan berhasil dikembangkan menggunakan metode yang diadopsi dari KMSLC, dan perancangan sistem menggunakan pendekatan berorientasi objek, yang diimplementasikan menggunakan CakePHP dengan bahasa pemrograman PHP yang didukung dengan RDBMS MySQL.

SIMPEPA dikembangkan sebagai media untuk mengelola pengetahuan berkaitan dengan perlindungan anak bagi Sakti Peksos di Kementerian Sosial. SIMPEPA aplikasi berbasis *web* yang memiliki fitur-fitur untuk mendukung proses manajemen pengetahuan yang terdiri dari pengetahuan kasus, e-dokumen, validasi pengetahuan, informasi Diklat, dan forum tanya jawab disertai dengan menu bantuan. Pada



Gambar 6. Hasil rekapitulasi *user acceptance test*.



Gambar 7. Implementasi mencari pengetahuan pada SIMPEPA.

tahap validasi yang telah dilakukan dengan cara menguji fungsionalitas sistem menggunakan metode *blackbox testing* menyatakan bahwa semua fungsi pada aplikasi SIMPEPA berjalan sesuai dengan perintah yang diberikan. Selanjutnya hasil rekapitulasi pengujian *user acceptance test* rata-rata responden setuju

sebesar 46,94 persen dan sangat setuju sebesar 53,06 persen, hal ini menunjukkan bahwa SIMPEPA dapat digunakan dengan baik sesuai dengan keinginan pengguna.

SARAN

Selain SIMPEPA ini digunakan sebagai

media berbagi pengetahuan, harapannya SIMPEPA juga dapat digunakan sebagai media tambahan pembelajaran pada saat pelaksanaan Diklat yang berkaitan dengan perlindungan anak dan sebagai referensi bagi widyaiswara dalam menyusun modul-modul pembelajaran yang berkaitan dengan perlindungan anak. Pada pengembangan selanjutnya, pengetahuan yang dibuat tidak hanya dalam bentuk tulisan namun dapat berbentuk visual seperti video tahapan penanganan kasus anak yang telah disesuaikan dengan etika pekerja sosial. *Backup data* juga diperlukan guna menghindari kehilangan data akibat *server* yang mengalami kerusakan.

Sistem manajemen pengetahuan (*knowledge management system*) ini juga dapat diterapkan pada bidang profesi keahlian lainnya yang ada pada Kementerian Sosial. Khususnya pekerja sosial profesional lainnya, dimana sistem ini dapat mengelola pengetahuan tentang bagaimana menjalani profesi sebagai pekerja sosial profesional, dan sistem juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pengguna.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penelitian ini: Sakti Peksos Kementerian Sosial RI, Direktorat Anak Kementerian Sosial RI dan Widyaiswara Kementerian Sosial RI atas informasi dan data yang telah diberikan. Selain itu juga diucapkan terimakasih kepada Pusdiklat Kementerian Sosial RI yang telah mendanai penelitian ini. Serta semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga penelitian ini bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Analiansyah, R. S. (2015). *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi terhadap Undang-undang*

Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh). *Internasional Journal of Child and Gender Studies*. Vol 1 No 1.

Assegaf S, Hussin AC, & Dahlan HM. (2013). Knowledge Management System as Enable for Knowledge Management Practices in Virtual Communities. *International Journal of Cumputer Science (IJCSI)*.

Astuti M, & Suhendi A. (2014). Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. *Sosio Konsepsia (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial)* . Vol4. No.1.215-235.

Awad EM, & Ghaziri HM. (2010). *Knowledge Management*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

Kendall KE, & Kendall JE. (2011). *System Analysis and Desain 8th Edition*. Pearson Education Inc. Pretice Hall.

Keputusan Presiden RI. (1990). Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on Rights of The Child* (Konvensi Hak Anak).

Keputusan Menteri Sosial RI. (2013). Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial.

Nasution AR, Hermadi I, Kusuma WA, & Syaufi I. (2014). Knowledge Management System for Zakat. *Telkonnika Indonesia Journal of Electrical Engineering*. 12(12):8349-8356.

Noviana I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Jurnal Sosio Informa*. Vol 01 No 01.

PasaribuA, & SolichinA. (2017). Pengembangan

- Aplikasi Knowledge Management System Helicopter Landing Officer pada PT Pacific Aviation Indonesia. *Jurnal Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi*. Vol.1 No.3 :232-238.
- Perry W E. (2016). *Effective Methods for Software Testing* 3rd Edition. Indianapolis, Indiana: Wiley Publishing, Inc.
- Satriwan, Alfiana, Fasya H, Amelia AF, & Yani AA. (2017). Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Vol 3 No 1. pISSN: 2460-6162.eISSN: 2527-6476.
- Satzinger I, Jackson R, & Burd S. (2010). *System Analysis & Design in A Changing World*. Boston, MA (US): Course Technology, Cengage Learning.
- Seminar KB, Yulia Y, & Mustafa B. (2010). *The Development of IPB Knowledge Management System*. Bogor (ID): IPB (Bogor Agricultural University).
- Shaw N, & Liu P. (2016). A Knowledge Management System (KMS) Using a Storytelling-based Approach to Collect Tacit Knowledge: An Editorial Overview. *IEEE Xplore*. ISSN : 1558-058X.
- Suryani, & Hardiati E. (2016). Peran Sakti Peksos dalam Pendampingan Program Kesejahteraan Sosial Anak. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*. Vol 15 No 1. 65-76.
- Susilowati E, Dewi K, & Subardhini M. (2016). *Social Work in Children Welfare Program, in Bandung*. Pusat Kajian Anak STKS Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-undang Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Widodo N, Kurniasari A, Susantyo B, Husmiati, Wismayanti YF, Irmayani, Astuti M, & Padmi TA. (2014). Perlindungan Sosial Bagi Anak Korban Tindak Kekerasan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Kementerian Sosial RI. ISBN 978-602-8427-98-2.
- Widodo N. (2016). Rencana Tindak Lanjut dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Sosio Informa*. Vol 2 No 03.

PERMASALAHAN DAN PROSPEK PEJABAT FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL DI DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

PROBLEMS AND PROSPECTS OF SOCIAL WORKER IN SOCIAL OFFICE OF THE CENTRAL JAVA PROVINCE

Habibullah

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III Jakarta Timur
E-mail : habibullah@kemsos.go.id

Diterima: 15 Juli 2019, Direvisi: 15 Agustus 2019; Disetujui: 28 Agustus 2019

Abstrak

Pekerja sosial dalam konteks penelitian ini adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial pada instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya. Banyaknya pejabat fungsional di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tidak terlepas dari banyaknya Panti sosial sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan masalah dan prospek pejabat fungsional pekerja sosial fungsional di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan penempatan sebagian besar pejabat fungsional pekerja sosial di panti sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah tepat karena pejabat fungsional pekerja sosial dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilannya pada pemberian layanan langsung kepada penerima manfaat. Pejabat fungsional pekerja sosial terampil ditempatkan di panti sosial namun yang menjadi permasalahannya kualitas pejabat fungsional pekerja sosial terampil mengalami kejenuhan/monoton dalam tugas yang sama, sehingga etos kerja menurun. Program studi ilmu kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial. Tunjangan pejabat fungsional pekerja sosial sangat kecil dan tidak sebanding dengan resiko yang dihadapi. Saran dari penelitian ini memutasi pejabat fungsional pekerja sosial di Panti Sosial ke Panti Sosial lainnya. Kementerian Sosial RI perlu mengadvokasi dan mensosialisasikan pejabat fungsional pekerja sosial serta mengusulkan kenaikan tunjangan fungsional pekerja sosial.

Kata Kunci: *Pekerja sosial, aparatur sipil negara, kinerja.*

Abstract

Social workers are officials who are located as functional technical implementers who carry out social welfare service activities in government agencies and other social institutions/organizations. The number of functional officials in the Social Departement of Central Java Province is inseparable from the many social institutions as Regional Technical Implementation Units (UPTD) managed by the Social Departement of Central Java Province. The purpose of this study is to describe the problem and prospect of social workers functional official in the Social Departement of Central Java Province. The results showed that the most functional placement of social workers in social institutions owned by the Central Java Provincial Government was appropriate because functional social workers could implement their knowledge and skills in providing direct services to beneficiaries. Functionally skilled social workers were placed in social institutions but the problem was quality skilled social workers experience saturation/monotony in the same task, so the work ethic decreases. The qualification of education comes from social welfar social work study programs for functional formation of CPNSD social workers, often not complied with by the Regional Government. Functional allowances for social workers are very small and not worth the risk Based on the results of this study, it is recommended to reduce the functional saturation of social workers to mutate the functional positions of social workers at Social Institutions to other Social Institutions. The Ministry of

Keywords: *social worker, civil servant, performance.*

PENDAHULUAN

Pekerja sosial merupakan profesi utama dan paling berperan dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Di Indonesia secara garis besar dikenal dua jenis Pekerja Sosial, yaitu Pekerja Sosial yang diangkat dalam jabatan Fungsional Pekerja Sosial (Pejabat Fungsional Pekerja Sosial/JFPS), yang bekerja di instansi pemerintahan dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pekerja Sosial yang tidak diangkat dalam jabatan Fungsional Pekerja Sosial. Selain itu terdapat istilah pekerja sosial profesional yang menambah bingung masyarakat umum.

Pekerja sosial profesional ini dimaksudkan untuk membedakan dengan mereka yang bekerja dalam bidang pekerjaan sosial tapi bukan berasal dari lulusan pendidikan pekerjaan sosial. Hal ini tidak dapat dihindari karena dalam kenyataannya banyak bidang pekerjaan sosial yang digarap oleh mereka yang bukan berasal dari lulusan pendidikan pekerjaan sosial bahkan menyelenggarakan kegiatan pelayanan sosial lebih baik dibanding dengan pekerja sosial profesional. Pada saat penerimaan CPNS untuk formasi calon pekerja sosial fungsional bisa diisi oleh semua jurusan menimbulkan permasalahan lagi ketika akan diangkat menjadi pejabat fungsional pekerja sosial.

Pejabat fungsional pekerja sosial semestinya lebih berperan dalam pembangunan kesejahteraan di Indonesia. Namun kenyataannya pekerja sosial fungsional masih mempunyai permasalahan internal antara lain lemahnya penguasaan kompetensi pekerjaan sosial. Hal ini terjadi karena terbatasnya jumlah pekerja sosial profesional yang memiliki dasar keilmuan pekerjaan sosial yang memadai, sehingga

rekrutmen untuk pemenuhan kebutuhan tenaga pekerja sosial akhirnya bersifat longgar. Pendidikan dan pengalaman praktik di bidang kesejahteraan sosial seringkali diabaikan. Akibat lebih lanjut maka kinerja pekerja sosial menjadi lemah. Hasil telaahan Forum Pekerja Sosial Provinsi Jawa Timur (2008), menunjukkan beberapa kelemahan internal yang dialami oleh jabatan Fungsional Pekerja Sosial, sebagai berikut: (1) malas membuat/melaksanakan kewajiban administratif (membuat DUPAK), (2) mengalami kejenuhan/monoton dalam tugas yang sama, sehingga etos kerja menurun (sebagai gambaran, sudah ada yang bekerja di sebuah panti selama 20 tahun lebih), (3) kurang keberanian mencoba ranah/jenis layanan lain, sehingga pengetahuan dan pengalaman tidak berkembang, dan (4) sebagian jabatan fungsional pekerja sosial belum menguasai IT seperti komputer. Kondisi dimana para Peksos yang berstatus PNS justru mengerjakan pekerjaan administrasi pemerintahan saja (Astri, 2013).

Lemahnya kompetensi pekerja sosial fungsional disebabkan oleh rendahnya kompetensi PNS secara umum. Menurut Tamim dari 3,6 juta orang pegawai negeri sipil (PNS), yang betul-betul menjalankan tugas secara profesional dan menunjukkan produktivitas tinggi hanya sekitar 60-65 persen. Rendahnya kualitas SDM di lembaga pemerintah juga dapat diindikasikan dari kinerja PNS. Sebagaimana dikemukakan oleh Kasim (2007) bahwa dalam kenyataannya kompetensi dan produktivitas PNS masih rendah, dan perilaku yang sangat *rule driven*, paternalistik, dan kurang profesional (Megalia, & Syamsuddin, 2013).

Berdasarkan data dari Pusat Pengembangan

Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh sosial pada tahun 2018 terdapat 1. 262 pejabat fungsional pekerja sosial yang bekerja di Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota/Provinsi. Sebagian besar (510 pegawai) bekerja di Kementerian Sosial RI baik Kantor Pusat maupun di Unit Pelaksana Teknis. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah merupakan Instansi yang mempunyai pejabat fungsional pekerja sosial paling banyak setelah Kementerian Sosial RI. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 130 pejabat fungsional pekerja sosial.

Banyaknya pejabat fungsional di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tidak terlepas dari banyaknya Panti sosial sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Keberadaan UPTD di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sangat strategis karena berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan rehabilitasi sosial berbasis panti sosial merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

Oleh karena itu menjadi menarik untuk dilaksanakan penelitian mengenai masalah dan prospek pejabat fungsional pekerja sosial di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan masalah dan prospek pejabat fungsional pekerja sosial di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pengembangan pejabat pekerja sosial.

Pejabat fungsional pekerja sosial merupakan salah satu dari dua jabatan fungsional yang dibina oleh Kementerian Sosial RI. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/03/M-PAN/2004 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial, Pekerja sosial adalah pejabat fungsional yang berkedudukan

sebagai pelaksana teknis fungsional yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial pada instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Pekerjaan sosial adalah suatu profesi yang ditujukan untuk membantu orang, baik individual, kelompok dan atau masyarakat dalam memperbaiki atau meningkatkan kemampuannya untuk mencapai keberfungsian sosial secara penuh serta mengupayakan kondisi-kondisi kemasyarakatan tertentu yang menunjang pencapaian fungsi sosial.

Pelayanan kesejahteraan sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosialnya secara wajar. Pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial adalah berbagai kegiatan sistematis dalam rangka menghasilkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang lebih baik melalui pengkajian terhadap kebijakan sosial, pengembangan model pelayanan dan evaluasi terhadap program pelayanan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Undang-Undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan pekerja sosial *sebagai the primary profession*.

Namun, UU tersebut mengandung banyak kelemahan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diamanatkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial belum mengatur standar praktik pekerjaan sosial di Indonesia (Lestari, R. B., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M., 2015).

Pekerjaan sosial sebagai suatu profesi memiliki fungsi dan tugas pokok untuk memberikan pelayanan dalam rangka mencapai keberfungsian sosial orang melalui proses interaksi sosial (Zastrow, 2004). Untuk menjadi seorang Pekerja Sosial haruslah memiliki kompetensi profesional meliputi pengetahuan, ketrampilan dan nilai/sikap untuk melaksanakan praktek pekerjaan sosial melalui pendidikan dan pelatihan, agar calon Pekerja Sosial Fungsional tersebut mampu memenuhi tuntutan tugas.

Tugas pokok pekerja sosial adalah menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial. Bila kita bandingkan dengan kompetensi pekerjaan sosial yang harus dimiliki pekerja sosial, dimana seorang pekerja sosial harus memiliki: 1) Kerangka pengetahuan tentang klien, lingkungan sosial, dan profesi pekerjaan sosial professional, 2) Memahami elemen-elemen nilai dalam Praktek Pekerjaan Sosial 3) Penguasaan keterampilan pekerjaan sosial. Johnson dan Schwartz membagi keterampilan pekerja sosial menjadi 3 bagian yakni: 1). *Interpersonal helping skills*, 2) *Social work process skills*, 3) *Evaluation and accountability skills*. (Rahma, A. N., Nurwati, N., & Taftazani, B. M, 2015)

Pekerjaan sosial di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi tantangan dalam hal eksistensinya sebagai sebuah profesi. Pekerjaan sosial dituntut untuk mampu menunjukkan bentuk kiprah yang secara spesifik dapat dinilai

oleh masyarakat luas sebagai aktivitas yang dapat dibedakan dari profesi atau tenaga ahli lainnya secara signifikan. Aktivitas pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial (profesional) harus nampak secara nyata berbeda dengan pelayanan yang dilakukan oleh mereka yang bukan pekerja sosial. Pekerja sosial melakukan pekerjaannya dengan berdasarkan kepada pengetahuan (teori dan konsep) dengan menggunakan teknik-teknik (keterampilan) yang dikuasainya dan berlandaskan kepada nilai-nilai (etika) profesionalnya. Permasalahan mengenai eksistensi pekerjaan sosial di Indonesia tidak terlepas dari kenyataan yang ada bahwa pelaku-pelaku pelayanan kesejahteraan sosial tidak hanya mereka yang berpendidikan pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial melainkan juga mereka yang berlatar belakang pendidikan lainnya. Bahkan, mereka yang tidak berpendidikan tinggi pun dapat melakukannya ketika mereka perlu/ingin membantu orang lain; mereka sesungguhnya adalah para volunteer (Darwis, R. S., 2016).

Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah tidak dapat dipungkiri bahwa banyak diantara para TKS yang memiliki kemampuan praktik yang sangat baik sebagai hasil dari pengalaman penanganan klien selama ini seperti yang dilakukan oleh pekerja sosial, namun tidak dapat disertifikasi sebagai pekerja sosial karena latar belakang pendidikan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Keberadaan mereka tidak terlepas dari kebijakan mengenai pengadaan sumberdaya manusia untuk pelayanan kesejahteraan sosial yang diberlakukan oleh Kementerian Sosial dan lembaga pelayanan sosial milik masyarakat selama ini (Darwis, R. S., 2016).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka menjadi menarik untuk teliti mengenai permasalahan dan prospek pejabat fungsional pekerja sosial di Dinas Sosial Provinsi Jawa

Tengah. Pemilihan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah disebabkan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mempunyai Pejabat Fungsional Pekerja Sosial dan Panti sosial paling banyak.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan maksud agar peneliti fokus pada proses dan makna serta pemahaman yang didapat dari kata dan atau gambaran dengan menggunakan metode evaluasi dan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2013). Informan penelitian ditentukan secara *purposive* dengan pertimbangan bahwa informan terpilih memahami dan menjadi pejabat fungsional pekerja sosial di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Untuk mendapatkan data yang akurat maka pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi.

Adapun informan penelitian ini adalah:

1. Pejabat Struktural Dinas Sosial Provinsi
2. Pejabat Struktural Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Sosial Provinsi
3. Pelaksana UPTD Dinas Sosial Provinsi
4. Penerima layanan pejabat fungsional pekerja sosial
5. Penerima layanan pejabat fungsional penyuluh sosial

Analisis data penelitian ini menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil SDM Kesos

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kesejahteraan sosial di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah yang mencakup 25 kabupaten/kota. Selain wilayah kerjanya yang luas, Provinsi Jawa

Tengah terdapat 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan populasi yang relatif cukup besar dibanding dengan Provinsi lain. Dua kondisi faktual tersebut memerlukan dukungan SDM Kesos yang memadai, secara kuantitas maupun kualitas.

Pada saat pengumpulan data penelitian (Mei 2018), Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah didukung SDM Kesos berjumlah 799 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 403 orang laki-laki dan 396 orang perempuan. Kemudian, sebanyak 109 orang menduduki jabatan struktural, dan sebanyak 690 orang menduduki jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum. Dari pejabat fungsional tertentu tersebut, terdapat pekerja sosial sebanyak 120 orang, dan penyuluh sosial sebanyak 20 orang.

SDM Kesos yang berpendidikan tinggi cukup besar, yaitu D3 (5 persen), S1 (34 persen) dan S2 (9 persen) atau total 48 persen. Pendidikan SDM Kesos tersebut mencerminkan (sebagai salah satu indikator) kualitas SDM Kesos pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Sebaran pegawai Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebanyak 640 orang atau 80 persen SDM Kesos, ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Panti Sosial. Banyaknya pegawai yang ditempatkan di Panti sosial tersebut disebabkan banyaknya Panti Sosial pada Dinas Sosial yang tersebar di 27 unit di 20 kabupaten/kota. Panti sosial dengan urutan jumlah paling banyak adalah panti sosial anak (10 unit), panti sosial lanjut usia (9 unit), panti sosial disabilitas (5 unit) dan eks psikotik dan panti sosial GOT/lainnya (3 unit). Panti pelayanan sosial tersebut tentu memerlukan banyak SDM Kesos teknis, terutama pekerja sosial anak, lanjut usia, dan disabilitas/eks psikotik. Menurut sekretaris Dinas Sosial Provinsi “*Kami kekurangan pegawai untuk ditugaskan di panti karena pegawai yang akan purna tugas*”

Masalah Pejabat Fungsional Pekerja Sosial

Dari 799 pegawai Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebanyak 130 pegawai menduduki jabatan fungsional tertentu yaitu sebanyak 120 pejabat fungsional pekerja sosial dan 10 orang menduduki pejabat fungsional penyuluh sosial. Pejabat fungsional Pekerja Sosial terdiri dari pejabat fungsional ahli sebanyak 71 pegawai dan pejabat fungsional terampil sebanyak 51 pegawai.

Sebagian besar yaitu, sebanyak 51 pejabat fungsional pekerja sosial ahli bekerja pada Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan 20 pejabat fungsional pekerja sosial bekerja pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan jabatan jenjang pejabat fungsional pekerja sosial paling banyak 1 menduduki pejabat pekerja sosial muda sebanyak 39 pegawai, pejabat pekerja sosial madya sebanyak 17 pegawai dan pejabat fungsional pekerja sosial pertama sebanyak 15 pegawai.

Pejabat fungsional pekerja sosial tingkat terampil adalah pekerja sosial yang mempunyai kualifikasi teknik yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan teknis dan prosedur kerja di bidang pelayanan kesejahteraan sosial. Jenjang jabatan pekerja sosial tingkat terampil dari yang terendah sampai dengan tertinggi adalah pekerja sosial pelaksana pemula, pekerja sosial pelaksana, pekerja sosial pelaksana lanjutan dan pekerja sosial penyelia.

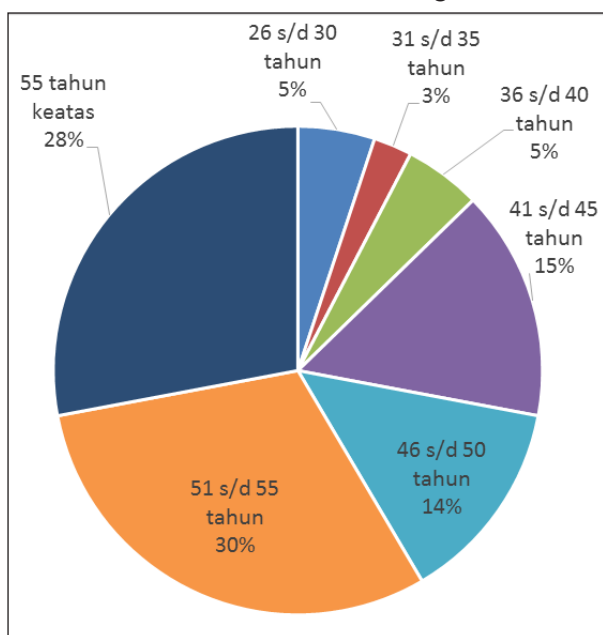
Sebanyak 52 pegawai sebagai pejabat fungsional pekerja sosial terampil, keseluruhannya bekerja di Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Dari 52 pejabat fungsional pekerja sosial terampil sebanyak 1 pegawai menduduki jabatan pekerja sosial pelaksana, 14 pekerja sosial pelaksana lanjutan dan 37 pekerja sosial penyelia.

Pejabat fungsional pekerja sosial tingkat ahli adalah pekerja sosial yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis di bidang pelayanan kesejahteraan sosial. Pekerja sosial tingkat ahli di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagian besar belum memenuhi kualifikasi profesional. Jenjang jabatan pekerja sosial tingkat ahli dari yang terendah sampai dengan tertinggi adalah pekerja sosial pertama, pekerja sosial muda dan pekerja sosial madya. Sebanyak 68 pegawai menduduki jabatan pekerja sosial tingkat ahli, 20 pekerja sosial ahli bekerja di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan sedangkan 40 pekerja sosial ahli bekerja di Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Apabila dilihat dari komposisi jenjang jabatan sebagian besar pejabat fungsional pekerja sosial ahli pada jenjang pekerja sosial muda baik yang bekerja di Kantor maupun di Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Menumpuknya pejabat fungsional pekerja sosial pada jenjang muda disebabkan adanya kebijakan dan terbatasnya formasi untuk jenjang berikutnya yaitu jabatan fungsional pekerja sosial madya. Pada Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah hanya ada 1 formasi untuk pejabat fungsional pekerja sosial madya dan jika ada lebih dari 1 pejabat fungsional pekerja sosial madya maka pejabat fungsional pekerja sosial madya tersebut harus mutasi ke Panti Sosial lain. “*1 Panti sosial hanya boleh ada 1 pekerja sosial madya, jika lebih maka harus dimutasi ke Panti Sosial lain*” (Koordinator Peksos Dinsos Jateng”).

Dengan adanya kebijakan ini maka seorang pejabat fungsional pekerja sosial muda tidak bisa naik ke jenjang jabatan fungsional pekerja sosial madya jika formasi untuk pekerja sosial madya

Diagram 1. Usia Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Dinsos Provinsi Jateng 2018.



Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2018

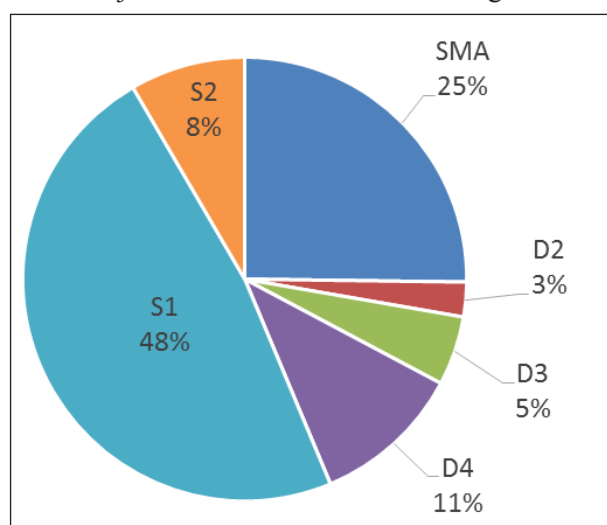
sudah terisi. Sedangkan jika akan dimutasi ke Panti Sosial lain maka pegawai tersebut harus menanggung konsekuensi jauh dari tempat tinggal saat ini yang tentunya mempunyai berbagai dampak bagi pegawai itu sendiri.

Apabila dilihat dari usia, sebagian besar pejabat fungsional pekerja sosial tersebut pada usia menjelang pensiun dan regenerasi fungsional pekerja sosial di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah masih sangat terbatas. Berdasarkan Diagram 2 sebanyak 28 persen pejabat fungsional pekerja sosial berusia 55 tahun keatas dan 30 persen berusia 51-55 tahun sedangkan pejabat fungsional Pekerja sosial berusia 26-30 tahun hanya 5 persen dan usia 31-35 tahun hanya 3 persen. Sebagian besar pejabat fungsional pekerja sosial sudah berusia 50 tahun ke atas dan dua–tiga tahun ke depan banyak yang memasuki usia pensiun. Sementara itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah menghadapi kesulitan untuk pengadaan pegawai dikarenakan ketatnya peraturan yang terkait dengan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD).

Pejabat fungsional pekerja sosial pada jenjang awal dari pekerja sosial yaitu pejabat fungsional pekerja sosial pertama untuk ahli dan pelaksana untuk pejabat fungsional pekerja sosial terampil, pada jenjang ahli hanya 15 orang pejabat fungsional pekerja sosial ahli pertama dan hanya 1 pejabat fungsional pekerja sosial pelaksana untuk jenjang terampil. Semestinya formasi pejabat fungsional pekerja sosial berbentuk piramid yaitu semakin rendah jenjang kepangkatan semakin banyak dan semakin tinggi jenjang kepangkatan semakin sedikit pemangku jabatan fungsional pekerja sosial.

Latar belakang pendidikan merupakan salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan fungsional pekerja sosial. Pendidikan minimal S1/D4 merupakan syarat utama apabila akan menempuh jenjang pekerja sosial ahli. Syarat berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S-1)/ Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Menteri Sosial selaku pimpinan instansi pembina jabatan pekerja sosial. Berdasarkan diagram 4 sebagian besar pekerja sosial fungsional di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah berpendidikan S1 (48 persen), D4 (11 persen) dan S2 (8 persen).

Diagram 2. Pendidikan Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Dinsos Provinsi Jateng 2018.



Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2018

Meskipun sebagian besar berpendidikan S1/D4 namun hanya sebagian kecil (26 persen) latar belakang pendidikannya berasal dari program studi pekerja sosial atau kesejahteraan sosial. Latar belakang bukan berasal dari program studi Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial sebenarnya tidak terlalu menyulitkan pekerja sosial tersebut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pekerja sosial. Hal tersebut disebabkan pekerja sosial yang tidak berlatar belakang pendidikan kesejahteraan sosial dan pekerja sosial mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pekerja sosial melalui pendidikan dasar pekerja sosial yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial. Namun yang menyulitkan bagi pekerja sosial fungsional dengan tidak berlatar belakang pekerja sosial/kesejahteraan sosial adalah aturan/kebijakan yang diskriminatif bagi pekerja sosial yang tidak berlatar belakang pendidikan pekerja sosial/kesejahteraan sosial untuk upaya peningkatan jenjang karir dan kompetensi. Hal tersebut misalnya pada kegiatan sertifikasi pekerja sosial profesional.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka diberikan tunjangan perbaikan penghasilan Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

Besaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Untuk PNS asli

1. Jabatan Pimpinan Tertinggi Madya Sekda Rp 25 juta
2. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Asisten Sekda Rp 20 juta, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (selain Asisten Sekda) Rp 15 juta

3. Pejabat dengan Penugasan Khusus Gubernur Rp 15 juta
4. Administrator Rp 10 juta
5. Pengawas Rp 7,25 juta
6. Fungsional dan Pelaksana Golongan IV Rp 6,3 juta
7. Fungsional dan Pelaksana Golongan III Rp 5,25 juta
8. Fungsional dan Pelaksana Golongan II Rp 3,5 juta
9. Fungsional dan Pelaksana Golongan I Rp 3 juta.

Untuk PNS Peralihan

1. Fungsional dan Pelaksana Golongan IV Rp 3 juta
2. Fungsional dan Pelaksana Golongan III Rp 2,75 juta
3. Fungsional dan Pelaksana Golongan II Rp 2,5 juta
4. Fungsional dan Pelaksana Golongan I Rp 2 juta

Berdasarkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Provinsi Jawa Tengah maka tunjangan fungsional disamakan dengan Tunjangan Pelaksana/Staf pada golongan yang sama sehingga kurang memotivasi pegawai untuk beralih menjadi pejabat fungsional. Di Kementerian Sosial RI tunjangan kinerja yang diterima oleh pejabat fungsional ahli tingkat pertama lebih tinggi dibanding dengan pelaksana golongan III/a bahkan untuk pejabat fungsional ahli tingkat muda (III/C) setara dengan tunjangan kinerja pengawas (eselon IV).

Fungsional pekerja sosial di Provinsi Jawa Tengah apabila dilihat dari besaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) kurang memotivasi pegawai untuk beralih menjadi

fungsional pekerja sosial. Motivasi pegawai untuk beralih menjadi fungsional pekerja sosial hanya untuk memperpanjang masa kerja karena jika sudah menjabat sebagai fungsional pekerja sosial madya sesuai dengan peraturan bisa pensiun di usia 60 tahun sedangkan jika hanya pelaksana atau eselon III dan eselon IV pensiun di usia 58 tahun.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial adalah sebagai berikut:

1. Pekerja sosial ahli madya: Rp. 790.000,-
2. Pekerja sosial ahli muda: Rp. 550.000,-
3. Pekerja sosial ahli pertama: Rp. 300.000,-
4. Pekerja sosial terampil penyelia: Rp. 525.000,-
5. Pekerja sosial terampil pelaksana lanjutan: Rp. 275.000,-
6. Pekerja sosial terampil pelaksana: Rp. 240.000,-
7. Pekerja sosial terampil pemula: Rp. 220.000,-

Menurut hasil FGD di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah ternyata tunjangan fungsional pekerja sosial merupakan tunjangan fungsional paling rendah di rumpun sosial. Hal tersebut mendorong peserta mengusulkan untuk kenaikan tunjangan fungsional pekerja sosial. Rendahnya tunjangan tersebut tidak sebanding dengan risiko yang sangat tinggi ketika berhadapan dengan penerima manfaat. Hal inilah yang menjadi alasan fungsional pekerja sosial untuk ‘melepaskan’ jabatan fungsional mereka.

Prospek Pejabat Fungsional Pekerja Sosial

Pejabat fungsional pekerja sosial melaksanakan beberapa tugas dan berperan sangat penting dalam melaksanakan rangkaian

proses rehabilitasi yang meliputi bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan. Beberapa peran yang terdapat dalam pelaksanaan bimbingan oleh pekerja sosial antara lain: sebagai assesor, perencana, motivator, informan, dan evaluator dalam semua kegiatan bimbingan baik bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan.

Pekerja sosial berperan sebagai manager kasus dalam kegiatan bimbingan mental dan sosial yaitu melaksanakan dan mengupayakan pencatatan dan pelaporan, mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pelayanan dan monitoring dalam rangka kelancaran proses pelayanan kesejahteraan sosial. Peran pekerja sosial sebagai mediator dan negosiator terdapat pada pelaksanaan bimbingan keterampilan kerja yaitu menjadi penghubung atau mediasi antara lembaga dengan profesi yang terkait dengan wali/ keluarga dan masyarakat (Yuwan, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan rehabilitasi sosial berbasis panti sosial merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Peranan fungsional pekerja sosial di panti sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi sangat strategis dan merupakan tenaga inti pelayanan di Panti sosial. Apabila dibandingkan dengan provinsi lain Panti Sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah paling banyak apabila dibanding dengan provinsi lain yaitu sebanyak 27 panti sosial. Dengan banyaknya jumlah panti sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka peluang makin besarnya formasi jabatan fungsional pekerja sosial. Demikian juga sebaliknya dengan banyaknya jumlah pejabat fungsional pekerja sosial di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah maka Panti Sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap dipertahankan tidak

digabung karena kekurangan pegawai khusus pejabat fungsional pekerja sosial.

Kekurangan pejabat fungsional pekerja sosial di Panti Sosial tersebut merupakan prospek bagi ASN di Provinsi Jawa Tengah untuk beralih menjadi pejabat fungsional pekerja sosial. Ada berbagai keuntungan yang akan diterima oleh ASN menjadi pejabat fungsional pekerja sosial yaitu jika ASN dengan jabatan administrator, supervisor dan pelaksana/staf batas usia pensiunnya 58 tahun namun ketika menjadi pejabat fungsional pekerja sosial ahli madya maka pegawai tersebut maka batas usia pensiunnya bisa menjadi 60 tahun.

Pejabat fungsional pekerja sosial terampil semestinya dapat lebih berperan pada Panti Sosial dengan memberikan pelayanan langsung yang saat ini masih dilaksanakan oleh profesi lain seperti instruktur dan perawat. Oleh karena itu diperlukan rekrutmen pejabat fungsional pekerja sosial tingkat terampil yang baru. Pejabat fungsional pekerja sosial tingkat terampil yang baru ini berasal dari rekrutmen CPNSD SMK jurusan pekerja sosial.

Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pejabat fungsional pekerja sosial sebagian besar ditempatkan di Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Penempatan pejabat fungsional pekerja sosial di Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sudah tepat karena Panti Sosial Dinas Sosial tersebut merupakan pelayanan langsung kepada penerima manfaat. Dengan demikian pejabat fungsional pekerja sosial dapat melaksanakan pelayanan langsung kepada penerima manfaat sehingga pekerja sosial dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkatnya.

Akan tetapi penempatan pejabat fungsional pekerja sosial di Panti Sosial Dinas Sosial

Provinsi Jawa Tengah tidak serta merta mempercepat proses kenaikan pangkat dan karier pejabat fungsional pekerja sosial. Pejabat fungsional pekerja sosial ahli di Dinas Sosial Provinsi menumpuk pada jenjang pejabat fungsional pekerja sosial muda, hal ini disebabkan sulitnya pejabat pekerja sosial muda untuk naik ke jenjang pekerja sosial madya. Pekerja sosial muda mengalami hambatan untuk naik ke jenjang pekerja sosial madya dikarenakan terbatasnya formasi untuk pekerja sosial madya pada Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi yang dibatasi 1 Panti Sosial hanya 1 pekerja sosial madya. Selain itu secara internal pekerja sosial muda mengalami kesulitan untuk mengumpulkan angka kredit yang disebabkan bukan karena tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagai pejabat fungsional pekerja sosial akan tetapi disebabkan butir-butir angka kredit penilaian pejabat fungsional pekerja sosial sebagai bukti angka kreditnya berupa laporan dan pekerja sosial seringkali tidak membuat laporan setelah menjalankan pelayanan sosial langsung. Hasil penelitian ini hampir sama dengan hasil penelitian yang dilakukan Forum Pekerja Sosial Provinsi Jawa Timur (2008) yang menunjukkan bahwa jabatan Fungsional Pekerja Sosial malas membuat/melaksanakan kewajiban administratif (membuat DUPAK).

Seluruh fungsional pekerja sosial terampil bekerja di Panti Sosial, penempatan fungsional pekerja sosial terampil sudah tepat karena pekerja sosial terampil tersebut dapat memberikan pelayanan sosial langsung ke penerima manfaat. Namun yang menjadi permasalahannya kualitas pekerja sosial terampil mengalami kejenuhan/monoton dalam tugas yang sama, sehingga etos kerja menurun. Sebagai gambaran, sudah ada yang bekerja di sebuah panti selama 20 tahun lebih dan kurang keberanian mencoba ranah/jenis layanan lain, sehingga pengetahuan dan pengalaman tidak berkembang. Oleh karena itu

diperlukan mutasi bagi fungsional pekerja sosial untuk mengurangi kejenuhan dan monotonnya pekerjaan. Selain itu tidak ada regenerasi pejabat fungsional pekerja sosial khususnya pejabat fungsional pekerja sosial terampil sehingga tugas dan fungsi pekerja sosial terampil ini diambil oleh pegawai non fungsional pekerja sosial bahkan oleh tenaga honorer.

Persyaratan berijazah Sarjana/Diploma IV dengan kualifikasi ditentukan oleh Menteri Sosial RI untuk menjabat sebagai pejabat fungsional pekerja sosial. Kualifikasi pendidikan berasal dari program studi ilmu kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial untuk formasi CPNSD pejabat fungsional pekerja sosial, seringkali tidak dipatuhi oleh Pemerintah Daerah sehingga seringkali formasi CPNSD di isi oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan Non kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial. Pada penentuan formasi CPNSD yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah mengacu pada pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta pemahaman dan pengetahuan pejabat pembina kepegawaian. Oleh karena itu Kementerian Sosial RI mestinya mengadvokasi dan mensosialisasikan bahwa jabatan fungsional pekerja sosial hanya bisa dijabat oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial.

Tambahan penghasilan merupakan salah satu motivasi pegawai untuk memangku jabatan tertentu. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial maka penghasilan tambahan yang diterima oleh pejabat fungsional pekerja sosial sangat kecil. Tidak sebanding dengan risiko yang dihadapi khususnya bagi yang melaksanakan pelayanan langsung kepada penerima manfaat di Panti

sosial. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian kembali besaran tunjangan fungsional pekerja sosial.

KESIMPULAN

Secara umum penempatan sebagian besar pejabat fungsional pekerja sosial di panti sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah tepat karena pejabat fungsional pekerja sosial dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilannya pada pemberian layanan langsung kepada penerima manfaat. Apalagi kewenangan pelayanan berbasis panti sosial menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Fungsional pekerja sosial terampil ditempatkan di panti sosial sudah tepat namun yang menjadi permasalahannya kualitas pekerja sosial terampil mengalami kejenuhan/monoton dalam tugas yang sama, sehingga etos kerja menurun.

Kualifikasi pendidikan berasal dari program studi ilmu kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial untuk formasi CPNSD fungsional pekerja sosial, seringkali tidak dipatuhi oleh Pemerintah Daerah. Tunjangan jabatan fungsional pekerja sosial maka penghasilan tambahan yang diterima oleh fungsional pekerja sosial sangat kecil dan tidak sebanding dengan risiko yang dihadapi.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini maka disarankan pejabat fungsional pekerja sosial lebih banyak ditempatkan di Panti Sosial, namun untuk mengurangi kejenuhan pejabat fungsional pekerja sosial perlu untuk memutasi jabatan fungsional pekerja sosial di Panti Sosial ke Panti Sosial lainnya. Kementerian Sosial RI perlu mengadvokasi dan mensosialisasikan jabatan fungsional pekerja sosial serta mengusulkan kenaikan tunjangan fungsional pekerja sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada Drs. Suradi, M.Si Peneliti Utama Puslitbangkesos yang merupakan rekan ketika pengumpulan data penelitian Efektivitas SDM Kesos di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Sub bagian Kepegawaian serta koordinator Pejabat fungsional Pekerja Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang mendukung pelaksanaan pengumpulan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Astri, H. (2013). Pengaturan Praktik Pekerja Sosial Profesional Di Indonesia. *Jurnal Aspirasi*, 4(2), 155-163.
- Darwis, R. S. (2016). Sertifikasi Menegaskan Eksistensi Pekerja Sosial Di Indonesia. *SHARE: Social Work Journal*, 6(1).
- Fahrudin, A. (2013). *Social welfare and social work in Indonesia*. Dalam Furuto, S.B.C.L, Social welfare in East Asia and the Pacific. New York: Columbia University Press
- Forum Pekerja Sosial Provinsi Jawa Timur, (2008). *Telaah Fungsional Pekerja Sosial di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur* <http://peksosjatim.blogspot.com/2011/10/telaah-fps-jatim.html> diakses tanggal 15 Juli 2019
- Kasim, A. (2007). Strategi Reformasi Kepegawaian Negeri Sipil, Diskusi Panel tentang *Perencanaan Strategis Kepegawaian Nasional dalam Manajemen PNS*, Tanggal 23 Mei 2007 Jakarta
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (2004). Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/03/M-PAN/2004 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial. Jakarta.
- Lestari, R. B., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2015). The Primary Profession of Social Worker: Eksistensi Pekerja Sosial Sebagai Suatu Profesi. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2).
- Megalia, R & Syamsudddin, AB (2013). Manajemen Peningkatan Kompetensi Aparatur (Studi tentang Implementasi Kebijakan Reformasi Sumber Daya Kediklatan pada Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri RI). *Jurnal Adminisistrasi Pendidikan* 17 (1)
- Ocktilia, H. (2013). Pekerja Sosial Fungsional: Kompetensi dan Permasalahannya (Suatu Telaahan Tentang Kinerja Pekerja dSosial Fungsional dalam Melaksanakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* 12 (2)
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2017). Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Semarang.
- Rahma, A. N., Nurwati, N., & Taftazani, B. M. (2015). Eksistensi Pekerja Sosial di Indonesia, Malaysia dan Amerika Serikat. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2).
- Republik Indonesia. (2007). Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan

Sosial menyebutkan pekerja sosial.
Jakarta.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang
No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah. Jakarta.

Ro'fah, dkk (2014). *Pribumisasi Pekerjaan
Sosial: Sebuah Upaya Dekolonialisasi
Teori dan Praktek Pekerjaan Sosial*
Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian
Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.

Yuwan, FS (2013). Peran Pekerja Sosial
Dalam Peningkatan Kualitas Hidup
Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial
Mardi Utomo Semarang. *Journal of
Non Formal Education and Community
Empowerment*, 2 (2)

Zastrow, C. (2009). *Introduction to social work
and social welfare: Empowering people*.
Cengage Learning.

KARANG TARUNA, AGEN PERUBAHAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI PANDEGLANG

KARANG TARUNA, AGENT OF CHANGE AND COMMUNITY DEVELOPMENT IN PANDEGLANG

Suradi

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial – Kementerian Sosial RI
Jln. Dewi Sartika No 200 Cawang III, Jakarta Timur
E-mail: mas.soeradi@yahoo.co.id

diterima: 1 Maret 2019, Direvisi: 28 Mei 2019; Disetujui: 15 Juli 2019

Abstrak

Peran pemuda sangat penting sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat. Karang Taruna yang tumbuh di desa/kelurahan, merupakan wahana bagi pemuda untuk memperlihatkan berbagai peran mereka. Karang Taruna hadir dalam upaya memenuhi harapan masyarakat untuk menanggulangi permasalahan sosial, khususnya permasalahan yang terjadi pada pemuda. Karena peran strategisnya itu, maka Kementerian Sosial RI menempatkan Karang Taruna sebagai salah satu pilar sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan peran Karang Taruna Sukajadi sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat. Data dan informasi dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan pengurus Karang Taruna, tokoh masyarakat, aparat desa, instansi pemerintah dan penerima layanan. Hasil penelitian, bahwa Karang Taruna Sukajadi telah melaksanakan berbagai peran sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat, dengan melaksanakan kegiatan di bidang sosial, seperti: bantuan pendidikan anak yatim, bantuan kebutuhan pokok bagi orang miskin, dan perbaikan rumah bagi keluarga miskin, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pembinaan preman jalanan, pelestarian budaya melalui peletarian kesenian lokal. Kemudian di bidang ekonomi, bekerja sama dengan sebuah cafe untuk pemasaran kopi bakar. Meskipun demikian, berbagai peran tersebut masih perlu dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas anggota Karang Taruna.

Kata kunci: karang taruna, agen perubahan, pengembangan masyarakat.

Abstract

The role of youth is very important as an agent of change in community development. Karang Taruna that grows in the village / kelurahan, is a vehicle for young people to showcase their various roles. Karang Taruna on the basis of its social volunteerism helps the community to overcome social problems, especially problems for youth. Based on this strategic role, the Ministry of Social Affairs places it as a social pillar in the social welfare development. This research was conducted to describe the role of Karang Taruna Sukajadi as agents of change in community development. Data and information were collected through documentation studies and interviews with Karang Taruna officials, community leaders, village officials, government agencies and service recipients. The results of the research that Karang Taruna Sukajadi has carried out various roles as agents of change in community development, by carrying out activities in the social field, such as: education assistance for orphans, basic needs for the poor, and home improvement for poor families, prevention of drug abuse and fostering street thugs, preserving culture through the launch of local art. Then in the economic field, working with a cafe for roasted coffee marketing. Nevertheless, these various roles still need to be optimized through capacity building for members of the Karang Taruna.

Keywords: karang taruna, agent of change, community development.

PENDAHULUAN

Pemuda adalah masa depan suatu bangsa di manapun berada. Sejarah mencatat, bahwa pemuda berada pada garis terdepan dalam mengusir kolonial dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia (Widodo, tt; Wijaya, 2013). Peran strategis pemuda ini juga ditemukan di banyak negara, di mana mereka berperan nyata di berbagai sektor pembangunan nasional hingga komunitas lokal (lihat Cornwall, 2010; Forno & Boren, 2017; Udensi, Daasi, Domale & Zukbee, 2013; Mandara 2004). Kegiatan yang dilakukan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan menjadi komplementaritas pelayanan yang disediakan oleh negara (lihat Pitmann, 1991; Masselli, 2018; Valeeva & Rymbakova, 2013). Hal ini menjelaskan, bahwa pemuda menduduki posisi penting dalam menentukan arah, hasil dan kesinambungan pembangunan.

Di Indonesia, semangat dan daya juang kaum pemuda terus bertumbuh dan menguat hingga zaman kemerdekaan. Salah satu wujud dari semangat dan daya juang pemuda untuk mengisi kemerdekaan itu adalah lahirnya Karang Taruna. Secara historis, Karang Taruna lahir dari sekelompok anak muda di Kampung Melayu Jakarta Timur tahun 70-an, dimasukkan untuk menggalang potensi pemuda dalam mengisi kemerdekaan. Kementerian Sosial RI memberikan fasilitasi, dan kemudian menempatkan sebagai instansi pembina fungsional (Kemensos RI, 2013).

Hadirnya Karang Taruna yang tersebar di setiap desa/kelurahan di Indonesia, meneguhkan bahwa dalam sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial, memerlukan partisipasi kaum muda dimulai dari akar rumput. Sehubungan dengan itu, Kementerian Sosial RI menempatkan Karang Taruna sebagai salah satu pilar sosial dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial bersama-sama dengan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas).

Karang Taruna sebagai organisasi sosial kemasyarakatan di tingkat desa/kelurahan, menjadi sistem sumber bagi pemuda dan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Berbagai peran di masyarakat dilakukan Karang Taruna dengan dasar kesukarelaan (lihat Baharuddin, 2014; Sudirman, 2017; Hidayatullah, 2017). Mencermati berbagai peran Karang Taruna di masyarakat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Karang Taruna telah melaksanakan peran sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat (lihat Malau, 2017).

Agen perubahan menurut Lunenburg (2010), *is anyone who has the skill and power to stimulate, facilitate, and coordinate the change effort*. Lunenburg (2010) berpendapat, bahwa agen perubahan itu bisa individu, kelompok, dan organisasi, yang memiliki keterampilan dan kekuatan untuk menstimulasi, memfasilitasi, dan mengoordinasikan upaya perubahan. Kemudian menurut Anwar (2013), bahwa penghubung antara sumber ide perubahan dengan target masyarakat yang diharapkan mengadopsi ide atau teknologi yang ditawarkan oleh produser “ide dan teknologi”. Elemen penghubung termaksud disebut sebagai “agen perubahan / *agent of change*”.

Dikemukakan oleh Chouhan (2014), bahwa pemuda (Karang Taruna) bersama-sama dengan pekerja masyarakat berkomitmen, membantu masyarakat mengatasi praktik opresif, menangani ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Mereka bertindak sebagai agen perubahan sosial, dan karenanya berusaha untuk memberdayakan orang-orang di sekitar

mereka. Ditambahkan oleh Putman (Evans & Prilleltensky, ny), bahwa keterlibatan kaum muda tersebut setara dengan pengeluaran untuk membayar modal social (*social capital*).

Bersandar pada pendapat Chouhan (2014), bahwa Karang Taruna terlibat langsung dalam pemberdayaan masyarakat, di mana pemberdayaan sebagai metode dalam pengembangan masyarakat. Hal ini menegaskan, bahwa Karang Taruna adalah agen perubahan dalam pengembangan masyarakat. Berkaitan dengan konsepsi pengembangan masyarakat, dikemukakan oleh Flora dan Arnold (2012) : “*community development is the process of increasing quality of life, ecosystem health, and economic security for all residents of a geographic area*”. Pengembangan masyarakat merupakan proses untuk meningkatkan kualitas hidup, kesehatan ekosistem, dan keamanan ekonomi bagi semua orang di wilayah geografis. Ditambahkan oleh Barr (2014), pengembangan masyarakat yang sukses apabila didukung keterampilan dan pengetahuan yang dikembangkan oleh orang-orang dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, peran agen perubahan (read Karang Taruna) tidak boleh mematikan sikap kritis masyarakat, dan justru mengelola sikap kritis tersebut untuk mencapai perubahan.

Keberadaan Karang Taruna di Indonesia secara yuridis berlandaskan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos) Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna. Di dalam Permensos tersebut dijelaskan pengertian Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat, yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau

nama lain yang sejenis terutama bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kemudian, pengertian anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut warga Karang Taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang berada di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis (lihat Kemensos RI, 2013).

Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan dengan beranggotakan pemuda, dan lahir atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial, dan bergerak di bidang kesejahteraan sosial (lihat Kemensos RI, 2013). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka fungsi dan tugas Karang Taruna sebagai bagian tidak terpisahkan dari fungsi dan tugas Kementerian Sosial; atau dapat dikatakan Karang Taruna sebagai komplementaritas Kementerian Sosial. Karang Taruna akan membantu menemukan solusi atas problema, dan memfasilitasi pemuda dan masyarakat untuk mengakses sistem sumber guna pengembangan potensi dan sumber daya (lihat Lestari, 2016; Kawalod, 2015; Sawitri, 2014; Ramadhan, 2013; Ashari, 2010).

Mencermati posisi strategis Karang Taruna di tingkat desa/kelurahan, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang Karang Taruna. Penelitian tentang Karang Taruna sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Meskipun demikian, penelitian di Kabupaten Pandeglang yang mendeskripsikan tentang Karang Taruna sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat, sepengetahuan peneliti masih sangat terbatas. Hal ini yang mendorong peneliti untuk menetapkan Kabupaten Pandeglang sebagai lokasi penelitian, dalam upaya menjelaskan peran Karang Taruna sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat.

METODE

Penelitian tentang Karang Taruna, Agen Perubahan dan Pengembangan Masyarakat di Desa Sukajadi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan (1) ketersediaan data, di mana Karang Taruna Sukajadi termasuk kategori maju, (2) dukungan dari instansi sosial terkait, dan (3) ketersediaan sumber daya. Karang Taruna, tokoh masyarakat, aparat desa, instansi pemerintah dan penerima program menjadi informan dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, dan wawancara mendalam. Selanjutnya, untuk memperoleh deskripsi yang komprehensif tentang peran Karang Taruna sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat, digunakan analisis kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan: reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis dalam bentuk uraian atau deskripsi yang menjelaskan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Karang Taruna

Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis terutama bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pengertian tersebut menegaskan, bahwa Karang Taruna tidak memasuki area bisnis maupun politik. Ia ada untuk memenuhi harapan masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah yang dihadapi. Visi dan misi yang diemban Karang Taruna adalah pelayanan

kemanusiaan yang dilakukan secara suka rela, dan karena itu nilai dasar yang mendasari aktivitasnya adalah kerelawanan sosial (lihat Kemensos, 2013).

1. Nama Karang Taruna

Karang Taruna diberinama “Karang Taruna Sukajadi”. Nama “Sukajadi” diambil dari nama desa domisili Karang Taruna, yaitu Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang.

2. Sejarah

Karang Taruna Sukajadi dibentuk melalui musyawarah warga / pemuda Desa Sukajadi, pada tahun 2009. Terbentuknya Karang Taruna Sukajadi ini dimotivasi oleh permasalahan sosial yang ada di desa tersebut, seperti kemiskinan, anak telantar, lanjut usia telantar/jompo, disabilitas dan pengangguran. Di sisi yang lain, di desa tersebut tersedia sumber daya manusia, terutama pemuda – yang memiliki potensi dan kepedulian terhadap permasalahan di lingkungannya. Selain itu besarnya dukungan dari aparat desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama, menambah energi bagi para pemuda untuk mengorganisasikan diri di bidang sosial kemasyarakatan.

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 telah terjadi tiga kali pergantian kepengurusan. Pergantian kepengurusan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 23 Tahun 2013, khususnya yang mengatur tentang masa jabatan kepengurusan Karang Taruna. Di dalam peraturan tersebut, masa jabatan pengurus Karang Taruna selama 3 (tiga) tahun. Periode I tahun 2009 – 2012, ketua Usep; Periode II tahun 2013 – 2015, ketua A. Sobari dan Periode III tahun 2016– 2018, ketua Alik Wahyudi. Pergantian kepengurusan Karang Taruna Sukajadi ini dimaksudkan untuk regenerasi.

3. Status dan Legalitas

Karang Taruna Sukajadi merupakan organisasi sosial kemasyarakatan di wilayah desa/kelurahan dan sebutan lain. Karang Taruna Sukajadi merupakan organisasi sosial bagi pemuda Desa Sukajadi dengan batas usia 13 sampai dengan 45 tahun. Sebagai wadah aktivitas pemuda, Karang Taruna Sukajadi merupakan organisasi yang bersifat relawan dan tidak berafiliasi dengan organisasi politik, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan.

Keberadaan Karang Taruna Sukajadi dimaksudkan untuk menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial di wilayah Desa Sukajadi, terutama menanggulangi masalah sosial pemuda. Oleh karena itu, Karang Taruna Sukajadi bersifat otonom dalam mengelola rumah tangganya. Meskipun demikian, untuk optimalisasi program dan kegiatan, Karang Taruna Sukajadi membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Legalitas Karang Taruna Sukajadi diperoleh dari Kepala Desa Sukajadi. Terakhir dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sukajadi Nomor 141/010-Kep.ds2011/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015.

4. Struktur Organisasi

Karang Taruna Sukajadi memiliki struktur organisasi yang cukup “gemuk”, yang meliputi: ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang. Terdapat 7 (tujuh) bidang, yaitu: pendidikan dan pelatihan; usaha kesejahteraan sosial, kelompok usaha bersama, kerohanian dan pembinaan mental; olah raga dan seni budaya; lingkungan hidup dan kerjasama dan kemitraan.

Di luar struktur organisasi inti tersebut, terdapat pembina umum dari aparat desa, dan majelis pembinaan Karang Taruna dari unsur tokoh masyarakat. Selanjutnya, di lingkungan RW dibentuk juga Karang

Taruna Unit RW 01 – 05, atau masih 4 (empat) RW lagi yang sedang dipersiapkan membentuk Karang Taruna Unit RW. Karang Taruna Sukajadi telah melembaga sampai ke tingkat akar rumput.

5. Keanggotaan

Karang Taruna menganut keanggotaan yang bersifat *stelsel pasif*. Artinya, semua pemuda di Desa Sukajadi yang berusia 13 – 45 tahun, otomatis menjadi anggota Karang Taruna Sukajadi (lihat Permensos No 23 Tahun 2013). Berdasarkan data kependudukan Desa Sukajadi, penduduk berusia 13 – 45 berjumlah 362 orang. Kemudian berdasarkan data pada Karang Taruna Sukajadi, pemuda yang aktif di Karang Taruna saat ini berjumlah 65 orang atau 17,96 persen.

Program Kerja dan Hasil Kegiatan Karang Taruna

Karang Taruna Sukajadi sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesejahteraan Sosial

Karang Taruna Sukajadi melaksanakan kegiatan yang termasuk bidang kesejahteraan sosial, seperti: bedah rumah keluarga miskin, memberikan bantuan pendidikan kepada anak telantar (yatim/piatu), bantuan pangan (sembako) bagi lanjut usia/jompo dan mengembangkan usaha ekonomis produktif bagi pemuda yang masih menganggur.

Pada kegiatan bedah rumah, peran Karang Taruna Sukajadi sebagai *facilitator* dan atau *motivator* agar warga masyarakat berpartisipasi. Karang Taruna melakukan kegiatan awal dengan mengidentifikasi rumah-rumah warga yang memenuhi kriteria tidak layak huni. Kemudian data rumah

tidak layak huni tersebut dibawa ke rapat desa. Kepala Desa Sukajadi memberikan respon positif dan mendukung rencana Karang Taruna tersebut untuk melaksanakan bedah rumah. Karang Taruna kemudian mengkomunikasikan rencana bedah rumah tersebut kepada tokoh masyarakat, warga masyarakat dan dunia usaha.

Tokoh masyarakat, warga dan dunia usaha mendukung rencana tersebut, dan disepakati bahwa kegiatan bedah rumah dilaksanakan secara bergotong royong. Setiap orang, sesuai dengan kemampuan masing-masing berpartisipasi di dalam kegiatan tersebut dengan memberikan sumbangan berupa: tenaga, uang, bahan bangunan dan bahan pangan. Pada hari yang disepakati, warga bergotong royong melaksanakan bedah rumah keluarga miskin, dan warga yang rumahnya kebakaran.

Kegiatan bedah rumah yang dilaksanakan pada tiga tahun terakhir, yaitu: tahun 2016 sebanyak 5 (lima) rumah, tahun 2017 sebanyak 17 rumah dan tahun 2018 sebanyak 4 (empat) rumah, sehingga selama 3 (tiga) tahun berjumlah 26 rumah yang telah dibangun dan atau diperbaiki selama tiga tahun. Dana untuk bedah rumah tersebut diperoleh dari bantuan APBD Kabupaten Pandeglang, dunia usaha dan donasi dari warga masyarakat.

Program bedah rumah yang dilaksanakan oleh Karang Taruna Sukajadi, telah dirasakan manfaatnya oleh warga penerima program. Rumah yang tadinya tidak layak huni (atap bocor, tiang mau roboh, lantai tanah dan lembab) dan rumah yang kebakaran, kini menjadi tempat tinggal yang layak huni. Di antara warga yang rumahnya tidak layak huni, ada warga seorang janda dengan dua orang anak yang tinggal di tanah orang lain, dan dengan kondisi rumah tidak layak huni.

Manfaat bedah rumah ini sebagaimana disampaikan oleh seorang warga (T) yang menerima program bedah rumah mengatakan:

“saya terima kasih sama pemuda-pemuda (baca: Karang Taruna) di sini telah membantu perbaikan rumah. Rumah saya sudah rusak, bocor dan mau roboh.. sama pemuda-pemuda dan warga di sini diperbaiki.. sekarang tidak bocor lagi dan rapi...terima kasih...terima kasih sekal. Semoga kebaikan dibalas oleh Allah...”

Di Desa Sukajadi terdapat lebih 130 orang anak yatim/piatu, dan anak dari keluarga miskin. Mereka menghadapi kesulitan untuk memiliki peralatan sekolah. Melihat realita ini, Karang Taruna Sukajadi memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak tersebut, dimaksudkan untuk meringankan beban pengeluaran kebutuhan pendidikan untuk anak-anak.

Bantuan pendidikan kepada anak yatim/piatu dan anak keluarga miskin tersebut, pada tahun 2016 diberikan kepada 20 orang, tahun 2017 kepada 70 orang dan tahun 2018 kepada 35 orang, sehingga selama 3 (tiga) tahun berjumlah 125 orang anak yatim/piatu dan anak keluarga miskin telah memperoleh bantuan pendidikan.

Pada penyaluran bantuan pendidikan, Karang Taruna Sukajadi lebih berperan sebagai *organizer*, yaitu menghimpun dan mendistribusikan bantuan dari warga masyarakat kepada anak yatim/piatu dan anak keluarga miskin. Selain bantuan pendidikan, Karang Taruna Sukajadi juga melaksanakan khitanan massal gratis bagi anak-anak yatim/piatu dan anak keluarga miskin.

Di Desa Sukajadi terdapat penyandang disabilitas sebanyak 5 (lima) orang, dan

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebanyak 4 (empat) orang. Karang Taruna Sukajadi berperan *enabler* atau *referral*, yaitu menyalurkan orang-orang tersebut kepada lembaga pelayanan dan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang.

Selanjutnya, Karang Taruna Sukajadi memberikan bantuan pangan (sembako) kepada lanjut usia telantar/jompo. Pada tahun 2018 sebanyak 520 orang menerima bantuan pangan. Bantuan kepada lanjut usia telantar/jompo ini diberikan setahun sekali, dikaitkan dengan santunan hari raya idul fitri. Bantuan pangan antara lain berupa: beras, mie, minyak goreng dan telur. Pada penyaluran bantuan pangan, Karang Taruna Sukajadi lebih berperan sebagai *organizer*, yaitu menghimpun dan mendistribusikan bantuan dari warga masyarakat kepada lanjut usia telantar/jompo. Dikemukakan oleh anggota Karang Taruna Sukajadi:

"kegiatan kesejahteraan sosial dilakukan sebagai bentuk rasa kepedulian kami kepada warga yang mengalami masalah seperti miskin, jompo, cacat dan yatim/piatu. Mereka itu memerlukan bantuan orang lain, dan Karang Taruna merasa bertanggung jawab untuk membantu mereka".

Program kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Karang Taruna Sukajadi telah memberikan nilai dan manfaat bagi warga masyarakat, teruma warga tidak mampu dan mengalami masalah sosial. Dituturkan oleh seorang lansia (N) penerima program bantuan sosial (sembako) dengan mata berkaca-kaca:

"Alhamdulillah...terima kasih... saya sudah dibantu pangan sama anak dan cucu saya... (read Karang Taruna). Sering mereka datang ke rumah saya... kasih bantuan buat makan saya...Mudah-mudahan dibalas oleh Gusti Allah... atas apa yang sudah saya

terima selama ini".

2. Ekonomi

Kegiatan di bidang ekonomi dalam bentuk pembukaan perkebunan kopi dan pemasaran kopi. Kegiatan ini dilakukan dengan bekerja sama pemilik lahan/kebun, dan dengan pengusaha cafe "Kopi Bakar". Untuk kegiatan ekonomi, Karang Taruna Sukajadi melaksanakan fungsi *partnership* atau *networking* dengan sistem sumber di lingkungannya. Hasil dari kegiatan ekonomi tersebut untuk kesejahteraan anggota Karang Taruna dan untuk dana operasional.

Kegiatan ekonomi tersebut memang masih rintisan, sehingga hasilnya secara finansial masih rendah. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi belum dapat memberikan kontribusi pada penanggulangan pengangguran di Desa Sukajadi yang pada tahun 2018 berjumlah 1.961 orang. Menurut pengurus Karang Taruna, berdasarkan hasil survei pasar, "Kopi Bakar" ini memiliki prospek yang bagus, dan karena itu mereka akan meningkatkan pangsa yang lebih luas. Dikemukakan oleh seorang pengurus Karang Taruna (AW):

"produk kopi bakar ini mulai diminati masyarakat, prospeknya cukup bagus. Bulan ini (Mei 2018) sudah ada pesanan dari kawan-kawan di Sulawesi dan Papua, meskipun masih partai kecil".

Karang Taruna Sukajadi memiliki komitmen meningkatkan kemauan dan semangat untuk menekuni usaha ekonomis produktif, berupa budidaya tanaman kopi dan pemasaran kopi yang lebih luas. Sehubungan dengan itu, Karang Taruna Sukajadi seringkali mengikuti pameran tersebut untuk mengenalkan "Kopi Bakar" sebagai produk unggulan mereka.

Kegiatan ekonomi lain, menjadi *event*

organizer pada penyelenggaraan resepsi, seperti: pernikahan, khitanan, ulang tahun dan acara sejenis. Kegiatan ini melibatkan sekitar 20 orang anggota Taruna. Sebagaimana diikemukakan oleh ketua Karang Taruna (AW):

“kegiatan anggota Karang Taruna sebagai even organizer ini semakin meningkatkan kepercayaan diri anggota, dan masyarakat memberikan apresiasi yang baik. Sebagian besar warga yang menyelenggarakan resepsi, sudah memanfaatkan jasa Karang Taruna sebagai event organizer-nya. Dari jasa sebagai event organizer ini, Karang Taruna memperoleh kas untuk operasional”.

3. Seni dan Budaya

Karang Taruna Sukajadi berkomitmen untuk memelihara seni budaya lokal. Secara berkala, Karang Taruna melaksanakan kegiatan festival seni budaya, seperti seni pencak silat, dan “pukul lesung” dan tarian tradisional. Seni pencak silat sebagai unggulan yang selalu ditampilkan sebagai tari persembahan ketika ada kunjungan pejabat pemerintah atau wisatawan. Seni pencak silat, dimainkan oleh anak-anak dan remaja.

Sedangkan “pukul lesung” dimainkan oleh ibu-ibu yang sudah usia paruh baya. Dikemukakan oleh tokoh wanita (LS): *seni pukul lesung ini dimainkan oleh wanita yang usianya paruh baya. Kita bisa mendengarkan irama hasil dari pukulan “alu” ke bibir “lesung”* Ketika ditanyakan, apakah yang memainkan seni “tabuh lesung” tersebut harus wanita paruh baya? Dijelaskan oleh LS, bahwa: *memang sudah begitu “dari sononya”* (menurut nilai yang dianut selama ini).

Kemudian, Karang Taruna menyelenggarakan kegiatan festival seni

budaya dan pencarian bakat. Pada kegiatan tersebut dilombakan seni musik tradisional, dan seni musik Islami, yang diikuti oleh kaum remaja putra maupun putri. Dikemukakan oleh ketua Karang Taruna (AW):

“remaja antusias mengikuti festival seni budaya dan pencarian bakat ini. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun, dan akan terus dilaksanakan sebagai ajang pelestarian budaya lokal”.

Kegiatan melestarikan seni budaya lokal ini dilakukan dengan berbagai unsur masyarakat, seperti: tokoh adat, tokoh masyarakat, aparat desa dan tokoh seni. Peran Karang Taruna dalam pelestarian seni budaya ini sebagai *fasilitator*, dan memberikan ide-ide yang menjadi masukan komunitas seni budaya. Seni budaya lokal menurut Karang Taruna akan terus dilestarikan sampai kapan pun, meskipun pada saat ini menghadapi tantangan yang luar biasa dari seni budaya modern. Oleh karena itu, keberadaan sanggar seni menjadi sangat penting sebagai wahana untuk memelihara seni budaya lokal.

Kegiatan seni dan budaya juga dilaksanakan dalam bentuk olah raga dan rekreasi. Karang Taruna ikut aktif dalam “Pesta Rakyat Cibalirung”. Pada acara tersebut Karang Taruna Sukajadi memfasilitasi dan memberikan dukungan kepada tim olah raga dan seni budaya untuk tampil dalam acara tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh pengurus Karang Taruna (AW):

“setiap tahun kami memfasilitasi dan memberikan dukungan kepada tim olah raga dan seni budaya dalam even “Pesta Rakyat Cibalirung, Warga, khusus kaum muda - terlihat antusias dan gembira mengikuti acara tersebut”.

4. Sosial Kemasyarakatan

Nilai lokal yang menjadi landasan kegiatan sosial kemasyarakatan Karang Taruna Sukajadi adalah “Sabatur Ngajaga Lembur”. Nilai lokal ini mendorong Karang Taruna untuk melaksanakan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Sunatan massal adalah salah satu kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan bagi anak-anak usai 6 – 10 tahun. Sampai saat ini, Karang Taruna Sukajadi sudah mengkhitankan lebih 80 orang anak. Sunatan atau khitanan massal ini, diutamakan bagi anak-anak yatim dan anak dari keluarga tidak mampu. Untuk terselenggaranya kegiatan sunatan massal, Karang Taruna bekerja sama (*partnership/ networking*) dengan Puskesmas Cibalirung, Rumah Khitan dan donasi dari masyarakat.

Kegiatan lain yang melibatkan banyak warga desa adalah kegiatan keagamaan. Sebagian besar warga Desa Sukajadi adalah beragama Islam (Muslim). Pada setiap hari-hari besar Islam, warga melaksanakan peringatan yang diisi dengan doa bersama dan makan bersama. Pada kegiatan tersebut, Karang Taruna mengisi kepanitiaan yang dibentuk oleh pemerintah Desa Sukajadi, seperti: penyiapan tempat, susunan acara, mengumpulkan sumbangan dan pelaksanaan kegiatan.

5. Aksi Sosial Anti-Narkoba dan Anti-Preman

Kasus penyalahgunaan Napza di Desa Sukajadi sampai saat ini belum terjadi. Meskipun demikian, Karang Taruna Sukajadi aktif melakukan sosialisasi kepada pemuda, dimaksudkan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Karang Taruna bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan aparat desa, sepakat dan berkomitmen, bahwa Desa Sukajadi bebas dari Narkoba.

Sosialisasi dilakukan di sekolah SMP dan SMA, dalam pertemuan Karang Taruna dan kelompok-kelompok kegiatan remaja. Sosialisasi ini dilakukan dengan kepolisian Kecamatan Cibalirung secara berkala. Keterlibatan Karang Taruna dalam sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba ini sebagaimana dikemukakan polisi dari Polsek Kecamatan Sibalirung (M):

“kepolisian Cibalirung beberapa kali melaksanakan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Pada kegiatan tersebut, kepolisian melibatkan Karang Taruna Sukajadi, dan sudah cukup lama menjalin kerja sama. Kepolisian Cibalirung sangat berharap, Karang Taruna Sukajadi ini dapat menjadi model organisasi kepemudaan, khususnya dalam mencegah dan menangkal penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Cibalirung”.

Di Desa Sukajadi dikenal ada tiga orang “preman jalanan dan preman pasar”. Warga desa merasa terganggu dengan keberadaan preman tersebut. Selama ini belum ada pihak yang bisa mengarahkan mereka agar menjalani kehidupan sebagaimana warga desa umumnya. Kemudian, Karang Taruna melakukan pendekatan atau melakukan fungsi advokasi (*advocate*) secara personal kepada ketiga orang preman tersebut. Pendekatan tersebut berhasil mengajak ketiga preman menjadi anggota Karang Taruna. Sekarang ketiga orang tersebut telah meninggalkan aktivitasnya sebagai preman, dan aktif membantu Karang Taruna Sukajadi. Salah seorang preman (N) mengemukakan:

“dulu kami hidup tidak teratur di jalanan dan pasar. Banyak orang yang terganggu dengan apa yang kami lakukan. Kini kami menyadari, bahwa kami selama

ini menempuh jalan hidup yang keliru. Alhamdulillah....kami dibantu sahabat-sahabat dari Karang Taruna untuk menjalani kehidupan baru yang lebih baik. Kami sangat berterima kasih”.

Karang Taruna sebagai Agen Perubahan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Karang Taruna di bidang kesejahteraan sosial, ekonomi, seni budaya, sosial kemasyarakatan dan aksi sosial; memberikan informasi, bahwa Karang Taruna Sukajadi sudah berperan sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat. Konsep agen perubahan sebagaimana dikemukakan Caldwell (Poeck, Læssøe, & Block, 2017), bahwa *agent of change as actors that play a significant role in “initiating, managing or implementing change”*. Aktor atau pelaku perubahan dimaksud dapat berwujud individu, kelompok dan atau organisasi.

Karang Taruna sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, dengan perannya sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat, dapat menjelma menjadi *civil society*. Kehadirannya di tengah-tengah masyarakat akan membawa perubahan dalam penanggulangan kemiskinan, kelompok rentan dan penanganan masalah sosial lain (lihat Connolly, 2007; Ifenkwe, 2012; Iwuchukwu, Ogbonna & Agboti, 2015; Hidayatullah, 2016; Ashari, 2010; Manor, 2004). Kiprah Karang Taruna sebagai bentuk partisipasi pemuda (baca: Karang Taruna) dalam pengembangan masyarakat, khususnya dalam penanganan warga miskin dan kelompok rentan, tidak diragukan lagi, dan hasilnya dapat diamati (lihat Cornwall, 2010; Holtom, Watkins & Siladi, 2016; Taqwarahmah, 2017; Matsela, 2015).

Berbagai peranan Karang Taruna, seperti: sebagai *facilitator* atau *mediator*; *motivator* atau *to encourage*, *advocate*, *networking/*

partnership, dan *empower*; telah dilaksanakan dan manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat, khususnya warga miskin dan rentan. Berbagai peran yang dilaksanakan oleh Karang Taruna Sukajadi tersebut memperkuat konsepsi agen perubahan sebagaimana dikemukakan oleh Enclaria (2011) tentang *Roles of a Change Agent*; Poeck, Læssøe, and Block (2017) tentang *Ideal Typology of Change Agents*, dan Grimsley (ny) tentang *Change Agent : Definition and Role*.

Pada peran *advocate*, Karang Taruna menyarankan, mengusulkan dan memberikan dukungan kepada warga masyarakat dalam mengimplementasikan rencana kegiatan yang disepakati. Pada peran *to encourage*, Karang Taruna melakukan perubahan pada perilaku dan sikap warga masyarakat dengan memahami permasalahan warga, dan mendorong warga untuk melakukan perubahan. Kemudian, pada peran *facilitator*, Karang Taruna melakukan klarifikasi atas perubahan yang dikehendaki warga, dan menemukan cara yang lebih mudah untuk melakukan perubahan.

Pada semua peran yang dilaksanakan, terpenting bahwa Karang Taruna menumbuhkan kreativitas, merancang sistem, dan proses yang memungkinkan warga masyarakat mencapai keberhasilan ketika melakukan perubahan. Meskipun peran-peran kreatif tersebut telah dilaksanakan oleh Karang Taruna Sukajadi, namun demikian masih perlu dioptimalkan. Peran-peran tersebut belum menyebar secara luas ke semua anggota Karang Taruna, atau baru pada beberapa orang pengurus inti saja.

Konsepsi yang menempatkan Karang Taruna sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat, perlu dipahami kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Karang Taruna sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang anggotanya kaum

muda (13-45 tahun), selayaknya berada di depan (*on the front line careworker*) dalam praktik pengembangan masyarakat. Mereka memiliki keunggulan-keunggulan secara fisik, semangat, pengetahuan dan keterampilan; yang apabila dapat dikelola secara optimal, dan didayagunakan untuk pengembangan masyarakat lokal, maka akan memberikan manfaat yang besar dan berkesinambungan.

Karang Taruna sebagai salah satu pilar sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial, dan sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial (lihat Permensos No. 8/2012) serta sebagai agen perubahan (lihat Evans and Prilleltensky, ny; Chouhan, 2014), tidak akan mampu memenuhi harapan masyarakat apabila tidak ada usaha pemberdayaan. Hal ini menghendaki kehadiran negara '*the state provides political care*' untuk memberikan perhatian secara serius pada Karang Taruna melalui dukungan program dan anggaran yang memadai. Perhatian tersebut sebagai upaya merealisasikan kebijakan negara tentang investasi bidang sosial (*social invesment*) dalam mewujudkan pembangunan sosial berkelanjutan.

KESIMPULAN

Karang Taruna sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang beranggotakan pemuda, sudah menempatkan diri sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat. Karang Taruna Sukajadi di Pendeglang, telah melaksanakan berbagai peran melalui kegiatan kesejahteraan sosial, ekonomi, seni dan budaya serta kemasyarakatan. Penerima program merasa diperhatikan dan terbantu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, antara lain rumah layak huni, bahan pangan, dan pendidikan. Meskipun demikian, peran dan kegiatan Karang Taruna tersebut masih perlu dioptimalkan. Karang Taruna Sukajadi masih memerlukan pemberdayaan, agar program dan

hasil kerjanya optimal. Disarankan pemerintah Pusat (read Kementerian Sosial RI) dan Pemerintah Kabupaten Padeglang, memberikan program penguatan kapasitas Karang Taruna, dan dukungan dana operasional program.

SARAN

Berdasarkan pembasan hasil penelitian, saran yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Kementerian Sosial :
 - a. Melaksanakan bimbingan teknis lanjutan kepada Karang Taruna, sehingga pengetahuan dan keterampilan praktik di bidang kesejahteraan sosial menyebar ke semua anggota Karang Taruna.
 - b. Menyelenggarakan penilaian Karang Taruna teladan nasional setiap tahun. Penilaian ini akan memberikan motivasi bagi Karang Taruna untuk berperan nyata di bidang kesejahteraan sosial.
2. Dinas Sosial Provinsi Banten dan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang:
 - a. Menyelenggarakan sosialisasi kepada badan usaha agar penyelenggaraan program CSR dengan melibatkan Karang Taruna.
 - b. "Memasarkan" Karang Taruna kepada Organisasi Pemerintahan Daerah lain, sehingga setiap kegiatan di tingkat desa/kelurahan melibatkan Karang Taruna.
 - c. Memberikan motivasi, mediasi dan dukungan, agar Karang Taruna di setiap desa/kelurahan di Provinsi Banten menjadi Karang Taruna yang maju dan berprestasi di tingkat provinsi dan nasional.
3. Karang Taruna Sukajadi:
 - a. Memperkuat hubungan dengan aparat desa dan tokoh masyarakat untuk memperoleh dukungan pada program yang dilaksanakan.

- b. Memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan instansi pemerintah berkaitan dengan dukungan sumber daya.
- c. Memperkuat konsolidasi, sehingga setiap anggota Karang Taruna memahami tugas dan peran masing-masing.
- d. Memperkuat jejaring kerja dengan pilar-pilar sosial yang lain: Pekerja Sosial Masyarakat, Penyuluh Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana dan Organisasi Masyarakat Sipil yang ada di Desa Sukajadi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan naskah ini dibantu oleh banyak pihak, terutama rekan-rekan peneliti Puslitbangkesos dan Sub Direktorat Karang Taruna dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Sehubungan dengan itu, disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya. Terima kasih juga disampaikan kepada tim editor Sosio Konsepsia atas dimuatnya naskah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar .S, (2013), Agen Perubahan (*Agent of Change*), https://bppk.kemenkeu.go.id/images/file/pusbc/artikel/2013_Agen_Perubahan.pdf, diakses 23 Jan 2019.
- Ashari.A.H, (2010). Peran Karang Taruna Bakti Loka, Gejayan, Desa Condong Catur, Depok Sleman, Yogyakarta dalam Pemberdayaan Masyarakat, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, DI Yogyakarta.
- Baharuddin, (2017), Pemuda Karang Taruna “Sejati” dan Pembangunan Di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Skripsi, Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Uin Alauddin Makassar.
- Barr.A, (2014) Community Development, Scottish Community Development Centre and Community Development Alliance Scotland, <https://static1.squarespace.com/static/>, diakses 20 Jan 2019.
- Chouhan.J, (2014), The Significant Role of Youth and Community Development Work, *International Critical Thought*, 4:3, 389-395, DOI: 10.1080/21598282.2014.935994.
- Connolly.E, (2007;), Civil society in poverty alleviation: perspectives from Tanzania, Ethiopia and Central America, http://doras.dcu.ie/2108/1/Irish_Aid_journal.pdf, diakses 22 Jan 2019.
- Cornwall.G.A.P, (2010), Youth Participation in Local (Community) Level Development: A Development Strategy, <https://www.google.com/search?safe=strict&source>, diakses 22 Jan 2019.
- Enclaria., (2011), Seven Roles of a Change Agent. <https://www.enclaria.com/2011/01/06/seven-roles-of-a-change-agent/> diakses 14 Jan 2019.
- Evans.S.D & Prilleltensky.I, (2007), Youth and Democracy: Participation for Personal, Relational, and Collective Well-being, *JOURNAL OF COMMUNITY PSYCHOLOGY*, Vol. 35, No. 6, 681–692. DOI: 10.1002/jcop.20172.
- Flora .C & Arnold.N (2012), Community Development, <https://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?>, diakses 25 Jan 2019.
- Forno.C.A.m & Boren.A.E, (2017), Creating Community Capacity through Youth Empowerment: Case Study of Rural Nicaragua, *Jurnal of Youth Development*,

DOI: 10.5195/ jyd.2017.45.

- Grimsley.S, (ny), Change Agent: Definition and Role, <https://study.com/academy/lesson/change-agent-definition-role-quiz.html>, diakses 14 Jan 2019..
- Hidayatullah, (2016), Peranan Karang Taruna Dalam Upaya Pembinaan Karakter Generasi Muda Desa Balukang II Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako.
- Holtom.D, Watkins.J & Siladi.S, (2016), Study on the Social Value of Youth Organisations, European Yuth Forum: Brussels, Belgium.
- Ifenkwe.G.E, (2012), Mobilizing and Empowering Youths for Sustainable Community and Rural Development in Nigeria, *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, April 2012, Vol. 1, No. 2 ISSN: 2226-6348.
- Iwuchukwu.J.C, Ogbonna.O.I & Agboti.I.O, (2015), Roles of youths groups in rural community development in Ebonyi State, Nigeria, *Journal of Agricultural Extension and Rural Development*, Vol.7(2), pp. 41-47, DOI: 10.5897/JAERD2014. 0639.
- Kawalod.F.A, Rorong.A dan Londa.V.Y, (2015), Peranan Organisasi Karang Taruna Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Suatu Studi Di Desa Tewasen, Desa Pondos, Desa Elusan, Desa Wakan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan), <https://ejournal.unsrat.ac.id/>diakses 26 Jan 2019.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, (2013), Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna, Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Lestari .Y, (2016), Peranan Karang Taruna Putu Djenggot Dalam Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama Di Desa Jrahi Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati Jawa Tengah, Thesis, Sriwijaya Government Buddhist College Tangerang-Banten.
- Lunenborg .F .C, (2010), Managing Change: The Role Of The Change Agent, *International Journal of Management, Business, and Administration*, Volume 13, Number 1, 2010.
- Malau .W, dan Simanjutak.D.H.P, (2017), Pemuda dan Masa Depan Bangsa, Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Tahun 2017 Vol. 1 No. 1 2017, Hal. 30-33.
- Mandara.G.R.R & WCRP, (2004), Poverty Reduction in Dar es Salaam through Youth Employment Creation, Paper Prepared for an Expert Group Meeting on Strategies for Creating Urban Youth Employment: Solutions for Urban Youth in Africa , 22 - 24 June 2004, Nairobi, Kenya.
- Manor.J (2004), Civil Society and Poverty Reduction, a Guide for Development Practitioners, Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), Sweden.
- Masselli, B., & Bergan, J. (2018). The Role of Youth-Run Organizations in Improving Services and Systems for Youth and Young Adults: A Commentary on the State of the Science. Portland, OR: Research and Training Center for

Pathways to Positive Futures, Portland State University.

- Matsela.T, (2015), Exploring Youth Participation in Community Development Organisations in the Western Cape, Thesis, Departemen of Social Development – University of Cape Town.
- Pittman, K.J., (1991), Promoting Youth Development: Strengthening the Role of Youth Service and Community Organizations, *School K-12*. Paper 42. <https://digitalcommons.unomaha.edu/cgi, diakses 24 Jan 2019>.
- Poeck.K.V, Læssøe.J, & Block.T, (2017), An Exploration of Sustainability Change Agents As Facilitators of Nonformal Learning: Mapping a Moving and Intertwined Landscape. *Ecology and Society* 22(2):33. <https://doi.org/10.5751/ES-09308-220233>.
- Ramadhan.A.S, (2013), Youth Policies in Indonesia: Activating the Role of Youth: Part of a Report Series : Capacity Building for the Empowerment and Involvement of Youth in Indonesia, http://www.youthpolicy.org/national/Indonesia_2013_Youth_Policy_Review.pdf, diakses 20 Jan 2019.
- Sawitri.N, (2014), Partisipasi Pemuda Dalam Program Karang Taruna Desa (Studi Pada Pemuda Di Dusun Kupang Kidul Desa Kupang Kecamatan Ambarawa), Skripsi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
- Sudirman.A.P, (2017), Peran Kaum Muda Dalam Pembangunan Di Desa Tanam Mawang (Studi Terhadap Organisasi Kepemudaan Genreta (Generasi Penerus Desa Tanam Mawang) Di Desa Tanam Mawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto), Universitas Islam Negeri Alauddin – Makassar.
- Taqwarahmah.C.G, (2017), Peran Karang Taruna Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Desa Karang Patihan, Kabupaten Ponorogo Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga, *JURNAL KETAHANAN NASIONAL*, Volume 23 No. 1, 27 April 2017 Halaman 37- 48.
- Udensi.L.O, Daasi, G. L.K, Domale.S., Zukbee.S.,A,(2013), Youth Participation in Community Development (CD) Programmes in Cross River State: Implications for Sustainable Youth Development in Nigeria, *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)* Volume 13, Issue 5 (Jul. - Aug. 2013), PP 61-67.
- Valeeva.R.A & Rymbakova.L.A, (2014), The Role of Youth Organization in the Development of Higher Educational Institutions Students' Humanistic Value Orientations, <https://www.sciencedirect.com/science/article/> diakses 23 Jan 2019.
- Widodo.S.K, (2012, Memaknai Sumpah Pemuda Di Era Reformasi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/view/4604>, diakses 22 Jan 2019.
- Wijaya.D.N, (2013), Mentalitas Pemuda pada masa Peregerakan dan Masa Reformasi di Indonesia: Dari Berani berpengatahuan hingga Takut Berpengetahuan, *SUSURGALUR: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*, No 1, Vol 1, Maret 20913.

DINAMIKA KEBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BOMBANA SULAWESI TENGGARA

DYNAMICS OF COMMUNITY EMPOWERMENT AROUND MINING IN BOMBANA DISTRICT SOUTHEAST SULAWESI

Syafruddin, Sumardjo, Prabowo Tjitropranoto dan Anna Fatchiya

Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan
Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
Fakultas Ekologi Manusia – IPB Kampus Dramaga Bogor, Indonesia, 16680
E-mail : sn.syafruddin@gmail.com

Diterima: 31 Desember 2018, Direvisi: 18 Juli 2019; Disetujui: 29 Juli 2019

Abstrak

Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bombana menunjukkan ketidakberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya terutama di sekitar pertambangan. Masalah penelitian: (1) Bagaimanakah dinamika keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan di Kabupaten Bombana? (2) Faktor apakah yang mempengaruhi dinamika keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan? (3) Bagaimana strategi meningkatkan keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan? Tujuan penelitian: (1) menganalisis dinamika keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan di Kabupaten Bombana; (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan. (3) merumuskan strategi meningkatkan keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan. Penelitian menggunakan metode survei, analisis data secara deskriptif dan inferensial. Analisis inferensial menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan dinamika keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan di Kabupaten Bombana termasuk kategori rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya dinamika keberdayaan masyarakat adalah: Rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya motivasi, jumlah tanggungan keluarga, buruknya persepsi terhadap pertambangan dan terhadap pemberdayaan oleh perusahaan, dan rendahnya tingkat partisipasi; Rendahnya dukungan faktor eksternal; Tingginya konflik sosial; Rendahnya kompetensi adaptif masyarakat. Strategi pemberdayaan masyarakat di sekitar pertambangan adalah: Optimalisasi peran masyarakat sekitar pertambangan dalam pelaksanaan program pemberdayaan; Penguatan peran serta tenaga pendamping dalam program pemberdayaan; Melakukan pengelolaan terhadap konflik; Meningkatkan kompetensi adaptif masyarakat. Saran penelitian adalah untuk meningkatkan dinamika keberdayaan masyarakat di sekitar pertambangan di Kabupaten Bombana, pemerintah daerah harus mendorong perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Bombana untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap implementasi program tersebut.

Kata Kunci: *dinamika, keberdayaan, strategi pemberdayaan.*

Abstract

The high poverty rate in Bombana District showed the powerlessness of the community to improve their welfare, especially the communities around mining. Research problems: (1) what were the dynamics of empowerment of communities around mining in Bombana District? (2) What factors influence the dynamics of empowerment of communities around mining? (3) How were the strategy to increase the empowerment of communities around mining? This research aimed to: (1) analyze the dynamics of empowerment of communities around mining in Bombana District; (2) analyze the factors that influence the dynamics of empowerment of communities around mining; (3) formulating the strategy to increase the empowerment of communities around mining. The research uses survey methods, descriptive and inferential data analysis. Inferential analysis uses multiple linear regression. The results of the study showed that the dynamics of community empowerment around mining in Bombana District as a whole were low category. The factors that influence the

low dynamics of community empowerment were: Weak internal factors: low level of education, low motivation, number of family dependents, poor perception of mining and poor perceptions of empowerment by companies, and low levels of participation: The low level of support from external factors; High social conflict; Low of community adaptive competency. The strategy of community empowerment around mining were: Optimizing the role of communities around mining in the implementation of empowerment programs; Strengthening the role of facilitators in empowerment programs; Managing conflict; Improve community adaptive competence. The suggestion of the research were to improve the dynamics of community empowerment around mining in Bombana District, the regional government must encourage mining companies operating in Bombana District to implement community empowerment programs and supervise the implementation of the program.

Keywords: *dinamics, empowerment, empowerment strategy.*

PENDAHULUAN

Kehadiran sejumlah perusahaan tambang di Kabupaten Bombana diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa peningkatan perekonomian masyarakat sekitar dan pengurangan tingkat kemiskinan daerah secara umum. Namun, hingga tahun 2017, angka kemiskinan di Kabupaten Bombana mencapai 13,06 persen atau di atas rata-rata provinsi sebesar 12,88 persen dan di atas rata-rata nasional yang berada pada 10,86 persen (BPS 2018) serta mengalami kenaikan dari tahun 2012 sebesar 12,81 persen. Kondisi ini diduga erat disebabkan oleh karena lemahnya keberdayaan masyarakat sekitar tambang sehingga tidak siap merespon kehadiran perusahaan tambang.

Dinamika keberdayaan mengacu pada perkembangan tingkat keberdayaan masyarakat pada berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Sumardjo (2014) mengungkapkan bahwa konsekuensi dan tanggung jawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip keberdayaan. Menurut Singh (2005) keberdayaan dapat dicapai jika sumber

daya dapat didistribusikan. Tujuannya adalah untuk memberikan mereka kontrol atas sumber daya dan menciptakan budaya di mana mereka merasa terpacu untuk memikul tanggung jawab atas lingkungannya.

Lord dan Hutchison (1993) mengemukakan bahwa ketidakberdayaan masyarakat merupakan akumulasi pengalaman dari beberapa faktor yang berkembang dan menghilangkan keberdayaan masyarakat yakni isolasi sosial, sistem layanan yang tidak responsif, kemiskinan, dan kesewenang-wenangan. Menurut White (2004) bentuk ketidakberdayaan yang perlu mendapatkan pertimbangan dalam suatu program pengembangan adalah kurangnya kekuatan ekonomi, politik dan status yang rendah dari budaya sebagai masalah utama. Dampak lanjutannya di antaranya tidak memiliki akses ke pendidikan, bantuan teknis, kesehatan dan perumahan yang diperlukan.

Keberdayaan merupakan produk dari sebuah proses pemberdayaan. Istilah pemberdayaan masyarakat mengacu pada proses di mana masyarakat memiliki kontrol dan keuntungan atas kegiatan mereka, dan meningkatkan inisiatif dalam menentukan nasibnya sendiri. Implikasi dalam prakteknya, ini berarti dua hal. Pertama, secara kolektif, masyarakat meningkatkan kemampuannya untuk bernegosiasi dengan lembaga dan agen eksternal, menarik investasi

dan hak ke masyarakat. Kedua, meningkatkan kemampuannya untuk mengelola urusan internal, dalam hal mewakili kepentingan dan pandangan anggotanya, menyepakati prioritas, merumuskan rancangan, dan mengelola proses pembangunan (Lyons *et al.* 2011).

Menurut Sumardjo *et al.* (2014) agar pemberdayaan berlangsung efektif ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian yaitu: (1) perlunya restrukturisasi kelembagaan dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga semakin mengarah kepada terwujudnya keleluasaan berekspresi, dan semakin berkembangnya inisiatif pemenuhan kebutuhan-kebutuhan azasi masyarakat; (2) peninjauan atau review kebijakan-kebijakan yang ada sedemikian rupa, sehingga kebijakan yang tidak memihak masyarakat perlu dikritisi agar menjadi ada keberpihakan yang jelas terhadap pengembangan masyarakat; dan (3) mengkritisi program-program yang pernah ada dan mengganti program *top-down* dengan *bottom up* yang lebih konvergen dan partisipatif. Lebih dikembangkan suasana yang kondusif untuk terwujudnya partisipasi baik pihak masyarakat, aparat instansi teknis, dan pihak-pihak yang berperan sebagai perantara, seperti pendamping, LSM, perguruan tinggi, dan dunia bisnis melalui program CSRnya.

Hasil penelitian Hafid (2015) menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan di Kabupaten Bombana berdampak negatif bagi masyarakat sekitar seperti kehilangan lahan, kerusakan lingkungan, dan konflik. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis dinamika keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara; (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara.

METODE

Penelitian dirancang dengan metode survei deskriptif. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Bulan Oktober 2016 – Maret 2017. Populasi penelitian adalah kepala rumah tangga yang bermukim di desa-desa sekitar areal pertambangan, baik di daratan maupun di kepulauan yang berjumlah 4082 kepala rumah tangga. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *Proporsional Cluster Sampling*. Total sampel penelitian adalah 182 yang ditentukan secara proporsional.

Peubah penelitian terdiri atas peubah bebas dan peubah terikat. Peubah bebas meliputi faktor internal (X1), faktor eksternal (X2), konflik sosial (X3), dan tingkat kompetensi adaptif (X4) adalah kemampuan adaptasi yang dimiliki responden mulai dari statis/apatis, reaktif, proaktif, dan antisipatif, meliputi kemampuan teknis, kemampuan alih profesi, dan kemampuan memanfaatkan peluang yang tersedia. Sedangkan peubah terikat adalah dinamika keberdayaan (Y1).

Faktor internal (X1) adalah hal-hal yang berhubungan dengan karakteristik personal yaitu: umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, frekuensi pelatihan, motivasi, tanggungan keluarga, persepsi terhadap pertambangan, persepsi terhadap pemberdayaan oleh perusahaan, dan partisipasi. Faktor eksternal (X2) adalah faktor-faktor luar diri responden yang berhubungan dengan pemberdayaan, meliputi: dukungan penyuluhan, dukungan kelembagaan, dukungan lingkungan sosial, dan dukungan komunikasi. Konflik sosial (X3) adalah perselisihan yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, meliputi: okupasi SDA, dominasi perusahaan, penanganan dampak negatif, dan alih fungsi lahan. Tingkat kompetensi adaptif (X4) adalah kemampuan

adaptasi yang dimiliki responden mulai dari statis/apatis, reaktif, proaktif, dan antisipatif, meliputi kemampuan teknis, kemampuan alih profesi, dan kemampuan memanfaatkan peluang yang tersedia. Dinamika keberdayaan (Y1) adalah kondisi responden memiliki akses dan kontrol atas sumber daya baik berasal dari dalam maupun dari luar sistem sosial. Meliputi keberdayaan dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan

Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Uji statistik inferensial yang digunakan untuk menganalisis pengaruh antar variabel terikat dengan variabel bebas menggunakan analisis regresi linear berganda dengan program SPSS versi 18.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Keberdayaan

Keberdayaan masyarakat di sekitar pertambangan di Kabupaten Bombana secara keseluruhan termasuk kategori rendah yang terdiri atas keberdayaan pada aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan (Tabel 1).

Berdasarkan Tabel 1, keberdayaan ekonomi masyarakat sekitar pertambangan di Kabupaten Bombana termasuk dalam kategori rendah, baik yang berada di kepulauan maupun di daratan. Keberdayaan ekonomi mencakup akses dan kontrol sumberdaya ekonomi seperti lahan, pasar, sarana perbankan dan kepemilikan faktor produksi. Hasil pengamatan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa faktor akses ke sumber modal merupakan kendala utama yang dialami oleh masyarakat. Masyarakat kesulitan memperoleh bantuan modal dari lembaga keuangan karena tidak dapat memenuhi syarat yang ditetapkan untuk memperoleh pendanaan, misalnya agunan untuk peminjaman modal di bank. Kondisi tersebut memerlukan perhatian dari berbagai pihak seperti memberikan pendampingan kepada masyarakat agar mampu mengembangkan kemampuan untuk menggunakan potensinya sehingga dapat mengatasi persoalan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Febiri (2008) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk menghapus atau meminimalisasi kemiskinan di masyarakat dengan cara merangsang masyarakat untuk mengembangkan kemampuan sendiri. Skerratt

Tabel 1. Dinamika keberdayaan masyarakat di sekitar pertambangan di Kabupaten Bombana

Kategori	Dinamika Keberdayaan							
	Ekonomi (rataan skor = 48.6)		Sosial (rataan skor = 47.9)		Budaya (rataan skor = 58.8)		Lingkungan (rataan skor = 54.1)	
	Pulau	Darat	Pulau	Darat	Pulau	Darat	Pulau	Darat
SR	26.4	36.8	27.6	20.0	21.8	16.8	25.3	25.3
R	47.1	35.8	34.5	28.4	43.7	48.4	47.1	42.1
CT	17.2	16.8	21.8	26.3	17.2	17.9	12.6	15.8
T	9.2	10.5	16.1	25.3	17.2	16.8	14.9	16.8
t-hitung 1.31			1.82		1.24		0.93	

Sumber (analisi data penelitian, Tahun 2018)

Ket: Sangat rendah (SR): $\leq -SD$; Rendah (R): $-SD$;

Cukup tinggi (CT): $+SD$; tinggi (T): $\geq +SD$

$t_{Tabel} \alpha 0.05 = 1.98$; $\alpha 0.01 = 2.61$

dan Steiner (2013) megemukakan bahwa meskipun sumber daya ekonomi lokal terbatas, individu dari masyarakat memanfaatkan sumber daya eksternal yang tersedia (misalnya kesempatan kerja, layanan dan produk) dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi pribadi.

Keberdayaan sosial di dua lokasi penelitian secara keseluruhan termasuk kategori rendah dan tidak berbeda nyata di dua lokasi penelitian. Kendala utama terkait keberdayaan sosial di dua lokasi penelitian adalah sulitnya akses sarana prasarana sosial. Sulitnya akses sarana prasarana sosial sangat dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di kepulauan terutama terkait sarana kesehatan, listrik dan transportasi. Sementara masyarakat yang tinggal di daerah daratan lebih terkendala pada masalah sarana kesehatan. Keberdayaan budaya keseluruhan termasuk kategori rendah baik di daerah kepulauan maupun di daerah daratan.

Keberdayaan budaya mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat seperti, sikap, prakarsa, budaya lokal, dan sarana prasarana budaya. Masalah utama masyarakat terkait budaya adalah sarana prasarana kebudayaan yang masih minim, terutama dalam rangka melestarikan kebudayaan yang ada, seperti peninggalan budaya maupun produk khas lokal.

Keberdayaan lingkungan secara keseluruhan termasuk rendah, baik di wilayah kepulauan maupun di wilayah daratan. Masyarakat memiliki keterbatasan dalam hal akses terhadap sumberdaya alam, terutama sejak perusahaan tambang beroperasi di sekitar mereka. Selain itu, beberapa warga telah menjual lahannya kepada perusahaan pertambangan sehingga membatasi mereka dalam mengembangkan pertanian lebih luas.

Rendahnya dinamika keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan di Kabupaten Bombana menunjukkan proses pemberdayaan masyarakat belum berjalan optimal. Program pemberdayaan masyarakat belum menyentuh esensi dasar masyarakat seperti struktur sosial, hak-hak ekonomi, dan penguatan kelompok masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Fracaró (2006) bahwa dalam proses pemberdayaan, struktur sosial memiliki peranan untuk mengkonfirmasi individu tentang hak mereka untuk bertindak secara otonom. Individu yang diberdayakan tahu tentang tanggung jawabnya, otoritas, dan pengambilan keputusan. Sejalan dengan hal tersebut, Triantafyllou dan Nielsen (2001) menyatakan bahwa pemberdayaan berusaha untuk membentuk penerima manfaat sebagai individu yang aktif dan bertanggung jawab dengan kemampuan untuk bertanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri. Hur (2006) menjelaskan terdapat tiga masalah dasar untuk memahami proses pemberdayaan: (1) Pemberdayaan multidimensional yang terjadi dalam sosiologis, psikologis, ekonomi, politik, dan dimensi lain. (2) Pemberdayaan juga terjadi di berbagai tingkatan, seperti individu, kelompok, dan masyarakat. (3) Pemberdayaan merupakan proses sosial karena terjadi dalam kaitannya dengan orang lain.

Pengaruh Faktor Internal terhadap dinamika keberdayaan

Hasil analisis pengaruh faktor internal terhadap dinamika keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan di Kabupaten Bombana (Tabel 2) menunjukkan bahwa faktor internal yang berpengaruh sangat nyata terhadap dinamika keberdayaan adalah tingkat pendidikan dan persepsi terhadap pertambangan. Sedangkan faktor internal yang berpengaruh nyata terhadap dinamika keberdayaan adalah motivasi, jumlah tanggungan keluarga, persepsi

terhadap pemberdayaan oleh perusahaan, dan partisipasi.

Tabel 2. Koefisien regresi faktor internal terhadap dinamika keberdayaan masyarakat disekitar pertambangan.

Faktor internal	Koefisien regresi terhadap dinamika keberdayaan (t-hitung)
Umur	0.84
Tingkat pendidikan	13.57**
Frekuensi pelatihan	1.45
Motivasi	4.18*
Jumlah tanggungan keluarga	2.11*
Persepsi terhadap pertambangan	3.74**
Persepsi terhadap pemberdayaan oleh perusahaan	3.44**
Partisipasi	2.42*

Sumber (analisi data penelitian, Tahun 2018)

Keterangan: ** Sangat nyata pada $\alpha \leq 0.01$;

*Nyata pada $\alpha \leq 0.05$;

$t_{Tabel} \alpha 0.05 = 1.98$; $\alpha 0.01 = 2.61$

Pendidikan merupakan instrumen penting bagi individu untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Melalui pendidikan individu juga memiliki wawasan dan pengalaman berpikir kritis sehingga mampu memahami dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi dinamika keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan dengan sangat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor pendidikan merupakan unsur penting bagi masyarakat untuk meningkatkan keberdayaannya. Pendidikan memberikan penyadaran terhadap individu dan masyarakat yang berpengaruh terhadap kegiatan pemberdayaan. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Hughey *et al.* (2008) bahwa kesadaran masyarakat dapat berkontribusi untuk pemberdayaan. Secara bersamaan mengintegrasikan kegiatan yang meningkatkan ikatan pada level individu, organisasi, masyarakat, dan hubungan di luar organisasi masyarakat dapat meningkatkan pemberdayaan.

Motivasi memberikan semangat kepada masyarakat untuk meningkatkan keberdayaannya melalui berbagai kegiatan. Menurut Suparno (2000) seseorang akan melakukan sesuatu kalau mengharapkan akan melihat hasil, memiliki nilai (*value*) atau manfaat. Perasaan berhasil atau *the experience of success* akan menimbulkan motivasi seseorang untuk mempelajari sesuatu.

Jumlah tanggungan keluarga berpengaruh nyata terhadap dinamika keberdayaan. Jumlah tanggungan keluarga memicu masyarakat untuk berusaha lebih baik dalam meningkatkan keberdayaannya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Menurut Soekartawi *et al.* (1986) banyaknya tanggungan keluarga akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan keluarga. Jumlah keluarga yang semakin besar menyebabkan seseorang memerlukan tambahan pengeluaran atau kebutuhan penghasilan yang lebih tinggi untuk membiayai kehidupannya.

Persepsi terhadap pertambangan berpengaruh sangat nyata terhadap dinamika keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan. Hal ini berarti bahwa persepsi yang baik terhadap pertambangan mendorong peningkatan dinamika keberdayaan masyarakat. Demikian pula dengan persepsi terhadap pemberdayaan oleh perusahaan berpengaruh nyata terhadap dinamika perusahaan. Bagi perusahaan, persepsi yang baik dari masyarakat merupakan bentuk penerimaan atau legitimasi sosial sehingga dapat memudahkan aktivitas perusahaan, termasuk dalam hal pemberdayaan masyarakat. Demikian pula dengan masyarakat bahwa persepsi yang baik terhadap perusahaan akan memudahkan keikutsertaan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan. Kotler (2000) menjelaskan bahwa persepsi adalah proses seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan

gambaran keseluruhan yang berarti. Persepsi adalah suatu proses pemberian arti atau makna terhadap lingkungan.

Partisipasi berpengaruh nyata terhadap dinamika keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan mampu meningkatkan dinamika keberdayaan masyarakat. Menurut Sardu *et al.* (2011) partisipasi adalah komponen dasar pemberdayaan masyarakat. Pendapat senada disampaikan oleh Lord dan Hutchison (1993) bahwa partisipasi itu sendiri adalah pemberdayaan. Sementara Green (2000) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat memegang kunci untuk mencapai pembangunan di pedesaan. Masyarakat sekitar pertambangan di Kabupaten Bombana menilai bahwa dengan berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan mereka dapat memperoleh pengalaman dan pemahaman yang baik tentang masalah yang dihadapi dan mengatasi masalah tersebut.

Pengaruh Faktor Eksternal terhadap dinamika keberdayaan

Hasil analisis pengaruh faktor eksternal terhadap dinamika keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan (Tabel 3) menunjukkan bahwa faktor eksternal berpengaruh sangat nyata terhadap dinamika keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan yaitu dukungan penyuluhan dan dukungan komunikasi.

Tabel 3. Koefisien regresi faktor eksternal terhadap dinamika keberdayaan masyarakat disekitar pertambangan

Faktor eksternal	Koefisien regresi terhadap dinamika keberdayaan (t-hitung)
Dukungan penyuluhan	9.00**
Dukungan kelembagaan	0.72
Dukungan lingkungan sosial	1.13
Dukungan komunikasi	8.76**

Sumber (analisi data penelitian, Tahun 2018)

Keterangan: ** Sangat nyata pada $\alpha \leq 0.01$;

$t_{Tabel} \alpha 0.05 = 1.98$; $\alpha 0.01 = 2.61$

Dukungan penyuluhan merupakan bentuk aktivitas penyuluhan yang ditujukan kepada masyarakat khususnya dalam bidang pertanian yang mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan peternakan. Penyuluhan merupakan upaya untuk membantu masyarakat merubah taraf hidupnya agar lebih baik dengan format non formal. Dukungan penyuluhan mampu meningkatkan dinamika keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan. Sumardjo (2010) mengemukakan bahwa penyuluhan pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas perilaku seseorang atau individu, yang meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik/konatif sehingga memiliki individualitas (human capital, bukan individualistis) yang siap mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakatnya.

Dukungan komunikasi memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan pemberdayaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dukungan komunikasi berpengaruh sangat nyata terhadap dinamika keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan. Hal ini berarti bahwa, dukungan komunikasi merupakan aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan di Kabupaten Bombana. Dukungan komunikasi dalam konteks pemberdayaan masyarakat mencakup upaya yang diberikan kepada masyarakat untuk memudahkan pelaksanaan setiap kegiatan pemberdayaan seperti kemudahan dalam melakukan komunikasi dengan pihak terkait, ketersediaan dan keterbukaan informasi.

Masyarakat dapat menyampaikan informasi

dan gagasannya dalam setiap tahapan kegiatan pemberdayaan, selain itu dengan dukungan komunikasi, masyarakat juga dapat memperoleh pemahaman yang jelas terkait rencana pelaksanaan kegiatan sehingga mereka dapat berpartisipasi. Effendy (2005) mengemukakan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Pikiran bisa berupa gagasan, informasi, opini dan lain sebagainya, yang muncul dari benaknya. Perasaan bisa merupakan keyakinan, kepastian, keragu-raguan dan sebagainya yang timbul dari lubuk hati.

Pengaruh Konflik Sosial terhadap dinamika keberdayaan

Data yang digunakan untuk analisis pengaruh konflik sosial terhadap dinamika keberdayaan bersifat positif. Sebagaimana Tabel 4, konflik sosial yang mencakup proses okupasi Sumber Daya Alam (SDA), dominasi perusahaan atas SDA, penanganan dampak negatif berpengaruh sangat nyata terhadap dinamika keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan.

Tabel 4. Koefisien regresi konflik sosial terhadap dinamika keberdayaan masyarakat di sekitar pertambangan

Konflik sosial	Koefisien regresi terhadap dinamika keberdayaan (t-hitung)
Proses okupasi SDA	12.98**
Dominasi perusahaan atas SDA	2.93**
Penanganan dampak negatif	3.00**

Sumber (analisis data penelitian, Tahun 2018)

Keterangan: ** Sangat nyata pada $\alpha \leq 0.01$;

$t_{Tabel} \alpha 0.05 = 1.98$; $\alpha 0.01 = 2.61$

Proses okupasi SAD yang dilakukan oleh perusahaan tambang memicu perselisihan antara pemilik lahan dengan perusahaan. Beberapa kasus perselisihan dapat diselesaikan

secara damai melalui mekanisme ganti rugi yang di sepakati kedua belah pihak, tetapi beberapa kasus lainnya tidak dapat diselesaikan sehingga menyebabkan perselisihan secara terbuka antara masyarakat dengan perusahaan. Proses okupasi juga secara langsung berakibat pada berpindahnya kepemilikan lahan dari masyarakat ke perusahaan.

Dominasi perusahaan atas SDA berpengaruh sangat nyata terhadap dinamika keberdayaan masyarakat. Hal ini berarti bahwa tingginya dominasi perusahaan atas SDA menurunkan dinamika keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan di Kabupaten Bombana. Idealnya, pengelolaan tambang dan semua sumberdaya yang ada di dalam areal pertambangan melibatkan masyarakat sehingga warga sekitar masih dapat memanfaatkan potensi lingkungan yang ada di dalam areal seperti lahan yang masih kosong. Dengan pola demikian, warga yang telah menjual lahannya masih dapat memanfaatkan lahan yang belum diolah oleh perusahaan. Meskipun sifatnya sementara, tetapi membantu masyarakat yang telah kehilangan lahannya sebelum memperoleh mata pencaharian yang baru.

Penanganan dampak negatif berpengaruh sangat nyata terhadap dinamika keberdayaan masyarakat. Artinya, buruknya penanganan dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan menurunkan dinamika keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan di Kabupaten Bombana. Aktivitas perusahaan berdampak langsung baik terhadap lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Penanganan dampak negatif bertujuan untuk menurunkan atau menghilangkan risiko negatif agar tidak berimbas pada kondisi sosial maupun lingkungan.

Secara keseluruhan, konflik sosial menimbulkan kerugian dan menurunkan

dinamika keberdayaan masyarakat sekitar areal pertambangan di Kabupaten Bombana. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Tetreault (2015) bahwa terdapat dua hal yang menyebabkan terjadinya konflik di kawasan pertambangan. Pertama, pengambilalihan sumber daya publik dalam bentuk mineral tambang oleh perusahaan atau pihak luar. Kedua, tersingkirnya petani kecil dan masyarakat adat dari kehidupan budaya, air, dan tanah mereka.

Menurut Sumardjo (2015), konflik yang terjadi di kawasan pertambangan selama ini merepresentasikan ketidakadilan ekonomi dan akses sumber daya yang dialami oleh masyarakat sekitar. Masyarakat menganggap bahwa daerah eksplorasi itu adalah wilayah adat atau kampung halaman mereka. Perusahaan pada sisi lain menganggap bahwa otoritas yang diterimanya melalui hal izin pertambangan, merasa mempunyai hak untuk melakukan eksplorasi sebesar-besarnya untuk kepentingan ekonominya sendiri. Pengelolaan potensi konflik yang terjadi di lingkungan pertambangan selama ini dipengaruhi oleh tiga aktor utama, yakni perusahaan, masyarakat sekitar tambang dan pemerintah.

Pengaruh Kompetensi Adaptif Masyarakat terhadap Dinamika Keberdayaan

Hasil analisis pengaruh kompetensi adaptif masyarakat terhadap dinamika keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan di Kabupaten Bombana (Tabel 5) menunjukkan bahwa kompetensi adaptif masyarakat berpengaruh sangat nyata terhadap dinamika keberdayaan masyarakat yaitu kemampuan teknis dan kemampuan memanfaatkan peluang yang tersedia. Sedangkan kemampuan alih profesi berpengaruh nyata terhadap dinamika keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan di Kabupaten Bombana.

Tabel 5. Koefisien regresi kompetensi masyarakat terhadap dinamika keberdayaan

Kompetensi Masyarakat	Koefisien regresi terhadap dinamika keberdayaan (t-hitung)
Kemampuan teknis	7.25**
Kemampuan alih profesi	1.98*
Kemampuan memanfaatkan peluang yang tersedia	11.38**

Sumber (analisis data penelitian, Tahun 2018)

*Keterangan: ** Sangat nyata pada $\alpha \leq 0.01$;*

**Nyata pada $\alpha \leq 0.05$;*

$t_{Tabel} \alpha 0.05 = 1.98$; $\alpha 0.01 = 2.61$

Kemampuan teknis berperan penting bagi masyarakat untuk meningkatkan keberdayaannya karena dengan memiliki kemampuan teknis, masyarakat dapat mengusulkan program hingga melaksanakan program tersebut. Hal ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam keseluruhan kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. Selain itu, program yang dilaksanakan merupakan usulan yang disampaikan oleh masyarakat sehingga sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan.

Masyarakat yang memiliki kemampuan alih profesi yang tinggi, memiliki dinamika keberdayaan yang lebih baik karena mampu menopang kehidupannya dari berbagai profesi yang beragam. Selain itu, masyarakat memiliki dinamika keberdayaan yang tinggi apabila memiliki kemampuan kemampuan memanfaatkan peluang yang tersedia. Hal ini sesuai dengan pendapat Sumardjo (1999) bahwa ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu: (1) Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan). (2) Mampu mengarahkan dirinya sendiri. (3) Memiliki kekuatan untuk berunding. Memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan (4) Bertanggung jawab atas tindakannya.

Strategi Peningkatan Dinamika Keberdayaan Masyarakat di Sekitar Pertambangan

Berdasarkan hasil analisis terhadap dinamika keberdayaan masyarakat di sekitar pertambangan di Kabupaten Bombana diperoleh bahwa dinamika keberdayaan masyarakat masih tergolong rendah. Oleh karena itu, diperlukan rumusan strategi untuk meningkatkan dinamika keberdayaan masyarakat di sekitar pertambangan khususnya dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Adapun rumusan strategi tersebut adalah: (1) Optimalisasi peran masyarakat sekitar pertambangan dalam pelaksanaan program pemberdayaan oleh perusahaan pertambangan. (2) Penguatan peran serta tenaga pendamping dalam program pemberdayaan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Hal ini terutama peran perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu layanan penyuluhan dan komunikasi kepada masyarakat. (3) Melakukan pengelolaan terhadap konflik yang terjadi di masyarakat. Hal ini misalnya menyelesaikan konflik yang telah terjadi dan berupaya mencegah terjadinya konflik antara perusahaan dan masyarakat sekitar dengan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat. (4) Meningkatkan kompetensi adaptif masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat sesuai kemampuan dan kebutuhan mereka.

KESIMPULAN

Keberdayaan masyarakat sekitar pertambangan di Kabupaten Bombana secara keseluruhan termasuk kategori rendah, mencakup keberdayaan ekonomi, keberdayaan sosial, keberdayaan lingkungan, dan keberdayaan budaya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya dinamika keberdayaan masyarakat

adalah (1) rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya motivasi, jumlah tanggungan keluarga, buruknya persepsi terhadap pertambangan dan terhadap pemberdayaan oleh perusahaan, dan rendahnya tingkat partisipasi. (2) Rendahnya dukungan faktor eksternal yang mencakup dukungan penyuluhan dan dukungan komunikasi. (3) Tingginya konflik sosial yaitu proses okupasi Sumber Daya Alam (SDA), dominasi perusahaan atas SDA. (4) Rendahnya peran pemerintah dan perusahaan dalam program pemberdayaan. (5) Rendahnya kompetensi adaptif masyarakat.

Strategi untuk meningkatkan dinamika keberdayaan masyarakat di sekitar pertambangan adalah: (1) Optimalisasi peran masyarakat sekitar pertambangan dalam pelaksanaan program pemberdayaan oleh perusahaan pertambangan. (2) Penguatan peran serta tenaga pendamping dalam program pemberdayaan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. (3) Melakukan pengelolaan terhadap konflik yang terjadi di masyarakat. (4) Meningkatkan kompetensi adaptif masyarakat

SARAN

Untuk meningkatkan dinamika keberdayaan masyarakat di sekitar pertambangan di Kabupaten Bombana, pemerintah daerah harus mendorong perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Bombana untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap implementasi program tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Terima kasih kepada PT Trias Group yang telah mensponsori penelitian ini.
2. Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bombana yang telah memberikan izin penelitian dan masyarakat yang telah menjadi narasumber penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2016). Statistik Kabupaten Bombana Tahun 2016. Rumbia: Badan Pusat Statistik.
- Effendy OU. (2005). Komunikasi dan Modernisasi. Jakarta: Mandar Maju.
- Febiri A. (2008). Introduction: Community Development, Community Empowerment and The Human Factor. Review of Human Factor Studies Journal [Internet]. [diunduh 2015 September 21]; 14(1). Tersedia pada: <http://web.a.ebscohost.com>.
- Fracaro KE. (2006). The Real Meaning of Empowerment. Contract Management Journal [Internet]. [diunduh 2013 November 10]. Tersedia pada <http://www.cm@ncmahq.org>.
- Green M. (2000). Participatory Development and the Appropriation of Agency in Southern Tanzania. Critique of Anthropology Journal [Internet]. [diunduh 2015 September 18]. Tersedia pada: www.sagepublications.com.
- Hafid. A. (2015). Konflik Sara di Wilayah Pertambangan (Kasus Sulawesi Tenggara). Artikel [Internet]. [diunduh 2015 November 3). Tersedia pada: <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id>.
- Humphreys M. (2005). Natural Resources, Conflict, and Conflict Resolution. Uncovering The Mechanisms. Journal Of Conflict Resolution [Internet]. [diunduh 2015 November 5]; 49(4). Tersedia pada: www.sagepublications.com.
- Hur MH. (2006). Empowerment In Terms of Theoretical Perspectives: Exploring A Typology of The Process and Components Across Disciplines. Journal of Community Psychology [Internet]. [diunduh 2013 November 10]; 34(5). Tersedia pada: <http://www.interscience.wiley.com>.
- Kotler P. (2000). Marketing Managemen: Analysis, Planning, Implementation, and Control. 9th Edition. New Yersey: Prentice Hall International, Int.
- Lord J, Hutchison P. (1993). The Process of Empowerment: Implications for Theory and Practice. Canadian Journal of Community Mental Health [Internet]. [diunduh 2013 November 10]; (12)1. Tersedia pada: <http://www.johnlord.net>.
- Lyons M, Smuts C, Stephens A. (2011). Participation, Empowerment and Sustainability: (How) Do the Links Work?. Journal of Urban Studies [Internet]. [diunduh 2015 September 18]; 38(8). Tersedia pada: www.sagepublications.com.
- Sardu C, Mereu A, Sotgiu A, Contu P. (2011). A bottom-up art event gave birth to a process of community empowerment in an Italian village. Journal of Global Health Promotion [Internet]. [diunduh 2015 September 18]; 19(1). Tersedia pada: www.sagepublications.com.
- Singh J. (2005). The Power of Empowerment: Energizing and Unleashing Human Potential. Journal of Management and Labour Studies [Internet]. [diunduh 2015 September 17]; 30(4). Tersedia pada: www.sagepublications.com.
- Skerratt S, Steiner A. (2013). Working with communities-of-place: Complexities of empowerment. Journal of Local

- Ekonomi [Internet]. [diunduh 2015 September 17]; 28(3). Tersedia pada www.sagepublications.com.
- Soekanto S. (2002). Sosiologi. Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekartawi, A. Soeharjo, L. Dillon dan J. Hardaker. (1986). Ilmu Usahatani dan Penelitian untuk Pengembangan Petani Kecil. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Suparno S. (2000). Membangun Kompetensi Belajar. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional.
- Sumardjo. (1999). Transformasi Model Penyuluhan Menuju Pengembangan Kemandirian Petani: Kasus di Provinsi Jawa Barat. Disertasi. Bogor: Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Sumardjo. (2010). Penyuluhan Menuju Pengembangan Kapital Manusia dan Kapital Sosial dalam mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Orasi Ilmiah Guru Besar IPB. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Sumardjo, A. Firmansyah, L. Dharmawan, YP. Wulandari. (2014). Implementasi CSR melalui Program Pengembangan Masyarakat: Inovasi Pemberdayaan Masyarakat PT. Pertamina EP. Asset 3 Subang Field. Bogor: CARE Institut Pertanian Bogor.
- Sumardjo. (2014). Model Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Konflik Sosial pada Perkebunan Kelapa Sawit di Propinsi Riau. Artikel [Internet]. [diunduh 2014 Oktober 23]. Tersedia pada: <http://www.care.ipb.ac.id>.
- Sumardjo. (2015). Analisis Pengelolaan Potensi Konflik di Masyarakat Sekitar Tambang Berbasis Ketahanan Pangan dan Energi (Kasus Tambang Emas di Jawa Barat dan Tambang Batubara di Kalimantan Selatan). Artikel [Internet]. [diunduh 2015 November 3]. Tersedia pada: <http://www.care.ipb.ac.id>.
- Tetreault D. (2015). Social Environmental Mining Conflicts in Mexico. Latin American Perspectives [Internet]. [diunduh 2015 Oktober 31]; 42(5). Tersedia pada: www.sagepublications.com.
- Triantafillou P & Nielsen MR. (2001). Policing empowerment: the making of capable subjects. History of the Human Sciences Journal [Internet]. [diunduh 2015 September 18]; 14(2). Tersedia pada: www.sagepublications.com.
- White RA. (2004). Is 'Empowerment' the Answer? Current Theory and Research on Development Communication. The International Journal for Communication Studies [Internet]. [diunduh 2014 Oktober 22]; 66(1). Tersedia pada: www.sagepublications.com.

KONSTRUKSI SOSIAL TENTANG PENDIDIKAN PADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN SIDOARJO

SOCIAL CONSTRUCTION OF EDUCATION AMONG THE FAMILY HOPE PROGRAM BENEFICIARY FAMILY IN SIDOARJO REGENCY

Munari Kustanto

Bidang Litbang dan Data, Bappeda Kabupaten Sidoarjo
Jl. Sultan Agung No. 13 Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
E-mail: munarikustanto@gmail.com

Diterima: 28 Februari 2019, Direvisi: 12 Juli 2019; Disetujui: 31 Juli 2019

Abstrak

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki kewajiban untuk mendorong dan memotivasi anaknya untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang ditentukan. Pemahaman KPM PKH tentang pendidikan dengan demikian menarik untuk dikupas. Pemahaman tersebut berkontribusi terhadap salah satu tujuan utama PKH yaitu pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi sosial tentang pendidikan pada KPM PKH di Kabupaten Sidoarjo. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian dilakukan pada dua kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki karakteristik berbeda yaitu Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Krembung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan yang ditentukan secara *snowball*. Adapun data sekunder berupa dokumen terkait pelaksanaan PKH di Kabupaten Sidoarjo yang berasal dari TKPKD Kabupaten Sidoarjo, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dan UPPKH Kabupaten Sidoarjo. Analisa dilakukan dengan menggunakan teori Konstruksi Sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi tentang pendidikan pada KPM PKH terjadi dalam tiga momen yaitu eksternalisasi pengetahuan orangtua, objektivasi lingkungan sosial, dan internalisasi sebagai hasil sosialisasi internal dan eksternal informan. Tidak terdapat perbedaan konstruksi sosial tentang pendidikan pada KPM PKH di Kecamatan Sidoarjo maupun Kecamatan Krembung. Konstruksi tentang pendidikan terbagi ke dalam empat kategori yaitu : pendidikan sebagai eksistensi sosial, pendidikan sebagai akses ekonomi, pendidikan sebagai jalan mobilitas vertikal, serta pendidikan sebagai warisan.

Kata Kunci: konstruksi sosial, makna, pendidikan, program keluarga harapan.

Abstract

Beneficiary Families (KPM) The Hope Family Program (PKH) has an obligation to encourage and motivate their children to continue their education to the specified level. An understanding of KPM PKH on education is thus interesting to explore. This comprehension contributes to PKH's main goal, which is fulfilling basic needs in education sector. This study purpose to know the social construction of education at PKH KPM in Sidoarjo Regency. Using a qualitative approach, the study was conducted in two sub-districts in Sidoarjo Regency which had different characteristics, that is Sidoarjo District and Krembung District. Primary data in this study were obtained through observation and interviews with informants who determined by snowball. And the secondary data was form a documents that is related to the implementation of PKH in Sidoarjo Regency from the TKPKD in Sidoarjo Regency, the Social Service of Sidoarjo Regency and UPPKH Sidoarjo Regency. The analysis already done using the theory of Social Construction from Peter L. Berger and Thomas Luckmann. The results showed that the construction of education at PKH KPM occurred in three moments, which is externalization of parental knowledge, social environment objectivation, and internalization as a result of informants' internal and external socialization. There is no difference in social construction about education at PKH KPM in Sidoarjo District and Krembung District.

The construction of education is divided into four categories: education as social existence, education as economic access, education as a way of vertical mobility, and education as inheritance.

Keywords: *social construction, meaning, education, the hope family program.*

PENDAHULUAN

Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 menunjukkan dalam kurun waktu tahun 2013-2015 tercatat setidaknya 24 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang tidak memenuhi persyaratan (*non eligible*). Dalam hal ini dikarenakan sang anak tidak mau melanjutkan sekolah. Detail perkembangan KPM PKH di Kabupaten Sidoarjo yang tidak memenuhi persyaratan karena alasan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Perkembangan KPM PKH (*Non Eligible*) di Kabupaten Sidoarjo Karena Anak Tidak Melanjutkan Sekolah Tahun 2013-2015

No	Tahun	Jumlah Non Eligible	Lokasi (Kecamatan)
1	2013	4	Krembung, Candi, Tarik, Sukodono
2	2014	13	Krembung, Tarik, Prambon, Jabon, Sidoarjo, Sedati, Buduran, Taman, Tanggulangin
3	2015	7	Krembung, Prambon

Sumber : UPPKH Kabupaten Sidoarjo, 2016

Memperhatikan tabel 1 di atas, terlihat ada dua hal yang menarik. *Pertama*, selama tiga tahun berturut-turut Kecamatan Krembung tercatat memiliki KPM PKH *non eligible*. *Kedua*, tercatatnya KPM PKH Kecamatan Sidoarjo yang notabene merupakan Ibukota Kabupaten.

Fenomena KPM PKH *non eligible* dengan penyebab anak tidak mau melanjutkan sekolah tidak hanya terjadi di Kabupaten

Sidoarjo. KPM PKH di Kota Probolinggo juga mengalami kondisi yang sama. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo, tercatat sebanyak 13 anak penerima PKH yang putus sekolah (“Sudah Terima PKH, Tiga Belas Siswa Penerima di Probolinggo Putus Sekolah,” 2015 akses 25 Maret 2016).

Di Kabupaten Ciamis juga ditemukan fenomena yang sama. Hasil penyisiran yang dilakukan petugas PKH Kabupaten Ciamis menemukan sebanyak 700 pelajar penerima PKH di 27 Kecamatan mengalami putus sekolah. Pelajar yang tidak melanjutkan pendidikan tersebut tersebar di semua jenjang pendidikan (Nurhandoko, 2017 akses 2 Mei 2017).

Beberapa fenomena yang berhasil dihimpun tersebut tentunya menyisakan pertanyaan. PKH sebagai sebuah program yang diharapkan mampu memberikan akses kepada masyarakat miskin terhadap pendidikan ternyata ditemukan fenomena yang cukup menarik. Sebuah fenomena yang kemungkinan juga terjadi didaerah lain.

Secara internasional PKH dikenal sebagai program *Conditional Cash Transfers (CCT)* atau program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB). Awalnya program ini dilaksanakan di Meksiko dengan nama *Progressa* pada pertengahan tahun 1990. Program ini kemudian berganti nama menjadi *Oportunidades*. Sejak itu, program BTB seperti ini mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, pengambil kebijakan, peneliti dan akademisi. Program ini terus dikembangkan, dipelajari, dievaluasi, dan kemudian direplikasi ke banyak program

serupa di berbagai negara (Nainggolan, 2012).

Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam program. Penerima PKH dalam pelaksanaan program lebih dikenal dengan KPM. Kepesertaan dalam PKH diharapkan akan membawa perbaikan pendapatan dan kualitas anak-anak dari KPM tersebut.

PKH mengemban misi pemberdayaan dan dirancang untuk memperkuat KPM agar mampu keluar dari kemiskinan melalui promosi kesehatan dan mendorong anak bersekolah. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan adalah dipilihnya ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak KPM sebagai penerima bantuan. Memperhatikan peran penting penerima bantuan dalam memperbaiki kualitas pendidikan khususnya pada anak-anak, tentu menjadi menarik ketika ditemukan fenomena anak-anak KPM yang tidak mau melanjutkan sekolah.

Konstruksi sosial yang dimiliki KPM PKH tentang pendidikan diharapkan mampu menjelaskan fenomena tersebut. Pemahaman atau pemaknaan mereka tentang pendidikan bagi anak-anaknya menentukan tindakan mereka dalam memotivasi dan mendorong anaknya untuk terus melanjutkan sekolah.

Keberadaan PKH telah menarik perhatian banyak pihak untuk mempelajarinya. Telah cukup banyak studi yang menjadikan PKH sebagai fokus pembahasan. Utamanya berkaitan dengan implementasi PKH dan dampaknya terhadap peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan penerimanya.

Salah satunya adalah penelitian dengan judul Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam Peningkatan Kesehatan dan Pendidikan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Umbulharjo Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan efektifitas PKH dalam meningkatkan kesehatan ibu hamil dan pendidikan anak bagi keluarga RTSM/KSM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kecamatan Umbulharjo merupakan salah satu program yang efektif dalam meningkatkan kesehatan ibu hamil, kesehatan keluarga RTSM/KSM, mengurangi beban hidup, dan meningkatkan pendidikan (Putri, 2014). Berbeda dengan studi yang menekankan pada aspek PKH sebagai sebuah program, maka penelitian kali ini cenderung menekankan pada pemahaman KPM mengenai pendidikan.

Studi lain yang lebih memfokuskan pada implementasi PKH di bidang pendidikan adalah Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Kecamatan Tamalate Kota Makasar. Studi yang dilakukan Syamsir (2014) bertujuan untuk (i) mendeskripsikan bagaimana proses implementasi PKH; (ii) menganalisis isi kebijakan serta lingkungan kebijakan dalam implementasi PKH; dan (iii) mengetahui hasil PKH terhadap kelompok sasaran. Hasil penelitian tersebut menggarisbawahi bahwa pendamping selalu mengadakan pertemuan kelompok secara rutin, pemutakhiran data, verifikasi komitmen dan pembayaran bantuan peserta PKH. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PKH bidang pendidikan sudah berjalan dengan baik, walaupun masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya.

Adapun studi yang berkaitan dengan konstruksi sosial masyarakat miskin tentang pendidikan juga telah ada. Penelitian Konstruksi Masyarakat Dusun Pelas, Desa Lamongrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan Tentang Pendidikan salah satunya. Penelitian

tersebut berusaha mengetahui konstruksi sosial masyarakat miskin tentang pendidikan. Hasil penelitian menemukan bahwa bagi masyarakat dusun Pelas pendidikan merupakan suatu jembatan yang membantu untuk kehidupan yang lebih baik. Pendidikan sebagai alat pemutus kemiskinan, di mana adanya kemiskinan tidak menjadikan orang tua berhenti menyekolahkan anak, akan tetapi mereka tetap berupaya dalam membiayai sekolah demi masa depan anak (Noviandari & Warsono, 2015). Berbeda dengan penelitian tersebut yang menggunakan masyarakat miskin sebagai subjek penelitian. Penelitian kali ini menjadikan KPM sebagai subjek penelitian.

Selanjutnya studi yang mengambil Kabupaten Sidoarjo sebagai lokasi penelitian juga cukup banyak. Salah satunya adalah penelitian dengan judul Proses Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Keterampilan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan proses pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa secara umum proses pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan yang diadakan oleh BPMPKB Kabupaten Sidoarjo sudah dikatakan sangat baik, namun akan lebih baik lagi jika pada aspek pemungkinan dan aspek penyokongan yang masih terdapat sedikit kekurangan dapat diperbaiki. Pada aspek pemungkinan berkaitan dengan peserta pelatihan keterampilan yang masih mencakup sebagian lapisan masyarakat sedangkan pada aspek pemeliharaan berkaitan dengan kegiatan yang berkesinambungan tiap tahun (Kurniawan & Tauran, 2015).

Terdapat pula studi yang membahas

secara spesifik PKH di Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Meskipun demikian fokus penelitiannya lebih kepada mengidentifikasi pola pemanfaatan PKH di kalangan RTSM dan kinerja lembaga yang terlibat PKH. Penelitian berjudul Program Keluarga Harapan tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pola pemanfaatan PKH di kalangan RTSM mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan RTSM, meningkatnya kualitas kesehatan ibu dan balita, dan tak ada anak putus sekolah lagi. Kinerja lembaga yang terkait sangat membantu suasana yang kondusif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin (Irsalina, 2011). Kondisi tersebut berbeda dengan hasil evaluasi UPPKH Tahun 2016, di mana Kecamatan Krembung menunjukkan fenomena sebaliknya.

Meski kedua penelitian terakhir telah menjadikan Kabupaten Sidoarjo dan Kecamatan Krembung sebagai lokasi penelitian. Keduanya belum memfokuskan perhatian pada konstruksi sosial yang dimiliki oleh penerima PKH atau KPM. Selain itu, penelitian kali ini juga menggunakan Kecamatan Sidoarjo sebagai salah satu lokasi penelitian.

Adapun penelitian yang memfokuskan pada pembahasan konstruksi tentang pendidikan pada KPM PKH masih belum ditemukan. Penelitian ini berusaha mengisi ruang yang masih kosong dalam upaya memberikan pengetahuan mengenai pemahaman atau pemaknaan tentang pendidikan pada KPM PKH di Kabupaten Sidoarjo. Terlebih lagi Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya sebagai salah satu pusat pendidikan di Jawa Timur menjadi pertimbangan tersendiri. Posisi Kabupaten Sidoarjo yang strategis tentu ditunjang sarana prasarana pendidikan yang relatif baik. Memperhatikan berbagai hal di atas maka penelitian Konstruksi Sosial tentang

Pendidikan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sidoarjo menjadi penting untuk dilaksanakan.

Penelitian ini berupaya mengetahui konstruksi sosial tentang pendidikan pada kalangan KPM PKH di Kabupaten Sidoarjo. Adapun masalah yang diteliti adalah bagaimana proses pembentukan konstruksi sosial tentang pendidikan pada KPM PKH. Selanjutnya adalah bagaimana pemahaman KPM PKH tentang pendidikan.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian kali ini selain menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang sosial, khususnya dalam studi mengenai kemiskinan dan pendidikan melalui pendekatan konstruksi sosial. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan guna meningkatkan manfaat PKH khususnya di bidang pendidikan.

Dalam penelitian ini teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann digunakan sebagai pisau analisis dalam upaya memahami tafsir KPM PKH tentang pendidikan. Pemikiran tentang konstruksi sosial tertuang dalam karya mereka *The Social Construction of Reality* yang dipublikasikan pada tahun 1966. Buku ini merupakan salah satu upaya Berger untuk menegaskan kembali persoalan mendasar dalam sosiologi pengetahuan (Riyanto, 2009). Melalui sosiologi pengetahuan inilah Berger meninjau hubungan antara individu dan masyarakat.

Salah satu usaha yang dilakukannya untuk mengembalikan hakikat dan peranan sosiologi pengetahuan adalah mendefinisikan kembali pengertian "kenyataan" dan "pengetahuan" dalam konteks sosial. Berger mendefinisikan "kenyataan" sebagai suatu kualitas yang

terdapat dalam fenomena-fenomena yang kita akui sebagai memiliki keberadaan (*being*) yang tidak tergantung pada kehendak kita sendiri. Sedangkan "pengetahuan" didefinisikan sebagai kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik yang spesifik (Berger & Luckmann, 2013).

Kenyataan dalam hal ini merupakan fakta sosial yang bersifat eksternal, umum dan mempunyai kekuatan memaksa kesadaran masing-masing individu. Kenyataan tersebut dengan demikian tetap ada, terlepas dari individu tersebut suka atau tidak suka. Adapun pengetahuan itu sendiri merupakan kenyataan yang hadir dalam kesadaran individu. Pengetahuan dengan demikian merupakan kenyataan yang bersifat subjektif (Samuel, 2012).

Pemahaman sosiologis mengenai "kenyataan" dan "pengetahuan" oleh Berger diposisikan berada di tengah-tengah antara pemahaman orang awam dan pemahaman filsuf (Berger & Luckmann, 2013). Sosiolog menurutnya harus lebih kritis daripada orang awam, namun kekritisannya tersebut tidak sampai mengarah pada usaha pencarian kesahihan pernyataan tersebut mengenai dunia. Sosiolog bertugas mencari keterkaitan antara kondisi sosial dengan kenyataan dan pengetahuan. Guna memahami realitas yang unik dari masyarakat secara memadai, maka perlu diketahui proses bagaimana kenyataan ini terbentuk (Samuel, 2012).

Anak-anak KPM PKH yang tidak lagi mau melanjutkan sekolah merupakan sebuah realitas unik di masyarakat. PKH sebagai program yang diharapkan dapat mendorong anak-anak peserta PKH untuk terus bersekolah, ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam upaya memahami realitas tersebut, maka penelitian ini berusaha mengetahui proses pembentukannya.

Sosiologi pengetahuan harus digunakan untuk menekuni segala sesuatu yang dianggap sebagai "pengetahuan" dalam masyarakat. Sosiologi pengetahuan dengan demikian harus berupaya membongkar apa yang "diketahui" oleh masyarakat sebagai "kenyataan" dalam kehidupan mereka sehari-hari yang tentunya tidak teoritis maupun prateoritis (Berger & Luckmann, 2013).

Sosiologi pengetahuan memusatkan perhatian pada pengetahuan akal sehat, bukan mengenai gagasan. Pengetahuan ini merupakan jaringan makna, di mana tanpa ini tidak ada satu masyarakatpun yang dapat hidup. Sosiologi pengetahuan karenanya mengarahkan perhatiannya pada pembentukan kenyataan oleh masyarakat.

Realitas anak-anak KPM PKH yang tidak mau melanjutkan sekolah tentu tidak terlepas dari pengetahuan orangtua mereka tentang pendidikan. Makna yang mereka miliki tentang pendidikan inilah yang menjadikan perbedaan para penerima bantuan PKH dalam memotivasi anak-anak mereka untuk bersekolah. Proses pembentukan pengetahuan KPM PKH tentang pendidikan menjadi penting dalam upaya mengupas realitas yang ada.

Menurut Berger dan Luckmann, seseorang dalam kehidupannya mengembangkan sikap repetitif yang dikenal dengan "pembiasaan" atau habituasasi (Berger & Luckmann, 2013).

Pembiasaan ini selanjutnya menimbulkan kesan padakesadaran manusia bahwa hal tersebut merupakan hukum yang tetap. Pembiasaan ini pula yang menjadikan manusia dapat secara otomatis mengantisipasi suatu situasi tertentu. Tindakan-tindakan yang dijalankan pada tahap ini telah mengalami objektivasi dalam kesadaran mereka yang mempersepsikannya. Sebuah lembaga (institusi) pada momen ini

berdiri sebagai realitas objektif dalam kesadaran manusia dan juga di luarnya (Riyanto, 2009).

Berger kemudian menjelaskan bahwa dialektika antara manusia dengan masyarakat terjadi dalam tiga momentum yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Realitas pada dasarnya merupakan hasil konstruksi manusia melalui momentum eksternalisasi dan objektivasi. Realitas sosial tersebut selanjutnya melalui momentum internalisasi berbalik membentuk manusia. Dalam proses dialektis seperti itulah realitas sosial muncul, bertahan dan berubah (Samuel, 2012).

Dalam eksternalisasi terjadi proses pencurahan pikiran dan kreativitas manusia ke dalam dunia. Berger mendefinisikan eksternalisasi sebagai suatu pencurahan kedirian manusia secara terus-menerus ke dalam dunia baik dalam aktivitas fisis maupun mental (Berger, 1991). Proses ini dilakukan karena tidak ada manusia yang terlahir sempurna dan memiliki dunianya. Kelahiran seorang manusia dalam hidup bukanlah kelahiran dunianya. Tahun-tahun pertama dan seterusnya ketika hidup, disitulah manusia akan membentuk dunianya.

Dapat dikatakan pula bahwa manusia memproduksi dunianya, yang kemudian menjadi sesuatu yang berada di luar sana. Pada momen inilah dunia manusia memperoleh realitas objektif, berupa produk-produk budaya yang material ataupun non-material. Namun objektivitas yang sama juga mencirikan unsur-unsur non-material di kebudayaan. Objektivitas masyarakat dalam hal ini mencakup semua unsur pembentuknya. Lembaga-lembaga, peran-peran, dan identitas-identitas itu eksis sebagai fenomena nyata secara objektif dalam dunia sosial, meskipun semua itu merupakan produksi manusia (Berger, 1991).

Momentum selanjutnya adalah internalisasi yang merupakan penyerapan ke dalam kesadaran dunia yang sudah terobjektivasi ke dalam kesadaran subjektif. Dalam hal ini manusia telah dapat memaknai dan mengekspresikan makna-makna kehidupannya tersebut. Melalui eksternalisasi, masyarakat merupakan produk manusia. Melalui objektivasi, masyarakat menjadi suatu realita sui generis, unik. Sedangkan melalui internalisasi, manusia merupakan produk masyarakat (Berger, 1991).

Pemahaman tentang pendidikan KPM PKH di Kabupaten Sidoarjo tentu tidak terlepas dari ketiga momentum di atas. Bagaimana pendidikan bagi anak-anak di kalangan KPM PKH menjadi sebuah realitas objektif sekaligus menjadi realitas subjektif menjadi menarik untuk diulas. Melalui eksternalisasi dan objektivasi, KPM PKH menangkap pendidikan bagi anak-anak mereka sebagai sebuah realitas objektif. Selanjutnya melalui internalisasi yang dialami KPM PKH, pendidikan bagi anak-anak mereka berganti menjadi sebuah realitas subjektif. Keduanya tentunya sangat menentukan tindakan KPM PKH dalam memotivasi anak-anak mereka untuk dapat terus melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

METODE

Penelitian ini berusaha memahami realitas sosial tentang pendidikan pada KPM PKH, maka pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini. Terdapat setidaknya dua inti dalam penelitian kualitatif, *pertama* menggunakan pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subjek kajiannya. *Kedua*, kritis terhadap strategi dan metode positivisme (Denzin & Lincoln, 2009).

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi yaitu Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Krembung pada bulan Pebruari-Mei 2017. Kedua lokasi ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda

baik dari aspek skala prioritas penanggulangan kemiskinan, demografi, hingga fasilitas pendidikan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah KPM PKH dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Ibu atau perempuan dewasa yang menerima bantuan PKH di Kabupaten Sidoarjo. Pembatasan ini didasarkan pada ketentuan bahwa yang berhak menerima bantuan PKH adalah ibu;
2. Memiliki anak, baik yang masih bersekolah maupun yang sudah tidak mau melanjutkan sekolah sebagaimana diatur dalam pedoman umum pelaksanaan PKH;
3. Kepesertaan dalam PKH minimal lima tahun. Jangka waktu ini ditetapkan agar kemanfaatan program benar-benar sudah dirasakan oleh penerima PKH;
4. Jenis pekerjaan penerima PKH. Dalam hal ini terbagi dalam dua kategori yaitu penerima PKH yang hanya sebagai ibu rumah tangga dan penerima PKH yang bekerja di sektor informal.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *snowball*, di mana peneliti terlebih dahulu melakukan pendekatan informal kepada Koordinator UPPKH Kabupaten Sidoarjo. Setelah menjelaskan tujuan penelitian ini sekaligus kebutuhan datanya, peneliti kemudian meminta pertolongan untuk menunjuk satu orang yang bertugas sebagai pendamping di lokasi penelitian yaitu Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Krembung. Koordinator UPPKH Kabupaten Sidoarjo memberi kontak pendamping PKH Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Krembung sekaligus data hasil validasi kepesertaan PKH tahun 2016.

Pendamping selanjutnya memberikan sejumlah nama KPM PKH di beberapa Desa/Kelurahan pada Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Krembung yang sesuai dengan kriteria informan. Sejumlah nama yang diberikan

tersebut menjadi titik awal peneliti menelusuri informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Melalui penelusuran yang dilakukan, penulis melakukan wawancara terhadap sejumlah informan. Data mengalami titik jenuh ketika peneliti telah melakukan wawancara terhadap 14 orang informan. Dengan demikian untuk penelitian ini peneliti menggunakan data hasil wawancara terhadap 14 orang informan tersebut.

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang didapat dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini analisis data bergerak dalam lingkaran spiral yang terdiri dari manajemen data, pembacaan, klasifikasi, dan penyajian (Creswell, 2015). Hasil wawancara yang telah ditranskrip selanjutnya diorganisir menjadi satuan-satuan teks yang sesuai ke dalam komputer sebagai database. Hasil transkrip tersebut dimaknai sebagai satu kesatuan, dengan membuat memo atau catatan dibagian tepi transkrip.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Sosial KPM PKH tentang Pendidikan : Antara Pendidikan dan Kebutuhan Ekonomi

Konstruksi sosial merupakan suatu proses pemaknaan yang dilakukan setiap individu terhadap lingkungan dan aspek di luar dirinya. Dalam hal ini merupakan makna subjektif dari realitas objektif di dalam kesadaran orang yang menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Berger dan Luckmann melihat hubungan antara manusia dan masyarakat lebih mengedepankan pandangan dialektik.

Menurut mereka, manusia di satu sisi menciptakan masyarakat dan di sisi lain masyarakat juga menciptakan manusia. Dengan kata lain masyarakat menurut Berger harus dipahami sebagai realitas objektif sekaligus realitas subjektif. Dialektika antara

manusia dengan masyarakat dijelaskan oleh Berger terjadi dalam tiga momentum yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.

Eksternalisasi merupakan tahap permulaan sebuah konstruksi sosial dapat dipahami. Pengetahuan orangtua tentang arti penting pendidikan merupakan momentum awal yang membentuk konstruksi sosial informan. Orangtua informan dalam hal ini memandang pendidikan belum menjadi sebuah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.

Pengetahuan mengenai pendidikan yang demikian tentunya tidak dapat dilepaskan dari kondisi kehidupan sosial ekonomi orangtua informan. Umumnya mereka juga memiliki latar belakang kondisi sosial ekonomi yang tidak jauh berbeda dengan informan saat ini. Sebuah kondisi yang memaksa para orangtua informan untuk menentukan prioritas pemenuhan kebutuhan keluarga. Pemenuhan urusan perut tentunya lebih diprioritaskan oleh para orangtua informan daripada pendidikan.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan. Ibu ATI menjelaskan bahwa kondisi orangtuanya pada waktu itu juga tidak jauh lebih baik dari dirinya saat ini.

“...Inggih nek e saged inggih hehehe luwih dukur ngoten, tapi yok nopo nggih, keadaane ekonomine ngoten nggih cukup nggih niku wau...” (Iya kalo bisa ya hehehe lebih tinggi begitu, tapi bagaimana lagi ya, keadaan ekonominya seperti itu, ya cukup ya itu tadi...).

Kondisi yang demikian menjadikan informan tidak berani menuntut kepada orangtuanya untuk dapat meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Keadaan yang tidak jauh berbeda juga dikonfirmasi oleh informan lain, ibu TUT. Menurutnya tidak melanjutkan sekolah

merupakan upaya bagi keluarga untuk dapat menyambung hidup.

"...lha pripun malih mas, bapak tukang becak ibu mboten nyambut damel, yugone katah. Kulo kelas 2 SMP medal mas, soale isin mboten saged mbayar sekolah...". (lha bagaimana lagi mas, bapak seorang tukang becak, ibu tidak bekerja, anak banyak. Saya kelas 2 SMP keluar mas, soalnya malu tidak dapat membayar sekolah)

Informan juga menjelaskan bahwa selepas itu dirinya bekerja serabutan agar dapat membantu orangtua. Salah satunya adalah membantu membiayai adik-adiknya agar tetap bersekolah. Bahkan agar kebutuhan dasar anaknya dapat terpenuhi, ada salah satu adik informan yang dirawat oleh saudara dari orangtuanya.

Kondisi demikian ini merupakan pilihan paling logis pada saat itu. Sebagaimana keluarga miskin pada umumnya, keterbatasan ekonomi semakin diperparah oleh jumlah anggota keluarga yang cukup banyak. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan pangan lebih diprioritaskan daripada kebutuhan yang lain, apalagi pendidikan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Hikmah, Quraisy, dan Arifin (2016) salah satu faktor yang menyebabkan anak putus sekolah adalah ketidakmampuan orangtua membiayai pendidikan anak. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan jenis pekerjaan yang digeluti orangtua informan. Aristin (2015) juga mengemukakan pandangan serupa, bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab anak putus sekolah adalah jenis pekerjaan orangtua dan jumlah keluarga yang harus ditanggung.

Jenis pekerjaan orangtua informan yang umumnya menghasilkan pendapatan terbatas, tidak sebanding dengan jumlah anggota

keluarga yang harus ditanggung menjadikan mereka fokus dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Kondisi ini juga diungkap oleh Budi dan Sidemen (2014) bahwa kesibukan orangtua dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga menjadi salah satu kendala dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat miskin. Kondisi ini pula yang menyebabkan pemahaman sebagian masyarakat miskin akan pentingnya pendidikan sangat kurang.

Pengetahuan orangtua informan tentang pendidikan pada saat itu terlihat sebagai hasil pencurahan pikiran dan kreativitas mereka dalam menghadapi kondisi sosial ekonomi yang kurang menguntungkan. Pendidikan tidak ditempatkan sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi orangtua informan. Tindakan tersebut merupakan wujud dari *common sense* yang dimiliki orangtua informan maupun masyarakat miskin pada umumnya.

Dalam perjalanan kehidupan masyarakat miskin, pada umumnya pengetahuan tersebut kemudian terakumulasi menjadi sebuah *stock of knowledge*. Hal ini terbukti manakala orangtua informan dihadapkan pada pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Pendidikan tidak menjadi sebuah prioritas untuk dipenuhi oleh mereka. Kondisi kehidupan menuntut mereka untuk memilih langkah *safety first* dalam kehidupan keluarganya.

Pengetahuan orangtua informan tentang pendidikan yang demikian secara bersamaan menjadi sebuah realitas objektif. Tindakan yang mereka pilih untuk tidak mengutamakan pendidikan anak-anaknya merupakan sebuah kebenaran. Tindakan tersebut telah menjadi hal yang umum dilakukan oleh keluarga miskin.

Salah satu informan mengkonfirmasi pengetahuan orangtua mereka mengenai tindakan tersebut. Hal ini sebagaimana terlihat

dari penjelasan yang disampaikan ibu KAH berikut ini.

“...Boten anu mas, boten diandalaken... menawi bapak kulo riyen boten enten andalan kok, eh sekolah ngkok yok opo kedadeane ngkok, boten wonten...” (Tidak anu mas, tidak diandalkan...kalau bapak saya dulu tidak ada andalan kok, eh sekolahkah nanti bagaimana kejadiannya nanti,tidak ada)

Informan juga menambahkan bahwa kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh keluarganya. Bagian sebagian besar keluarga seperti informan, pendidikan belum menjadi sebuah prioritas. Upaya membesarkan anak dari segi fisik menjadi prioritas utama orangtua informan dan orangtua lain yang kondisinya tidak berbeda dengan informan.

Kondisi di atas memperlihatkan bahwa eksternalisasi pengetahuan orangtua mengenai pendidikan telah berada pada tahap objektivasi. Kurang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sudah tidak lagi berada dalam tataran pengetahuan subjektif orangtua informan. Kurang pentingnya pendidikan bagi anak-anak telah menjadi sebuah realitas objektif yang umumnya dianut masyarakat miskin. Tindakan yang diambil orangtua informan dengan demikian menjadi sebuah wacana yang niscaya untuk dilawan.

Pada sisi lain, negara sebagai salah satu struktur sosial yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat berupaya mengubah pengetahuan masyarakat miskin tersebut. Sebagai sebuah struktur sosial yang juga merupakan hasil eksternalisasi masyarakat dan telah terobjektivasi, negara tentunya memiliki kekuatan untuk melawan wacana yang terlanjur dimiliki masyarakat miskin. Berbeda dengan masyarakat miskin, negara memiliki fungsi

terhadap kontrol sosial yang lebih baik. Hal ini didukung oleh berbagai pranata sosial yang dimiliki guna mendukung tugas negara.

Keberadaan PKH sebagai salah satu program untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat miskin merupakan salah satu wujud dari optimalisasi pranata sosial yang dimiliki negara. Dalam upaya menjalankan program tersebut mendapat dukungan bukan hanya secara kelembagaan, tetapi juga secara perundang-undangan. Selain peraturan yang menjadi haluan dalam pelaksanaan PKH, negara juga menerbitkan pedoman pelaksanaan PKH.

Dengan demikian pada tahap objektivasi terdapat dua realitas sosial yang berada dalam kehidupan masyarakat miskin. Realitas pertama merupakan hasil eksternalisasi pengetahuan mereka tentang pendidikan. Realitas yang lain adalah hasil eksternalisasi pengetahuan negara tentang pentingnya pendidikan. Tahap internalisasi dengan demikian akan memegang peranan yang penting dalam membentuk pengetahuan informan tentang pendidikan.

Pendidikan sebagai sebuah realitas objektif baik yang dihasilkan oleh masyarakat miskin maupun yang dibentuk oleh negara selanjutnya akan mewarnai pengetahuan informan tentang pendidikan untuk anak-anak mereka. Pewarnaan pengetahuan tersebut terjadi melalui tahapan internalisasi. Sebagaimana diketahui bahwa internalisasi berlangsung seumur hidup dan terbagi menjadi sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder.

Sosialisasi primer dialami oleh informan manakala orangtua mereka menjelaskan keputusan untuk tidak memprioritaskan pendidikan. Sebagaimana telah disampaikan oleh informan sebelumnya, bahwa kondisi sosial ekonomi yang mereka hadapi pada waktu itu merupakan penghalang untuk dapat

mengakses pendidikan dengan lebih baik. Internalisasi pengetahuan orangtua informan tentang pendidikan kepada informan dipahami sebagai sebuah kebenaran.

Pada proses sosialisasi internal ini, informan menyerap pengetahuan orangtua mereka sebagai sebuah kebenaran. Hal tersebut dapat dilihat dari respon para informan ketika orangtua mereka tidak terlalu memprioritaskan pendidikan. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, informan cenderung menerima keputusan itu sebagai sebuah keputusan yang tepat. Sehingga dapat menyokong kelangsungan hidup keluarga.

Bahkan tidak jarang mereka selepas putus sekolah merelakan diri untuk bekerja membantu orangtua dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Tindakan ini sebagaimana dikemukakan oleh ibu TUT selepas dirinya berhenti sekolah di jenjang kelas 2 SMP.

Seiring dengan perkembangan waktu, maka interaksi informan tidak hanya berkutat pada keluarga dan lingkungan sekitar. Interaksi informan yang semakin meluas tentu juga disertai dengan terjadinya proses sosialisasi nilai dan informasi yang lain. Pada tahap inilah terjadi proses sosialisasi sekunder.

Banyak informasi dan pengetahuan yang tidak jarang berbeda dengan pengetahuan orangtua mereka mewarnai *stock of knowledge* informan. Termasuk pula dalam hal ini adalah pengetahuan mereka tentang arti penting pendidikan, khususnya bagi anak-anak mereka. Dengan demikian memungkinkan informan memiliki pengetahuan yang berbeda dengan orangtuanya.

Informasi yang disampaikan ibu ITA dapat dijadikan salah satu bukti bahwa sosialisasi sekunder turut mewarnai pengetahuan informan. Sejak meninggalkan kampung

halaman setelah putus sekolah, informan sempat merantau ke Kota Jakarta selama empat tahun. Setelah dari Kota Jakarta, informan melanjutkan petualangannya di Kota Surabaya selama tiga tahun sebelum kemudian ke Kota Malang selama hampir empat tahun.

“...Kulo elek-elek o masio boten anu kulo petualangan mas. Pendidikan niku boten rumongso kumpul boten kados kumpul tiyang sing boten berpengalaman boten perlu. Sing lebih baik berpengalaman, dapat digunakan, bermanfaat, berfaedah, ngono sistem kulo...” (Saya jelek-jelek gini meskipun tidak anu, saya petualangan mas. Pendidikan itu tidak merasa kumpul tidak seperti kumpul orang yang tidak berpengalaman tidak perlu. Yang lebih berpengalaman, dapat digunakan, bermanfaat, berfaedah, begitu sistem saya)

Berdasarkan interaksi-interaksi tersebut informan memiliki pengetahuan tentang pendidikan bagi anak-anak seperti saat ini.

Sosialisasi sekunder yang turut mewarnai pengetahuan informan akan pendidikan bagi anak-anak juga tidak dapat lepas dari peran para pendamping PKH. Bahkan dapat dikatakan sosialisasi sekunder yang dilakukan oleh para pendamping ini memegang peranan penting bagi pembentukan pengetahuan informan. Para pendamping PKH mempunyai tugas cukup mulia untuk membangun kesadaran KPM khususnya ibu tentang pendidikan anak-anak mereka.

Direkrut oleh Kementerian Sosial melalui seleksi secara terbuka, pendamping PKH menjadi kepanjangan tangan negara guna memastikan wacana pentingnya pendidikan yang diusung dalam program diterima oleh KPM. Tentang hal ini sebagaimana disampaikan ibu LIS berikut ini.

“...memotivasi, memotivasi untuk penerima

manfaatnya, KPM nya itu untuk lebih giat memberikan motivasi kepada anaknya untuk rajin sekolah...”

“Dia harus memenuhi semua komitmen di dalam persyaratan PKH, diantaranya kan harus rajin sekolah”

Para pendamping pula yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan pemanfaatan bantuan PKH.

Peran penting pendamping PKH juga diakui oleh seluruh informan. Mereka umumnya sangat berterimakasih kepada para pendamping yang tidak pernah lelah memotivasi dan mengingatkan KPM. Banyak pula pendamping PKH yang kemudian dianggap oleh informan sebagai saudara.

Keberhasilan pendamping PKH dalam menginternalisasi arti penting pendidikan kepada KPM berdampak pada menurunnya angka putus sekolah. Hal ini sejalan dengan temuan Juaranas (2017), di mana pendamping PKH menjadi salah satu dari empat faktor yang mendukung keberhasilan PKH mengatasi kasus putus sekolah. Nataya dan Supriyadi (2017) menambahkan bahwa pendamping PKH juga memiliki peran dalam meningkatkan keberdayaan KPM.

Pada tahapan inilah terjadi internalisasi terhadap arti penting pendidikan. Para informan memiliki pengetahuan tentang pendidikan yang berbeda dengan pengetahuan orangtua mereka. Pengetahuan informan dengan demikian sangat didominasi oleh proses interaksi sosial yang mereka jalani. Sosialisasi sekunder nampak lebih dominan dalam membentuk pengetahuan informan mengenai pendidikan bagi anak-anak.

Memperhatikan gambaran di atas, konstruksi KPM PKH tentang pendidikan tidak dapat dilepaskan dari pertarungan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pemenuhan pendidikan.

Membicarakan pendidikan sebagai sebuah realitas sosial, maka tidak dapat dilepaskan dari kegelisahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Keberadaan PKH sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat miskin tanpa mengganggu pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka.

Bergelut Antara Eksistensi Sosial dan Warisan : Potret Pemahaman Penerima KPM PKH Tentang Pendidikan

Dalam Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang RTRW Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Krembung masuk dalam kawasan pedesaan sedangkan Kecamatan Sidoarjo masuk kawasan perkotaan. Kecamatan Krembung menjadi pusat pertumbuhan bagi kawasan permukiman, konservasi geologi, industri, pertanian dan perdagangan skala regional. Adapun Kecamatan Sidoarjo berfungsi sebagai pusat pemerintahan, permukiman, perdagangan dan jasa. Kondisi tersebut menjadi keduanya memiliki karakteristik yang berbeda.

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap informan di dua lokasi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman KPM PKH tentang pendidikan terbagi dalam empat konstruksi pemahaman sebagai berikut : (a) pendidikan sebagai eksistensi sosial; (b) pendidikan sebagai akses ekonomi; (c) pendidikan sebagai jalan melakukan mobilitas vertikal; dan (d) pendidikan sebagai warisan.

Pendidikan Sebagai Eksistensi Sosial

KPM PKH yang memaknai pendidikan sebagai eksistensi sosial cenderung menganggap pendidikan sebagai sebuah kunci untuk dapat diterima di masyarakat. KPM PKH dengan konstruksi sosial seperti ini mendorong anak-anaknya melanjutkan pendidikan sebagai upaya untuk menghindari adanya sanksi sosial

dari masyarakat. Rasa malu dengan masyarakat sekitar menjadi alasan utama penerima PKH mendorong anak mereka untuk melanjutkan pendidikan. Terlebih jika tingkat pendidikan anak penerima PKH lebih rendah dibanding dengan rata-rata pendidikan masyarakat disekitarnya.

Sanksi sosial berupa cibiran maupun gunjingan dari tetangga karena tingkat pendidikan yang rendah menjadi alasan utama penerima PKH mendorong anaknya untuk bersekolah. Konstruksi sosial tersebut sebagaimana tergambar dalam penuturan ibu BUY tentang pendidikan:

"...pendidikan niku penting...Isin lho mas aku, anakku gak sekolah. Soale kene iku kabeh sekolah..." (...pendidikan itu penting...Malu lho mas saya, anakku tidak sekolah. Karena di sini itu semua sekolah...).

Terlihat bahwa upaya untuk mendorong anaknya untuk kembali melanjutkan pendidikan lebih dikarenakan rasa malu dengan tetangga sekitar. Berdasarkan informasi yang diperoleh, anak ibu BUY hanya menamatkan pendidikan SD.

Pengetahuan ibu WAT mengenai pendidikan juga tidak jauh berbeda. Meskipun memiliki semangat untuk menyekolahkan anak-anaknya, tetapi dalam menempuh pendidikan lebih memperhatikan aspek sosial. Pendidikan dipahami hanya sebatas agar anak-anaknya memiliki pendidikan yang sama dengan teman-temannya. Hal sebagaimana terlihat dari penuturan ibu WAT berikut ini.

"...Pokok e sekolahe podo kalih koncone, perkoro mangan gak podo rodok rodok gak popo, pokok e sekolah kan ngoten" (Pokoknya sekolahnya sama seperti temannya, masalah makan tidak sama agak-agak tidak mengapa, pokoknya sekolah kan begitu)

"...Masi kulo boten sekolah boten nopo-nopo, pokok e anak kulo sekolah. Pokoke podo-podo kalih koncone..." (Meskipun saya tidak sekolah tidak apa-apa, pokoknya anak saya sekolah. Pokoknya sama-sama dengan temannya)

Penerima PKH ini juga menekankan upaya untuk menyekolahkan anak-anak agar memperoleh pendidikan yang lebih baik dibanding dirinya. Adapun ukuran lebih baik adalah sebagaimana pendidikan yang ditempuh teman-teman anaknya. Dengan demikian diharapkan anak-anak memiliki kepercayaan diri dalam hidup bermasyarakat karena memiliki jenjang pendidikan yang sama dengan mereka.

KPM yang memiliki konstruksi tentang pendidikan seperti ini cenderung menjadikan lingkungan sosial sebagai standar. Upaya mereka memotivasi anak untuk sekolah tidak lebih untuk menghindari sanksi sosial dari masyarakat sekitar. Manakala tidak terdapat sanksi sosial tersebut, maka niscaya KPM juga tidak terlalu mempermasalahkan pendidikan anak mereka.

Pendidikan Sebagai Akses Ekonomi

Pemahaman selanjutnya yang dimiliki KPM PKH tentang pendidikan adalah sebagai akses ekonomi. Mereka yang memiliki konstruksi sosial seperti ini cenderung mendorong anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan hanya demi mendapatkan pekerjaan. Fokus mereka hanya sebatas bagaimana anak mereka memperoleh pekerjaan. Pendidikan yang rendah mereka yakini sebagai penyebab sulitnya mendapatkan pekerjaan.

Konstruksi sosial seperti ini dapat ditemui pada pemahaman ibu KAR yang merupakan penduduk asli Desa Sumpat. Pendidikan menurut informan tidak lebih sebagai upaya untuk mendapatkan pekerjaan. Tentang pemahaman tersebut dapat dilihat dari

penuturan ibu KAR berikut ini.

“...Yok opo isok ku aku ngkok cik iso oleh ijazah...Wong anakku cik e duwe ijazah SMA mas, nek gak ngono angel golek penggawean...” (Bagaimana usaha saya nanti agar bisa mendapatkan ijazah... Supaya anak saya memiliki ijazah SMA mas, kalau tidak begitu susah mencari pekerjaan).

Konstruksi sosial tentang pendidikan sebagai modal untuk mendapatkan pekerjaan tidak hanya ditemui di Kecamatan Sidoarjo. Ibu KAR yang berasal dari Kecamatan Krembung juga memiliki konstruksi sosial yang sama. Informan menuturkan bahwa dengan tingkat pendidikan yang rendah maka seseorang akan mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Informan membandingkan dengan kondisinya, berbekal ijazah SMP ternyata sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

“...Penting nggih, nek entos ibukne biyen SMP anak e sampak dukur hehe...” (Penting ya, kalau bisa ibunya dulu SMP anaknya sampai tinggi hehehe).

Informan juga menambahkan penjelasan terkait masalah tersebut.

“...Nggih wong sak niki nyambut gawe kadang SMP wis boten saged, STM ae kadang iwuh nggihan, nek gak boten pinter arek e yok nopo...” (Ya sekarang bekerja menggunakan kadang SMP sudah tidak bisa, STM aja kadang susah juga, kalau tidak pinter anaknya bagaimana)

Pemahaman yang hampir sama juga dapat diketahui dari pendapat ibu IKA. Informan memahami pendidikan sebagai modal untuk mencari pekerjaan. Ibu rumah tangga dengan dua anak yang sedang menempuh pendidikan jenjang SMP dan MI menjadikan pekerjaan sebagai tujuan akhir pendidikan. *“...Pendidikan*

nggih niku pak...damel nyambut gawe nggih...” (pendidikan ya itu pak...untuk bekerja ya).

KPM PKH dengan pemaknaan pendidikan sebagai modal dalam mencari kerja, cenderung mendorong anak mereka bersekolah hanya sebatas untuk mendapat pekerjaan. Mereka tidak terlalu mempermasalahkan apakah pekerjaan tersebut dapat menjadikan kehidupan anaknya lebih baik. Mereka yang memiliki konstruksi sosial seperti ini juga tidak terlalu mempermasalahkan jenjang pendidikan yang harus diselesaikan anaknya. Selama tingkat pendidikan tersebut sudah dapat digunakan untuk memiliki sebuah pekerjaan, maka KPM PKH tidak terlalu memperdulikannya.

Hal ini berbeda dengan pendapat Rasyid (2015) yang memandang pendidikan sebagai sebuah investasi bagi masa depan. Tujuannya adalah menciptakan manusia yang unggul melalui penentuan arah dan substansi pendidikan yang jelas hingga redesain pendidikan di Indonesia. KPM PKH yang memiliki pemahaman pendidikan sebagai akses ekonomi hanya memandang pendidikan sebatas alat untuk dapat terlibat dalam ekonomi.

Dikarenakan pendidikan belum dianggap sebagai sebuah investasi bagi masa depan anak-anak mereka, maka KPM PKH yang memiliki pemahaman ini tidak memikirkan arah maupun substansi pendidikan bagi anak-anak mereka. Selama pendidikan itu dapat digunakan untuk memperoleh pekerjaan maka cukup sudah. Mereka masih memegang asumsi bahwa pendidikan menjadi syarat untuk memperoleh pekerjaan. Andaikan jenjang pendidikan anak tersebut sama dengan informan, maka hal tersebut juga tidak terlalu dipermasalahkan selama dapat digunakan untuk mengakses pekerjaan yang ada.

Pendidikan Sebagai Jalan Mobilitas Vertikal

KPM PKH yang memahami pendidikan sebagai jalan untuk melakukan mobilitas vertikal cenderung memahami pendidikan sebagai sebuah bekal yang harus dimiliki untuk dapat keluar dari kemiskinan. KPM PKH dengan konstruksi sosial seperti ini mendorong anak-anaknya untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi dari mereka. Tujuan utamanya agar anak-anak tidak memiliki nasib seperti orangtuanya. Mereka menginginkan anak-anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik, tidak bergelut dengan kemiskinan seperti kondisi yang sedang dialami sekarang ini.

KPM PKH dengan konstruksi ini pada umumnya menganggap kehidupan yang sedang mereka jalani sekarang sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan yang mereka rengkuh. Pengalaman mereka mengenai sulitnya menempuh pendidikan menjadi pelajaran berharga untuk berupaya menghindarkan anak-anak mereka dari belenggu kemiskinan. Pendidikan dipercaya sebagai salah satu cara yang paling relevan untuk memutus belenggu kemiskinan.

Konstruksi pendidikan seperti ini dapat ditemui pada pemahaman ibu SEN yang mulai kecil hingga sekarang menetap di Jati Utara. Ibu tiga anak ini menganggap pendidikan penting sebagai salah satu cara untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Informan sangat menyadari bahwa kehidupan yang sedang dijalannya ini tidak terlepas dari rendahnya pendidikan yang diperoleh.

Informan sangat berharap anak-anak mereka dapat memiliki kehidupan yang lebih baik dari kedua orangtuanya. Pemahaman seperti ini dapat dilihat dari penuturan ibu SEN berikut ini.

“...Mangakaken kulo niki bade dateng yugo-yugo niki sagedto angsal pendidikan ingkang sae boten kados bapak e ngoten

lho...” (Oleh karena itu saya ini ingin ke anak-anak ini agar bisa mendapatkan pendidikan yang baik, tidak seperti bapaknya begitu lho)

“...Mboten mpun dados kados tiyang sepahe kalih lah...” (Jangan sampai menjadi seperti kedua orangtuanya lah)

Konstruksi sosial seperti ini juga dapat dilihat dari pemahaman ibu ATI. Informan dan suami berharap anak mereka memiliki pendidikan yang jauh lebih baik dari orangtuanya. Melalui pendidikan yang lebih baik inilah mereka berhadapan derajat kehidupan anaknya juga dapat terangkat. Hal tersebut sebagaimana disampaikan ibu ATI berikut ini : *“...Wong namine derajat. Derajate lare mboten semerap...”* (Namanya juga derajat. Derajatnya anak tidak tahu).

Informan dan suami juga tidak sependapat jika ada orang-orang yang memandang remeh masalah pendidikan. Tidak sedikit yang berpandangan bahwa orang miskin tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Padahal menurut informan melalui pendidikan inilah perubahan kondisi dapat diwujudkan.

“...Pikiran pikiran sing pendek niku nggih a? nek sing pikiran panjang oalah sekolah o mene-mene bek e derajatmu iso dukur kan mestine lak nggih ngoten sih...” (pikiran-pikiran yang pendek itu ya kan? Jika yang berfikir panjang oalah sekolah saja besok-besok mungkin derajatmu bisa tinggi kan seharusnya kan ya seperti itu sih)

Pemahaman tentang pendidikan sebagai modal untuk melakukan mobilitas vertikal juga dimiliki oleh ibu NUR. Berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan penjahit dengan seorang suami pekerja serabutan, kehidupan keluarga ini relative sama dengan keluarga miskin pada umumnya. Hal ini sebagaimana penuturan ibu NUR berikut ini.

"...Nggih pun boten kados kulo kalih bapak e mas. Pingine lebih apik teko wong tuwane, ben gak koyok ngene terus..." (Ya supaya tidak seperti saya dan bapaknya mas. Inginnya lebih baik dari orangtuanya, biar tidak seperti begini terus).

Pendapat senada juga disampaikan ibu TUT. Pendidikan dianggap sebagai salah satu modal bagi anak untuk dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik.

"...Kulo sekolahaken ngoten tok. Cik masa depane larene sik boten koyok ibu e ngeten hehehe...Nggih hehe sik boten sami kalih tiyang sepah e mas, cik e eco. Ibu e ngeten, bapak e ngeten hehe. Sik saged niki..." (Saya sekolahkan begitu aja. Supaya masa depan anaknya supaya tidak seperti ibunya begini hehehe... Ya hehe supaya tidak sama dengan orangtuanya mas, supaya enak. Ibunya begini, bapaknya begini hehe. Supaya dapat ini)

Selanjutnya pemaknaan yang sama tentang pendidikan juga dapat ditemukan pada penjelasan ibu KAH. Pendidikan menurut informan merupakan bekal yang harus dipegang agar memiliki kehidupan yang lebih baik. Hal ini sebagaimana disampaikan ibu KAH berikut ini.

"...memange kulo boten gadah, ojok sampik koyok bapak dadi wong bodoh nak. Masio bapak buruh macul, pean yo kudu iso paling gak metu teko SMA..." (Memang saya miskin, jangan sampai seperti bapak menjadi orang bodoh nak. Meskipun bapak buruh tani, kamu ya harus dapat paling tidak lulus dari SMA)

"...Ojo sing wis koyok bapak biyen ga iso sekolah nak, sampeyan ae sekolah sing temen..." (Jangan yang sudah seperti bapak dulu tidak dapat sekolah nak, kamu saja sekolah yang benar).

Ibu WAT menjadi informan selanjutnya yang memiliki konstruksi pendidikan sebagai modal untuk dapat keluar dari kemiskinan. Informan sangat menyakini bahwa melalui pendidikan yang lebih baik, maka anak keturunannya tentu akan memiliki kehidupan yang lebih baik darinya. Hal ini sebagaimana disampaikan informan berikut ini.

"...Mene-mene sumongkok o rumah tangga nek duwe anak ojok sampe sekolah, gak sekolah koyok aku..." (Besok-besok kalau sudah berumah tangga, jika memiliki anak jangan sampai sekolah, tidak sekolah seperti saya).

Pemaknaan pendidikan sebagai modal untuk mobilitas vertikal cenderung mendorong anak bersekolah demi memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Peran pendidikan sebagai jalan untuk melakukan mobilitas vertikal juga dikemukakan oleh Mukhlas dan Muslih (2009). Menurut mereka pendidikan tidak sebatas meningkatkan wawasan dan kemampuan individu. Pendidikan juga dapat menjadi jalur untuk meningkatkan strata sosial seseorang.

Mereka yang memiliki pendidikan lebih tinggi maka lebih berpeluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Melalui perbaikan penghasilan maka mereka juga berpeluang untuk meningkatkan status sosial mereka di masyarakat.

Para KPM PKH yang memiliki konstruksi seperti ini menyadari bahwa rendahnya pendidikan menyebabkan mereka terbelenggu kemiskinan. Pendidikan dipercaya KPM PKH sebagai salah satu bekal yang dibutuhkan anak mereka untuk memutus belenggu kemiskinan yang sudah menjerat keluarganya. Diharapkan anak-anak dapat meningkatkan status sosial (derajat) mereka di masyarakat melalui

pendidikan yang lebih tinggi dari orangtuanya.

Pendidikan Sebagai Warisan

KPM PKH yang memiliki pemahaman seperti ini cenderung mempunyai spirit yang tinggi dalam mendorong pendidikan bagi anak-anak mereka. Memperhatikan kondisi yang sedang mereka jalani saat ini, di mana masih bergelut dengan kemiskinan dan kekurangan. Pendidikan menjadi satu-satunya harapan yang dapat mereka berikan kepada anak keturunannya sebagai warisan.

Ibu NAH termasuk informan yang memiliki konstruksi sosial tentang pendidikan seperti ini. Menyadari keterbatasan materiil yang dimiliki, maka informan dan suami bertekad memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka.

“...Nek prinsip kulo, masi boten duwe dunyo pokok e saged madosaken yugane ngoten...nek kulo...” (Kalau prinsip saya, walaupun tidak mempunyai harta pokoknya dapat mencarikan – pendidikan – anaknya begitu...kalau saya...).

Tekad untuk dapat memberikan pendidikan terbaik bukan tanpa alasan. Informan menyadari hanya pendidikan terbaik yang dapat dipersembahkan kepada anak-anak mereka.

Adapun pendidikan seberapapun rendahnya tentu akan memberikan manfaat yang sangat berguna bagi kehidupan mereka kelak.

“...Ilmu niku penting, nek dunyo iku sak ulan rong ulan kan mpun telas, nek e pendidikan, ilmu nopo, kan larene pados anu kiyambak meniko...” (Ilmu itu penting, kalau dunia itu satu bulan dua bulan kan sudah habis, kalau pendidikan, ilmu apa, kan anaknya mencari anu sendiri begitu).

Tidak akan lekang oleh waktu, maka pendidikan menjadi sebuah peninggalan yang harus diwariskan kepada anak-anaknya.

Hidup dalam keadaan yang pas-pasan ibu ITA juga memiliki kesamaan pemahaman mengenai pendidikan. Memperhatikan kehidupan yang jauh dari cukup, maka satu-satunya bekal yang dapat diwariskan kepada ketiga anaknya adalah pendidikan. Pemahaman seperti itu sebagaimana disampaikan oleh informan sebagai berikut.

“...Nek pendidikan niku saged, tiyang sepuhe goblok tapi nek anak e saged pinter. Tiyang sepuh boten saged nyukani dunyo, bondo, warisane ilmu pengetahuan, kepinteran niku wau mas. Niku sandang pangan sampai tua, sampek saged menurunkan anak cucu, ngoten nek saged niku” (Jika pendidikan itu bisa, orangtuanya goblok tapi kalau anaknya bisa pinter. Orangtuanya tidak dapat memberikan dunia, harta, warisannya ilmu pengetahuan, kepandaian itu tadi mas. Itu sandang pangan hingga tua, hingga dapat menurunkan anak cucu)

Pendidikan dalam hal ini oleh KPM PKH dipandang sebagai bekal untuk menjadi manusia seutuhnya. Syafaruddin (2017) juga mengemukakan pendapat yang serupa, di mana tujuan pembangunan adalah membangun totalitas kemampuan manusia. Dalam hal ini bukan hanya kemampuan sebagai individu tetapi juga kemampuan sebagai anggota masyarakat. Keberadaan pendidikan dengan demikian menjadi sangat penting sebagai salah satu hal yang harus dimiliki oleh keturunan KPM PKH.

Ketidakmampuan KPM PKH dalam memberikan peninggalan berupa materi atau kekayaan, menjadikan mereka berfokus pada pemberian bekal yang tidak kalah penting bagi kehidupan mereka. Pendidikan menjadi satu-satunya bekal yang dapat mereka berikan kepada anak keturunannya. Melalui pendidikan yang baik diharapkan anak KPM PKH dapat sukses menjalani kehidupan.

KPM PKH yang memiliki konstruksi sosial tentang pendidikan sebagai warisan cenderung memprioritaskan kebutuhan pendidikan anak di atas kebutuhan yang lain. Mereka akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka. Keterbatasan ekonomi yang umumnya menjadi penghalang dalam mengakses pendidikan para penerima PKH ternyata tidak menjadi kendala bagi mereka yang memiliki konstruksi sosial ini.

KESIMPULAN

Konstruksi sosial tentang pendidikan pada kalangan KPM PKH di Kabupaten Sidoarjo terbentuk melalui tiga momentum. *Pertama*, eksternalisasi dari pengetahuan orangtua informan tentang pendidikan. *Kedua*, objektivasi dari *stock of knowledge* lingkungan sosial yang terdiri dari masyarakat miskin dan negara. *Ketiga*, internalisasi kepada informan sebagai hasil sosialisasi internal dan eksternal yang dilakukan KPM PKH.

Tidak terdapat perbedaan konstruksi sosial di antara informan yang berasal dari Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Krembung. Perbedaan geografis dan karakteristik wilayah ternyata tidak mempengaruhi konstruksi sosial KPM PKH tentang pendidikan. Setidaknya terdapat empat kategori pemahaman KPM PKH tentang pendidikan baik di Kecamatan Sidoarjo maupun Kecamatan Krembung. *Pertama*, pendidikan dipahami sebagai eksistensi sosial. *Kedua*, pendidikan dipahami sebagai akses ekonomi. *Ketiga*, pendidikan dipahami sebagai jalan mobilitas vertikal. *Keempat*, pendidikan dipahami sebagai warisan.

Dari keempat kategori pemahaman tentang pendidikan, KPM PKH di Kabupaten Sidoarjo cenderung memiliki pemahaman kedua dan ketiga. Pendidikan dalam hal ini lebih banyak dipahami sebagai akses terhadap ekonomi

dengan memperoleh pekerjaan. Melalui pendidikan dan pekerjaan maka anak KPM PKH diharapkan dapat melakukan *mobilitas vertical*, sehingga ke luar dari kemiskinan.

SARAN

Memperhatikan konstruksi KPM PKH tentang pendidikan, maka PKH sebagai sebuah program masih dapat dikembangkan. Dalam hal ini PKH tidak hanya berhenti pada upaya pemberian bantuan kepada KPM. PKH dapat memainkan peran yang lebih besar baik sebagai fasilitator maupun katalisator. Fungsi sebagai fasilitator selama ini telah dijalankan dengan baik melalui pendamping.

Peran selanjutnya yang dapat diambil adalah menjadi katalisator bagi KPM untuk mewujudkan mimpi anak-anak mereka. Salah satunya membuat *link and match* sesuai dengan konstruksi yang cenderung dimiliki KPM. PKH dapat berkolaborasi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk menyediakan informasi lowongan pekerjaan bagi peserta PKH. Kolaborasi dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi juga dapat dilakukan guna memberikan kesempatan kepada peserta PKH untuk menempuh pendidikan tinggi.

Selanjutnya guna mendapatkan konstruksi yang lebih komprehensif, maka perlu dilakukan studi lanjutan guna mengetahui konstruksi sosial anak-anak penerima PKH. Dengan demikian pelaksanaan PKH kedepannya dapat memberikan manfaat bukan hanya kepada orangtua penerima PKH tetapi juga anak-anak penerima PKH.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Emy Susanti, Dra., MA dan Prof. Dr. Bagong Suyanto, Drs., M.Si yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh dedikasi

memberikan dorongan, bimbingan dan saran kepada penulis. Prof. Dr. I.B. Wirawan, Drs., SU dan Dr. Sutinah, Dra., M.S yang telah meluangkan waktu untuk mengkritisi dan memberikan saran bagi penyempurnaan tulisan ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, khususnya Bappeda Kabupaten Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristin, N. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Anak Putus Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Di Kecamatan Bondowoso. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 20(1), 30–36. <https://doi.org/http://journal.um.ac.id/index.php/pendidikan-geografi/article/view/5009>
- Berger, P. L. (1991). *Langit Suci : Agama Sebagai Realitas Sosial*. Penerjemah : Hartono. Jakarta: LP3ES.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (2013). *Tafsir Sosial Atas Kenyataan : Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (10th ed.). Penerjemah : Hasan Basari. Jakarta: LP3ES.
- Budi, E. A., & Sidemen, I. G. (2014). Kendala-Kendala Yang Dihadapi Masyarakat Miskin Dalam Mengakses Pendidikan Formal. *Jurnal Sosiologi*, 15(1), 63–71.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset : Memilih Di Antara Lima Pendekatan* (4th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research* (1st ed.). Penerjemah : Dariyanto, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hikmah, L., Quraisy, H., & Arifin, J. (2016). Kemiskinan dan Putus Sekolah. *Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, IV(2), 164–173. <https://doi.org/10.1002/hlca.19770600336>
- Irsalina, R. (2011). Program Keluarga Harapan: Studi Tentang Peran Program Keluarga Harapan Terhadap Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin di Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Universitas Airlangga.
- Juaranas, A. (2017). Efektivitas Bantuan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Mengatasi Putus Sekolah Siswa Miskin Di Mts Swasta Insan Kesuma Lkmd Kecamatan Namo Rambe. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Keislaman*, 6(1), 189–198. Retrieved from <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jkkp>
- Kurniawan, D. A., & Tauran. (2015). Proses Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Keterampilan Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 3(4), 1–17. Retrieved from <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/11652>
- Mukhlis, M., & Muslih, M. (2009). Peran Sosial Pendidikan Dalam Mobilitas Vertikal Masyarakat Desa. *At Ta'dib*, 4(2), 249–270. Retrieved from <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tadib/article/view/593/530>
- Nainggolan, T. (2012). Program Keluarga Harapan di Indonesia : Dampak Pada Rumah Tangga Sangat Miskin di Tujuh Provinsi (Juneman, Ed.). Jakarta: P3KS Press.
- Nataya, E. J., & N, S. S. (2017). Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Melalui Program Keluarga Harapan Di

- Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. *Jurnal Sosiologi DILEMA*, 32(2), 1–9.
- Noviandari, D., & Warsono. (2015). Konstruksi Masyarakat Dusun Pelas, Desa Lamongrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan Tentang Pendidikan. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 01(03), 210–225.
- Nurhandoko. (2017, April). 700 Pelajar Peserta Program Keluarga Harapan Drop Out. *Pikiran Rakyat*. Retrieved from <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/04/14/700-pelajar-peserta-program-keluarga-harapan-drop-out-398990>
- Putri, D. (2014). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesehatan dan Pendidikan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Umbulharjo Kota Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga.
- Rasyid, H. (2015). Membangun Generasi Melalui Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan. *Pendidikan Anak*, IV(1), 565–581.
- Riyanto, G. (2009). Peter L Berger : Perspektif Metateori Pemikiran. Jakarta: LP3ES.
- Samuel, H. (2012). Peter Berger : Sebuah Pengantar Ringkas. Depok: Kepik.
- Sudah Terima PKH, Tiga Belas Siswa Penerima di Probolinggo Putus Sekolah. (2015, July 2). *Bangsaonline.Com*. Retrieved from <https://www.bangsaonline.com/berita/12347/sudah-terima-pkh-tiga-belas-siswa-penerima-di-probolinggo-putus-sekolah>
- Syafaruddin. (2017). Sekolah Dan Transformasi Budaya Era Globalisasi. *Ijtimaiah*, I(1), 1–13.
- Syamsir, N. (2014). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Kecamatan Tamalate Kota Makasar. Universitas Hasanuddin.

**PROBLEMATIKA PENANGANAN TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK KEKERASAN SEKSUAL SELAMA MENJALANKAN PROSES HUKUM:
KASUS DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

***PROBLEMATICS ON HANDLING CHILDREN OF THE PERPETRATORS
OF SEXUAL VIOLENCE DURING LEGAL PROCEEDINGS:
CASE IN WEST KALIMANTAN PROVINCE***

Nyi R. Irmayani

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III Jakarta Timur
E-mail : irmayani_sa@yahoo.com

Diterima : 29 Juli 2019; Direvisi: 13 September 2019; Disetujui: 23 September 2019

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menginformasikan tentang kondisi dan permasalahan anak pelaku pencabulan atau tindak pidana kejahatan seksual sebelum dan selama menjalankan proses hukum. Proses hukum dimulai dari penangkapan sampai putusan pengadilan. Anak mendapat hak untuk diversi pada setiap tahapan, namun terkendala pada ketersediaan LPKS, dan tanggapan masyarakat terhadap perilaku anak, akhirnya anak dibawah umur harus menjalani proses hukum. Selama menjalankan proses hukum, anak di tahan di Rumah Tahanan (Rutan) atau LP, tetapi ada anak yang ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Latar belakang anak melakukan pencabulan karena seringnya nonton tayangan pornografi dan faktor lingkungan sebaya, yang menjerumuskan anak melakukan pencabulan pada sesama teman sebaya. Kehidupan anak-anak selama dalam sel cukup memprihatinkan, sementara anak di LPKS dapat melanjutkan kehidupannya. Peran LPKS di harapkan dapat meminimalkan dampak pemenjaraan anak. Untuk itu, kajian ini merekomendasikan Optimalisasi Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai lembaga rehabilitasi psikososial bagi anak berkonflik hukum. Meningkatkan peran pendamping ABH menjadi Peksos Koreksional di LPKS dan di LP anak, sehingga anak dapat berkembang optimal.

Kata kunci: anak, pelaku, kekerasan seksual, proses hukum.

Abstract

This study aims to inform about the conditions and problems of child perpetrators of sexual abuse before and during legal proceedings. The legal process starts from arrests to judicial decisions. Children get the right to be diversified at each stage, but are constrained by the availability of LPKS, and the community's response to children's behavior; eventually underage children must undergo a legal process. During the legal process, children are held in detention centers or prisons, but there are children who are placed in the Social Welfare Institution (LPKS). The push factor of sexual abuse is the prequent viewing of pornography shows and peer environmental factors, which plunge the child into sexual abuse with peers. The lives of children in the cell are quite alarming while children at LPKS can continue their lives. The role of LPKS is expected to minimize the impact of child imprisonment. For this reason, this study recommends the Optimization of Child Social Welfare Organizing Institutions (LPKSA) as institutions for psychosocial rehabilitation for children in legal conflict. Increasing the role of ABH facilitators to being Corrective Social Workers in LPKS and in children's LPs so that children can develop optimally.

Keywords: children, perpetrators, sexual violence, legal process.

PENDAHULUAN

Anak pelaku pencabulan atau pelecehan seksual dapat dikategorikan sebagai anak berhadapan dengan hukum, karena perilaku mereka dapat dikategorikan kedalam pelanggaran terhadap norma, hukum dan sosial yang berlaku. Bahkan telah melakukan kejahatan seksual, apabila disertai dengan tindakan kriminal lainnya seperti pembunuhan pada korbannya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat, kasus pelanggaran hak anak pada 2018 mencapai 4.885 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan pada 2017 yang mencapai 4.579 kasus.

Ketua KPAI Susanto merinci, dari jumlah itu kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) masih menduduki urutan pertama, yaitu mencapai 1.434 kasus, disusul kasus terkait keluarga dan pekerja sosial alternatif mencapai 857 kasus. Selanjutnya, pornografi dan siber mencapai 679 kasus, pendidikan berjumlah 451 kasus, kesehatan dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza) mencapai 364 kasus, trafficking dan eksploitasi anak mencapai 329 kasus.

Kasus ABH didominasi kasus kekerasan seksual. Laki-laki mendominasi sebagai pelaku dibandingkan anak perempuan. Sepanjang tahun 2018, pelaku laki-laki berjumlah 103, sedangkan pelaku berjenis kelamin perempuan, berjumlah 58 anak. (KPAI, 2019)

Kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak belum tentu sepenuhnya karena keinginan dari anak sendiri. Bentuk-bentuk yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan seksual, mulai dari kasus pelecehan, sodomi, pencabulan, bahkan pemerkosaan kepada anak-anak dibawah umur. Idealnya tindakan kejahatan yang dilakukan anak dapat disebut

sebagai anak yang telah berbuat kesalahan bukan sebagai seorang kriminal, melainkan kesalahan dalam bertindak yang sebenarnya memerlukan rehabilitasi bukan pemenjaraan. Anak memerlukan perlindungan hukum dan sosial.

Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), dimaknai sebagai seseorang anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, kemudian disangka atau dituduh sebagai pelaku tindak pidana dan atau yang menjadi korban atau saksi tindak pidana meski melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya tindak pidana. Jika dilihat dari usianya, maka tindakan atau perilaku pencabulan yang dilakukan tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak kriminal saja tetapi sebagai anak yang telah melakukan kesalahan dalam bertindak (*doing wrong # crime*) atau sebagai korban.

Perilaku pencabulan yang dilakukan oleh anak belum tentu sepenuhnya karena keinginan dari anak sendiri, karena anak yang melakukan tindak kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Pada dasarnya anak belum mengerti sepenuhnya bahwa apa yang dilakukannya adalah pelanggaran, maka anak usia 12 tahun pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, belum dapat sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya pelanggaran, sebagaimana amanat UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 21. Masih lemahnya kemampuan anak dan remaja dalam “menghitung resiko” dan “mengendalikan impuls” akibat proses biologis di otak dan tubuhnya. Namun dengan kemajuan teknologi, dimana akses internet atau media

sosial sebagai bagian dari kehidupan anak-anak, dapat memberi dampak negative maupun positif. Dampak negative dari kemajuan teknologi ini, diantaranya kemudahan anak-anak usia dibawah umur mengakses situs-situs pornografi. Lemahnya pengawasan dan minimnya kegiatan positif dari anak-anak putus sekolah, maka mengakses situs pornografi menjadi salah satu pengisi waktu luang mereka. Masih lemahnya kemampuan Anak dan remaja dalam “menghitung resiko” dan “mengendalikan impuls” akibat proses biologis di otak dan tubuhnya, maka anak cenderung meniru apa yang dilihatnya dan akhirnya mempraktekkan kepada anak-anak sebayanya.

Sebenarnya *gadget* tidak hanya menimbulkan dampak negatif bagi anak, karena juga ada dampak positif, diantaranya dalam pola pikir anak yaitu mampu membantu anak dalam mengatur kecepatan bermainnya, mengolah strategi dalam permainan, dan membantu meningkatkan kemampuan otak kanan anak selama dalam pengawasan yang baik. Akan tetapi dibalik kelebihan tersebut lebih dominan pada dampak negatif yang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Salah satunya adalah radiasi dalam gadget yang dapat merusak jaringan syaraf dan otak anak bila anak sering menggunakan gadget. Selain itu, juga dapat menurunkan daya aktif anak dan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan orang lain. Anak menjadi lebih individual dengan zona nyamannya bersama gadget sehingga kurang memiliki sikap peduli terhadap teman bahkan orang lain (Chusna, 2017).

Persoalannya adalah pandangan masyarakat terhadap pelaku anak yang melakukan pelecehan seksual, sebagai perbuatan asusila, yang perlu dihukum bahkan ditolak keberadaannya di lingkungan mereka, bukan sebagai korban dari lingkungan atau salah asuhan, Akhirnya

tuntutan bagi anak untuk diproses hukum lewat sistem peradilan. Menempatkan anak dalam status hukum tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Padahal proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Hasil penelitian Puslitbangkesos tentang Anak berkonflik hukum menemukan bahwa penjara justru seringkali membuat anak menambah ilmu kejahatan (Kurniasari, dkk, 2007). Belum lagi stigma yang akan disandang anak, akan mempengaruhi kehidupan anak. lembaga pemasyarakatan bukan lingkungan yang kondusif bagi anak, meskipun anak ditempatkan di blok khusus anak yang berada di depan dekat dengan petugas. Namun masih memberikan celah untuk adanya interaksi dengan narapidana dewasa, hal ini tentu akan berdampak pada kondisi psikis anak. Selain itu adanya kekhawatiran anak mengalami kekerasan atau memanfaatkan anak sebagai “kurir” narkoba, yang akhirnya menjadi residivis dan kembali harus berhadapan dengan hukum. Apalagi jika anak selama dalam penjara minim akan pembinaan, maka dikhawatirkan anak mengalami hambatan dalam perkembangannya. Anak sebagai asset bangsa tidak memiliki tujuan untuk modal bagi kehidupannya di masa depan. Dengan demikian menempatkan anak dalam status hukum seharusnya diminimalkan, dan jika terlanjur menjalani proses hukum maka selayaknya mendapatkan pembinaan psikososial dan spiritual secara intensif baik selama menjalankan proses hukum maupun sesudahnya.

Kenyataan di lapangan, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, masih terdapat tahanan dan napi anak yang ditempatkan di luar

LPKA. Alasan yang ditemui adalah:

- Tahanan anak yang sedang menunggu proses penetapan pengadilan dititipkan di Rutan karena di kabupaten tidak ada LPKS atau LPAS.
- Napi anak ditempatkan di Lapas karena permintaan orang tua atau keluarga agar bisa sering berkunjung, dekat dengan rumah orang tuanya.

Berikut daftar tahanan dan napi anak yang ditempatkan di Rutan dan Lapas se Kalimantan Barat bulan Agustus 2019.

Penempatan ABH dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan Dewasa dengan berbagai latar belakang pertimbangannya memunculkan permasalahan yang potensial mendatangkan turunan permasalahan besar lainnya. Permasalahan utama ABH yang ditempatkan/dititipkan di LP/Rutan Dewasa adalah terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar anak (Triati, 2018).

Pemenuhan hak-hak anak hanya sebatas kebutuhan makanan, air bersih, pelayanan kesehatan. Belum ada program pengembangan yang dapat mengembangkan minat dan bakat anak untuk mengisi waktu penahanan. Pola pembinaan masih disamakan dengan pola pembinaan terhadap tahanan dewasa (Irmayani, 2018).

Sebenarnya anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan baik secara hukum maupun sosial. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), jika perilaku anak yang diduga melakukan tindak pidana, formal Terbitnya UU-SPPA sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memberikan Perlindungan bagi pelaku, korban dan saksi tindak pidana berusia anak-anak. Pada ayat (2) huruf a dan huruf b anak-anak dibawah umur yang diduga menjadi pelaku tindak kriminal, maka penegak hukum wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (*restorative Justice*) dan Diversi (pengalihan kasus),

Tabel 1. Data Tahanan dan Napi Anak di Lapas dan Rutan Per Agustus 2019

No	Satker	Tahanan Anak			Napi		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Lapas Kelas II A Pontianak	0	0	0	0	0	0
2	Lapas Kelas II B Ketapang	4	0	4	5	0	5
3	Lapas Kelas II B Singkawang	6	0	6	5	0	5
4	Lapas Kelas II B Sintang	3	0	3	8	1	9
5	Lapas Perempuan Kelas II A Pontianak	0	0	0	0	0	0
6	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Sungai Raya	3	0	3	25	0	25
7	Rutan Kelas II A Pontianak	13	0	13	1	0	1
8	Rutan Kelas II B Bengkayang	1	0	1	3	0	3
9	Rutan Kelas II B Landak	1	0	1	3	0	3
10	Rutan Kelas II B Mempawah	0	0	0	2	0	2
11	Rutan Kelas II B Putussibau	0	0	0	1	0	1
12	Rutan Kelas II B Sambas	6	0	6	1	0	1
13	Rutan Kelas II B Sanggau	5	0	5	1	0	1
		42	0	42	55	1	56

Sumber: Ditjen PAS, Kementerian Hukum dan HAM, 2019

bahkan Diskresi (penghentian kasus). Penerapan *diversi* dan *restorative justice* sudah seharusnya lebih diutamakan bagi anak pelaku tindak pidana sekalipun mereka melakukan kejahatan seksual dan bukan menekankan pada pemberian hukuman pidana.

Tindakan *diversi* dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun pembina lembaga pemasyarakatan. Penerapan *diversi* di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif (*negative effect*) keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Hal ini dilaksanakan dengan harapan anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual dapat memperbaiki diri dan selanjutnya dibina oleh pihak yang berwenang agar kedepannya anak tersebut bisa menjadi lebih baik. UU SPPA secara tegas, mengamanatkan bahwa pada anak yang berusia dibawah 12 tahun, tidak memiliki kewajiban untuk menempati Penjara. Proses *diversi*, dan *restorative justice*, dapat dilakukan jika tindakan yang dilakukan mendapatkan ancaman dibawah 7 tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Bahkan proses *diversi* ini dapat dilakukan saat anak berada pada proses penyidikan, penuntutan atau sebelum persidangan. (UU SPPPA pasal 7), sehingga anak terhindar dari penahanan dan pemenjaraan. Berbeda halnya pada anak yang berusia diatas 12 tahun, tindakannya diancam lebih dari 7 tahun dan berupa pengulangan, maka anak akan menjalankan proses hukum. Kecuali anak yang telah melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka anak harus diajukan ke sidang Anak.

Proses *Diversi* ini, sangat melindungi anak dari perampasan hak-hak anak, karena bertujuan agar anak mencapai perdamaian antara korban dan Anak Pelaku, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dan perampasan kemerdekaan,

mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan tanggungjawab terhadap Anak. Dengan demikian anak akan terbebas dari proses pemenjaraan dan penahanan.

Apabila anak pelaku pencabulan masuk proses hukum, maka anak harus melalui serangkaian proses, mulai dari penangkapan, penyidikan dan penyelidikan, penuntutan sampai akhirnya persidangan. Bentuk putusan yang diterima anak dapat berupa kembali ke orang tua, mendapatkan rehabilitasi pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS, atau diputus pidana penjara sebagai seorang narapidana anak. Tentu saja proses pemidanaan anak sangat tidak diharapkan, karena setidaknya akan mempengaruhi pada kehidupan anak selanjutnya. Meski anak diputus untuk mendapatkan pembinaan dari lembaga sosial namun anak sudah terlanjur menjadi penghuni rumah tahanan, dengan berbagai pengalaman dan kehidupan selama dalam sel tahanan. Penahanan anak, bisa di Rumah Tahanan (Rutan) khusus anak, atau Rutan dewasa, jika wilayah hukumnya tidak terdapat Rutan anak, atau di ruang tahanan kantor Kepolisian setempat. Anak akan menjalankan penahanan minimal selama 20 hari berada di sel tahanan. Kondisi tersebut tentunya akan sangat mempengaruhi perkembangan psikologis anak.

Masih adanya anak-anak berada dalam proses hukum yang selanjutnya mendapatkan vonis penjara sebagai narapidana anak, tentunya berlawanan dengan semangat bahwa pemenjaraan anak sebagai “*last resort*”, dan pergeseran paradigma dalam hukum pidana tentang keadilan dari *retributive Justice* ke *Restorative Justice* dan *Diversi*. Berdasarkan hal tersebut, maka melalui tulisan ini akan dipaparkan anak-anak pelaku kejahatan seksual, yang menjalankan proses hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap anak-anak yang berada di Rutan, dan LPKS. Kasus yang akan dibahas, berjumlah 4 (lima), meliputi anak-anak yang berada di LPKS dan di Penjara Anak (LPKA) serta di Rumah Tahanan (Rutan di Kabupaten Sambas dan Singkawang serta LPKS dan LPKA di Kota Pontianak).

Data yang dikumpulkan meliputi latar belakang anak melakukan kejahatan seksual, dengan penekanan bahwa sebenarnya mereka adalah korban. Selain itu kondisi anak selama menjalankan proses hukum, sampai mendapatkan vonis untuk mendapatkan pembinaan dalam penjara, dan anak yang mendapatkan putusan untuk direhabilitasi di LPKS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan anak-anak dalam penjara, baik di Rumah Tahanan (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan sesudah melalui proses hukum yang panjang, sangat tidak dikehendaki anak. Berdasarkan hasil kajian cepat ABH (Kurniasari, dkk, 2017) menunjukkan bahwa hampir 90% anak menyesali atas segala perbuatannya. Sejumlah 92.6% anak-anak dalam LP menyatakan tidak senang berada dalam penjara. Perasaan “rindu”, teringat akan orang tua dan kehidupan keluarga mulai mendominasi anak. Meski saat sebelumnya, anak lebih banyak berada di luar rumah, namun terbatasnya kebebasan anak telah menimbulkan perasaan rindu terhadap suasana rumah. Saat anak berada dalam sel sebagai tahanan anak, baik di Rutan atau di Polsek mereka harus merasakan berada dalam kamar sempit, dibatasi dengan jeruji besi dan relasi sosial terbatas dengan sesama tahanan, bahkan mungkin dengan sesama tahanan dewasa. Berbeda halnya dengan anak yang ditempatkan di LPKS, anak

masih tetap melanjutkan sekolah, termasuk mengikuti pembinaan dan bergaul dengan anak asuh lainnya di lembaga tersebut. Meski sebelumnya anak sudah merasakan penahanan minimal selama 15 hari dan jumlah hari sampai anak menjalani persidangan sampai 150 hari. Kondisi tersebut, setidaknya akan mempengaruhi kondisi psikologis anak, dan memerlukan penanganan sosial psikologis mereka.

Berikut 4 (empat) kasus anak yang mengalami proses hukum, dan saat ini berada di dalam Rutan dan LP, serta anak yang mendapatkan rehabilitasi psikososial di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS). Melengkapi kasus ini akan diuraikan latar belakang anak melakukan pencabulan, sampai menghadapi proses hukum yang harus dijalani anak, serta gambaran tentang kondisi anak selama dalam Rutan, Penjara dan LPKS. Berikut 4 (empat) kasus dimaksud :

1. Temuan Kasus

Kasus 1: Orang tua korban menuntut anak di penjara.

A (11 tahun) kelas 5 SD, Disela-sela menunggu guru mengaji anak melakukan pencabulan pada teman seusianya. Akibat sering nonton film porno bersama temannya, menimbulkan keinginan untuk mempraktekannya. Ia membaringkan korban, dan mulai menggesek-gesekkan penis ke vagina korban. A mengancam korban untuk tidak menceritakan perilakunya kepada orang lain, namun korban bercerita pada ibunya. Ibu korban melaporkan perilaku A kepada aparat kepolisian setempat. Setelah laporan tersebut, ternyata diketahui bahwa banyak anak-anak di lingkungannya yang telah dilecehkan oleh A.

Mengingat pelaku masih dibawah

umur, maka aparat setempat mengajukan penyelesaian secara musyawarah (*restorative*). Namun ternyata orang tua korban tidak menyetujui penyelesaian secara musyawarah dan menginginkan anak (pelaku) untuk menjalankan proses hukum. Sementara ibu pelaku (A) bersikeras menolak atas tuduhan tersebut. Kondisi tersebut semakin menyulut kemarahan masyarakat dan menuntut anak di proses hukum. Setelah itu anak masuk ke rumah tahanan Polres setempat, dan sampai pada putusan sidang untuk memperoleh pembinaan di LPKS selama 9 bulan. LPKS yang ditempati anak berupa panti asuhan, didampingi oleh seorang pekerja sosial yang memiliki kepedulian terhadap kehidupan anak.

Selama di rumah tahanan Polres setempat, anak tidak dapat bersekolah, kesehariannya hanya diisi dengan membersihkan kamar mandi, ‘disuruh-suruh’ atau berada dalam sel, tanpa ada pembinaan apapun. Namun setelah berada di LPKS, anak dapat melanjutkan sekolahnya ia belajar mengaji, bergaul bersama anak asuh lainnya. Untuk mendukung kebutuhan anak, maka orangtua memiliki insiatif untuk membantu biaya sebesar Rp 1.000.000,- per bulan. Dalam hal ini anak tetap dapat menjalankan kegiatan sebagaimana anak-anak seusianya.

Kasus 2 : Di tahan karena “ajakan teman”.

B, (14 tahun), putus sekolah, (SD, kelas 4), B lebih banyak menghabiskan waktunya dengan “nongkrong” bersama teman. Tidak jarang sambil mabuk-mabukan. Suatu saat ia mengikuti ajakan teman ke danau. Disana sudah ada salah satu temannya sedang bersetubuh dengan teman perempuan (P). Kemudian ia diajak temannya untuk ikut bergabung. Selang beberapa hari korban (P,

15 tahun) dan orang tuanya, melaporkan ke kepolisian setempat dan menuntut pelaku di hukum seberat-beratnya. Akhirnya semua pelaku berhasil ditangkap dan anak menjalani proses hukum. Awal menjalani proses hukum, anak ditempatkan di Rumah tahanan dewasa. Selama di rumah tahanan, ia lebih banyak berada di sel, tidak ada kegiatan lain selain ngobrol-ngobrol dengan teman satu sel, sholat dan corvey membersihkan sel. Ia menyesali atas perbuatannya, sering merasa bosan dengan kondisi di Rutan, sering timbul rasa kangen kepada keluarga, dan keinginan untuk kembali sekolah serta membantu orang tua.

Kegiatan sehari-hari bangun jam 6, kadang sholat subuh terus cuci baju mandi, nyapu, olah raga ringan. Siang tidak ada kegiatan, hanya ngobrol-ngobrol saja sama teman-teman 1 sel. Sel tahanan anak terpisah dengan tahanan dewasa tapi kadang bisa ketemu kalau shalat berjamaah di mushola atau bersih-bersih halaman rutan. Selama di rutan dapat makan 3 kali. Pernah sakit paling batuk-batuk, tanpa ada obat karena nanti sembuh sendiri. Ia suka sedih dan teringat pada orang tua, menyesal atas perbuatannya. Untuk mengisi waktu di dalam Rumah tahanan, C belajar beribadah (mengaji dan shalat) atau berolah raga bersama dengan tahanan dewasa.

Kasus 3 : Ditahan karena ajakan pencabulan.

Setelah tidak bersekolah (SMP kelas 2), C, (16 tahun) lebih sering berkumpul dengan teman-temannya sesama anak drop out, hingga larut malam, sehingga sering bangun siang. Ia sering kena marah orang tua, karena tidak pernah membantu mereka di ladang. C dituduh melakukan pencabulan terhadap anak, karena ajakan teman. Korban melaporkan pada pihak berwajib

dan akhirnya ia tertangkap bersama teman-teman lainnya. Pelayanan selama di Rumah tahanan, kelas II dewasa sama dengan pelayanan orang dewasa. Makan 3 kali sehari dengan kualitas seadanya. Selama di penjara tidak pernah sakit, tidak ada pembinaan apapun. Hanya belajar mengaji dan bimbingan solat. Tempat tidur tidak nyaman karena berdempet-dempetan. Satu sel berukuran 2 x 3 m dihuni oleh 5 orang anak termasuk kamar mandi di dalamnya. Ia sering sedih dan kesepian, terutama jika ingat orang tua dan adiknya. Cara mengatasinya yaitu bermain bola bersama temannya dan orang dewasa. Selama di rutan keluarganya baru datang satu kali.

Kasus 4 : Suka sama suka berujung di penjara

D (16 tahun), putus sekolah sampai kelas 2 SMP. Kesehariannya banyak dihabiskan bersama pacar sampai akhirnya melakukan hubungan seksual dan hamil. Orangtua perempuan tidak setuju, dan melaporkan D, yang telah membawa melarikan diri anak dibawah umur, sampai hamil. D, telah memperoleh penetapan pengadilan selama 1,6 tahun subsider 3 bulan dan berada di Lapas Sngk, selama 10 bulan. Pernah bebas penangguhan selama 1 tahun lebih dan melakukan kasasi, namun gagal dan masuk penjara. Selama menunggu proses banding dan kasasi, D bekerja bersama bibinya di Jakarta. Sampai anaknya lahir, ia masih dalam penjara. Atas permintaan orang tua, D dititipkan ke Lapas dewasa, agar mudah dikunjungi. Sekamar bersama 4 orang napi anak lainnya di kamar berukuran 4 x 3 meter persegi. Orang tua atau keluarga seminggu 2 kali berkunjung. Selama berada di Lapas kegiatan rutin sehari-hari, sembahyang di kuil yang ada di Lapas, menjaga perpustakaan, sambil membaca buku-buku.

Dari jam 8 sampai jam 12 siang. Sore hari kegiatan menyiram taman dan sayuran, bermain catur bersama napi dewasa lainnya. Ada keinginan untuk sekolah lagi dan segera melihat anaknya yang telah lahir.

Gambaran dari ke-empat kasus terlihat kondisi yang berbeda apabila pelaku ditempatkan di LPKS, dikarenakan masih berusia 11 tahun, sedang ke-tiga pelaku lainnya sudah di atas 13 tahun. Kondisi di LPKS jauh lebih nyaman dan anak dapat melanjutkan sekolah dan ada pekerja sosial atau pekerja sosial yang membina. Kondisi berbeda dialami ke-tiga pelaku yang sudah berusia di atas 13 tahun yang ditempatkan di Rumah Tahanan atau Lapas dewasa yang ditempatkan bersama-sama dengan tahanan atau napi dewasa hanya sel yang berbeda tetapi keseharian beraktivitas bersama dengan napi dewasa.

Berdasarkan gambaran ke-empat kasus diatas, maka dapat terlihat kesamaan kasus-kasus di atas sebagai mana pada tabel 2.

2. Analisia kasus

Berdasarkan hasil temuan kasus, diperoleh gambaran bahwa latar belakang anak melakukan pencabulan atau kejahatan seksual, karena (1) seringnya menonton pornografi, (2) Drop-out sekolah sehingga lebih banyak waktu luang yang diisi dengan kegiatan tidak terarah (begadang, mabuk-mabukan, dll) (3) Kurangnya pengawasan dari orang tua (4) Lingkungan tempat dimana anak berada.

Pengaruh lingkungan cukup besar dan mendominasi terhadap kehidupan remaja (Santrock, 2009), terutama pergaulan. Lingkungan dimana lebih banyak anak-anak putus sekolah, memberi peluang besar bagi anak untuk “nongkrong” pada malam hari. Eratnya pergaulan dengan sesama anak

Tabel 2. Rangkuman Kasus

Kasus	Usia Pelaku	Jenis pelanggaran	Proses hukum	Kondisi di LPKS/Rutan/LAPAS
A	11 tahun	Pencabulan terhadap teman sebaya lebih dari 1 anak	Musyawahar tidak berhasil lanjut ke proses hukum, putusan pengadilan pelaku ditempatkan di LPKS Pontianak	Setelah berada di LPKS, anak dapat melanjutkan sekolahnya ia belajar mengaji, bergaul bersama anak asuh lainnya. Tempat menginap dipisahkan dengan anak-anak panti asuhan tetapi ada pekerja sosial serta dapat melanjutkan sekolah.
B	14 tahun	Pemeriksaan terhadap anak usia 15 tahun karena diajak teman	Dilaporkan oleh orang tua korban. Selama menjalani proses hukum ditempatkan di Rumah Tahanan dewasa	Selama di rumah tahanan, tidak ada kegiatan lain selain ngobrol dengan teman satu sel, sholat dan kerja bakti membersihkan sel.
C	16 tahun	Pencabulan terhadap anak karena diajak teman	Dilaporkan oleh korban dan keluraganya. Selama proses hukum ditempatkan di Rumah Tahanan dewasa	Pelayanan selama di Rumah tahanan, kelas II dewasa sama dengan pelayanan orang dewasa. Hanya belajar mengaji dan bimbingan solat. Tempat tidur tidak nyaman karena berdempet-dempetan. Satu sel berukuran 2 x 3 m dihuni oleh 5 orang anak termasuk kamar mandi di dalamnya.
D	16 tahun	Menghamili dan membawa kabur pacar dibawah umur	Dilaporkan oleh orang tua korban, pelaku dititipkan di LAPAS dewasa atas permintaan orang tua agar mudah menjenguk.	Atas permintaan orang tua, D dititipkan ke Lapas dewasa, agar mudah dikunjungi. Sekamar bersama 4 orang napi anak lainnya di kamar seukuran 4 x 3 meter persegi. Selama berada di Lapas kegiatan rutin sehari-hari, sembahyang di kuil yang ada di Lapas, menjaga perpustakaan, sambil membaca buku-buku. Sore hari kegiatan menyiram taman dan sayuran, bermain catur bersama napi dewasa lainnya.

putus sekolah, memberi kemudahan pada anak untuk mengikuti ajakan teman untuk minum minuman keras, merokok termasuk melakukan pelecehan seksual terhadap teman sebaya (kasus 2 dan 3).

Artinya pengaruh teman sebaya cukup besar terhadap perilaku anak untuk melakukan pelecehan seksual, sebagaimana temuan penelitian B2P3KS, Yogyakarta (2017) sebanyak 43% anak melakukan pelecehan seksual karena pengaruh tayangan pornografi. Selain itu faktor kuatnya pengaruh standar kelompok sebaya, dimana keinginan untuk melakukan aktivitas seksual dipengaruhi oleh keyakinan bahwa sebagian besar teman mereka telah melakukannya (Kinsman, Romer, Furstberg

& Schwarrz, 1998 dalam Papalia dkk, 2008). Sebagaimana pada kasus (3 & 4), menunjukkan bahwa anak menerima ajakan teman untuk melakukan persetubuhan karena kuatnya pengaruh kelompok sebaya. Lingkungan pergaulannya, telah menempatkan anak untuk berurusan dengan hukum. Kedekatan pertemanan dengan sesama anak putus sekolah, yang tidak berorientasi sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan teman antisosial dipengaruhi oleh lingkungan (Iervolino et, al, 2003 dalam Papalia, 2008).

ABH ini berperilaku seperti kasus-kasus di atas dapat dikarenakan adanya dorongan agresif yang terpolarisasi ke dalam perilaku yang melanggar hukum (kriminal). Perilaku

agresif merujuk kepada tindakan kekerasan yang dilakukan remaja dengan tujuan untuk mendatangkan luka, cedera baik secara fisik, emosi maupun kognitif kepada orang lain. Tindakan kekerasan ini bisa dilakukan secara fisik maupun lisan. Bahkan beberapa faktor determinan yang mempengaruhi munculnya perilaku agresif, seperti; kondisi internal, keluarga, lingkungan sekitar dan faktor media massa. Faktor lingkungan (secara fisik) turut menyumbang terjadinya perilaku agresif individu. Perilaku agresif seringkali muncul di banyak lingkungan masyarakat. Perilaku agresif dipengaruhi oleh banyak faktor, diduga, salah satunya adalah faktor lingkungan. Lingkungan tempat dimana individu tinggal memiliki andil yang relatif signifikan dalam mempengaruhi dan membentuk perilaku individu. (Susantyo, 2016, 2017 dan 2018).

Selain faktor lingkungan, yang tidak kalah penting adalah keluarga. Keluarga sebagai lingkungan utama dan pertama dalam membentuk kepribadian anak dituntut untuk dapat mengembangkan proses sosialisasi bagi anak. Sosialisasi merupakan proses penanaman nilai dan norma yang dianut oleh suatu generasi kepada generasi penerusnya yang akan berpengaruh secara langsung pada perilaku anak. Tujuan pertama dari proses sosialisasi orang tua dan anak adalah menumbuhkan kepatuhan atau kesediaan mengikuti keinginan atau peraturan tertentu. Anak akan melakukan keinginan orang tua bila ada kelekatan yang aman diantara mereka (Susantyo, 2011).

Pada kasus-kasus di atas ada anak yang berusia dibawah 16 tahun, bahkan ada diantaranya yang sudah memiliki anak, sebagai hasil hubungan diluar nikah. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak-

anak tersebut telah melakukan aktivitas seksual secara Dini. Menurut Dube & Savin Williams (1999) dalam Papalia, hasil penelitiannya menemukan bahwa faktor yang berperan pada anak yang melakukan aktivitas seksual dini, karena pubertas lebih awal, kemiskinan, prestasi akademis yang buruk, tidak memiliki tujuan akademis dan karier, memiliki pengalaman pelecehan seksual atau penelantaran oleh orang tua. Berdasarkan kasus diatas jelas menunjukkan bahwa putus sekolah sebagai gambaran tidak memiliki tujuan akademis untuk masa depannya.

Masih kuatnya anggapan bahwa perilaku seksual pada anak-anak dibawah umur, merupakan perilaku yang melawan norma yang berlaku di masyarakat, maka konsekuensi pelaku harus dihukum. Meski sebenarnya pelaku merupakan korban dari kondisi di dalam keluarga atau lingkungan yang kurang mendukung bagi anak, sehingga anak terjerumus kedalam perilaku asusila. Anak dilaporkan oleh orang tua korban, ke Kepolisian terdekat, sehingga anak harus mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya. Sebagai pelaku yang disangkakan melakukan pelecehan seksual maka anak harus dihukum. Proses hukum diawali dengan penangkapan. Selama proses penangkapan, sebagai pengalaman yang kurang menyenangkan (53%) sebagaimana temuan kajian ABH Puslitbangkesos (Kurnisari, dkk, 2016). Kemudian anak akan melalui proses hukum dan merasakan kehidupan dalam Rumah Tahanan, minimal 20 hari. Selama proses penahanan mereka berada dalam sel berukuran 2x3 meter dengan jumlah penghuni 5-6 orang, dengan kamar dan toilet di dalam ruangan. Mereka tidur berdempet-dempetan. Kesehariannya hanya menunggu sampai

proses persidangan, tanpa ada kegiatan. Untuk mengisi waktu luang, mereka hanya berinteraksi dengan sesama teman dalam sel, kadang-kadang ada kesempatan untuk berinteraksi dengan penghuni lain yang ada di Lapas/Rutan terutama saat sembahyang atau *corvey*. Sehingga perasaan jenuh, sedih, penyesalan, kesepian sering timbul selama mereka ditahan.

Penahanan anak di Rutan anak, tentunya lebih rendah risikonya dibandingkan dengan penempatan anak di Rutan Dewasa, karena anak berkesempatan untuk bergaul tahanan dewasa. Kondisi tersebut rentan terjadinya perlakuan kekerasan. Meski statusnya masih tersangkan dan belum tentu bersalah, namun dikhawatirkan terjadi “transfer” ilmu dan perilaku tentang kejahatan. Namun demikian, masih ditemukan orang tua yang menghendaki anak untuk di tahan atau “dititipkan” di Rutan dewasa (kasus 2). Alasannya, agar orang tua dapat menengok anak setiap saat dibandingkan jika anak di tempatkan di Rutan anak. Hal ini, tentu saja dapat menjadi dilema karena satu sisi anak akan berisiko “terkontaminasi” tahanan dewasa, namun sisi lain anak memperoleh dukungan psikologis dari orang tua karena seringnya menjenguk anak selama di Rutan.

Dalam Undang Undang SPPA, mengamanatkan bahwa anak-anak usia dibawah 12 tahun sebagai pelaku kejahatan atau pelanggaran norma hukum, tidak harus menjalankan proses hukum. Namun kenyataannya anak sebagai pelaku pencabulan “didesak” oleh masyarakat untuk menjalankan proses hukum. (kasus 1). Hal ini menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap perilaku pencabulan oleh anak, sebagai perilaku tindakan kriminal yang dapat meresahkan masyarakat (Nurudin, 2010), sehingga anak harus menjalankan

proses hukum. Padahal jelas dalam UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76 D dan E mengamanatkan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun dan melakukan tindak pencabulan tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 14 tahun tidak dapat dijatuhi sanksi pidana apabila mereka melakukan pencabulan, hanya dapat dikenai tindakan. Hal yang sama juga diamanatkan pada Pasal 69 ayat 2 UU SPPA. Bagi anak yang telah berusia 14 tahun tetapi belum genap 18 tahun apabila melakukan pencabulan maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71. Tindakan tersebut dilakukan dengan pemberian diversi, sebagai bagian dari hak anak. Diveri diberikan bagi anak dengan tujuan agar tercapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dan perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan tanggungjawab terhadap anak.

Kenyataan menunjukkan bahwa perilaku anak telah menyulut amarah orang tua korban. Terlebih setelah orang tua pelaku menyangkal bahwa anaknya sebagai pelaku pencabulan, semakin menyulut amarah masyarakat sekitar, mengingat laporan jumlah korban sudah banyak dan dianggap menimbulkan keresahan. Akhirnya orang tua pelaku merelakan anak untuk di “inapkan” sementara di ruang tahanan Polres setempat. Sampai akhirnya anak di vonis untuk mendapatkan pembinaan di Lembaga Sosial atau LPKS selama 9 bulan. Lembaga yang ditunjuk untuk membina anak berkonflik hukum yaitu Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial (UPRS) yang berlokasi di Kota Pontianak. UPRS

awalnya Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) yang diperutukkan bagi anak yatim piatu atau anak terlantar/tidak mampu. Kapasitas maksimal daya tampung 60 anak, saat penelitian ini dilakukan, menampung 46 anak dan 1 orang ABH. Menempatkan anak yang berproses hukum, pada awalnya ditolak oleh LPKS, karena adanya kekhawatiran perilakunya dapat mempengaruhi anak-anak asuh lainnya. Setelah mempertimbangkan tekanan PK Bapas dan pihak Kepolisian, bahwa menempatkan anak terbaik berada di rumah asuh dibandingkan di rumah tahanan. Sampai akhirnya anak dapat diterima di LPKS, meski tinggalnya terpisah dari asrama anak asuh. Panti sosial ini, menurut Kepolisian dan Petugas Bapas merupakan tempat yang layak untuk anak tinggal, dan kebutuhan anak tetap terjamin.

Selama anak memperoleh pembinaan di UPRS atau LPKSA, orang tua memberi dukungan finansial agar anak dapat tetap melanjutkan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari anak. Anak terlibat dalam kegiatan lembaga bersama anak asuh lainnya, termasuk pendidikan. Menurut pekerja sosial, perilaku anak menunjukkan kearah positif, rajin beribadah dan berperilaku sopan. Artinya penempatan anak di LPKSA, lebih melindungi anak dan setidaknya hak-hak anak tetap terpenuhi. Pembinaan atau rehabilitasi psikososial di UPRS atau LPKSA menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan menempatkan anak di Rutan atau Lapas anak. Perbedaan yang cukup menonjol pada tempat dan suasana antara Rutan atau Penjara dengan Lapas. Tanpa ada jeruji besi dan suasana asrama atau rumah, setidaknya menghindarkan anak dari risiko kurungan atas perampasan kebebasan anak dan stigma negatif setelah anak keluar dari penjara. Lembaga

Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Sosial sebagaimana mandat dari UU-SPPA, pasal 105. Fungsinya sebagai lembaga yang dapat menerima penempatan tahanan anak, (pasal 30), dan untuk melindungi kemanana anak (pasal 32). Selain itu LPKS dapat menerima putusan rujukan pada anak (pasal 82). Pembentukan LPKS melalui penandatanganan MoU antara Kemensos dan Dinas Sosial setempat.

Keberadaan LPKS menjadi penting, bagi ABH, utamanya pada anak yang berumur dibawah 12 tahun. Selain itu ABH berumur lebih dari 13 tahun yang akan melanjutkan prosesnya baik di kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan dapat ditempatkan di LPKS, sepanjang belum dijatuhkan putusan tindakan. Demikian halnya dengan ABH yang mendapatkan putusan pidana bentuk pembinaan dari instansi sosial, maka LPKS dapat berperan untuk merehabilitasi mereka. Dalam hal ini komitmen Pemkot Pontianak cukup besar untuk melindungi anak-anak berkonflik hukum dari perampasan hak-hak mereka. Oleh karenanya Pemerintah kota Pontianak menitipkan ABH ke Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT). Namun keterbatasan sarana dan prasarana membatasi jumlah anak yang dapat dititipkan ke PLAT. Keberadaan Lembaga sosial sangat besar peranannya bagi pemulihan anak berkonflik hukum, dibandingkan anak berada di dalam sel atau tahanan atau penjara. Namun satu sisi terdapat permasalahan yang dihadapi LPKS, sebagaimana dikemukakan oleh kepala bagian Tata usaha (bapak Sy), bahwa (1) sarana dan prasarana LPKS untuk menempatkan ABH, belum memadai. (2) belum adanya kegiatan rehabilitasi khusus ABH, selama ini mengandalkan pada kegiatan di seksi rehabilitasi sosial

Dinas Sosial. (3) terbatasnya pekerja sosial khusus untuk ABH, karena pekerja sosial di UPRS belum sebanding dengan jumlah anak. Selama ini UPRS hanya memiliki 1 orang pekerja sosial dan 1 orang psikolog. (4) Anggaran untuk operasional LPKS relatif belum memadai, selama ini anggaran peruntukan kegiatan regular sebesar Rp 700.000,-/anak/tahun

Hal yang sama juga dikemukakan oleh pihak kepolisian, *“tidak adanya lembaga penitipan anak selama anak menjalani proses hukum, terutama anak-anak yang berada di kabupaten-kabupaten, sehingga memasukkan mereka ke Lapas setempat.* Waktu penyidikan terbatas, kurangnya ruangan untuk tahanan anak, tanpa adanya pengawasan sehingga beberapa ABH pernah kabur. Unit PPA di Kepolisian setempat, menerima anak berumur diatas 13 tahun yang sedang dalam proses hukum. Terdapat ruangan khusus untuk konseling anak. Berbeda halnya untuk kasus-kasus anak dibawah umur 12 tahun, akan diupayakan diversi, dimana anak tetap tinggal bersama orang tuanya, dan tetap mendapat dampingan selama proses hukum berlangsung. Namun upaya diversi ini masih perlu perhatian terutama terhadap pemahaman bagi orang tua atau masyarakat sekitarnya dan upaya membebaskan anak dari pemenjaraan anak.

KESIMPULAN

Pengalaman menunjukkan bahwa umumnya anak berkonflik hukum adalah mereka yang berasal dari keluarga yang menghadapi masalah ekonomi maupun sosial. Masalah mulai muncul saat keluarga mengalami kemiskinan dan/atau disfungsi keluarga, sehingga tekanan sebaya dalam kaitannya dengan perilaku melanggar hukum atau ajakan berbuat cabul menjadi daya

tarik tersendiri. Pengaruh teman sebaya yang sama-sama putus sekolah atau kurang memiliki kegiatan positif, telah menjerumuskan anak berhadapan dengan hukum. Proses hukum yang harus dijalani anak mulai dari penahanan, penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan putusan, minimal selama 150 hari. Bagi anak berusia dibawah 12 tahun dapat di putus pengadilan untuk memperoleh pembinaan di LPKS, sedangkan anak-anak diatas usia 12 tahun, dapat diputus untuk mendapatkan pembinaan dalam Penjara (LP anak) atau pembinaan di LPKS.

Sebenarnya kasus anak berkonflik hukum, berusia dibawah 12 tahun memiliki hak untuk mendapatkan diversi, akan tetapi pandangan masyarakat terhadap anak sebagai pelaku pencabulan dianggap dapat meresahkan masyarakat, dan permintaan ganti rugi terhadap keluarga pelaku yang melampaui kemampuannya, sehingga mengharuskan anak menjalani proses hukum. Namun demikian anak masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan diversi, yang dapat diperoleh saat penyidikan di Kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan putusan peradilan oleh Hakim. Namun demikian anak telah melampaui penahanan, baik di Rutan maupun di penjara atau LP, dengan status sebagai tahanan. Pemberlakuan diversi terhadap anak-anak pada semua tingkatan, bertujuan untuk mengurangi efek negatif (*negative effect*) dari keterlibatan anak selama proses peradilan. Hasil kajian Puslitbang Kesos tentang kondisi ABH (2017) menemukan bahwa setelah anak ditahan dan dipenjara, mereka merasakan penyesalan, tidak senang berada di penjara karena terkekang dan tidak adanya lagi kebebasan, bahkan merasa terbuang. Belum lagi stigma sebagai anak pidana, setidaknya akan mempengaruhi kehidupan psikologis anak. Namun demikian mereka memiliki perencanaan untuk masa

depan, sehingga kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh Penegak Hukum, dengan memberikan pemidanaan edukatif dalam sistem peradilan pidana anak. (Rinita, 2012). Bentuk pemidanaan edukatif dapat diberikan berupa pelatihan *Life skill* untuk mengisi waktu luang mereka selama dalam penjara. Bentuk pembinaan lain atau rehabilitasi dapat diperoleh dari LPKS atau Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial (UPRS).

Meski pada awalnya ada keraguan dari UPRS menerima anak berkonflik hukum karena khawatir terjadi “penularan” perilaku pada anak-anak asuh lainnya, namun dengan jaminan dari pekerja sosial dan aparat penegak hukum, dapat meyakinkan bahwa UPRS dapat melakukan pembinaan bagi anak berkonflik hukum, dengan status “titipan”. Berdasarkan pembinaan dari LPKS dan dukungan dari keluarga atau orang tua, yang bersangkutan mengalami banyak kemajuan. Hak anak untuk tetap bersekolah masih terjamin, pekerja sosial dan pembinaan spiritual tetap terpenuhi. Artinya LPKS atau UPRS mampu memberikan yang terbaik bagi anak dibandingkan berada dalam penjara, meminimalkan dampak negatif dari pemenjaraan anak.

SARAN

Untuk mencapai kondisi tersebut, maka kajian ini merekomendasikan. (1) Perlu mengotimalkan peran LPKS sebagai lembaga rehabilitasi bagi anak berkonflik hukum, dengan melengkapi sarana, prasarana dan Sumber daya manusia yang mumpuni dalam rehabilitasi anak berkonflik hukum. Sehingga keberadaan LPKS dapat menjamin Penegak hukum memberikan diversi bagi anak yang berproses hukum. (2) Mengoptimalkan sumber daya manusia di LPKS, khususnya pekerja sosial sebagai Pekerja Sosial Koreksional, sehingga dapat berperan untuk melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang menjalankan proses hukum baik di

LPKS maupun di LP atau Rutan. Setidaknya dapat meminimalkan dampak negatif dari pemenjaraan atau penahanan anak. (3) Perlunya sosialisasi tentang *restorative justice* kepada masyarakat untuk menghindari penolakan orang tua akan keputusan musyawarah atau titip di LPKS.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dibantu oleh banyak pihak terutama rekan-rekan peneliti Puslitbang Kesos yaitu Alit Kurniasari, Husmiati, Mulia Astuti, Badrun Susantyo, Hari Harjanto Kurniawan dan Nurdin Widodo. Selain itu juga diucapkan terima kasih kepada Kanwil Kumham dan BAPAS Provinsi Kalimantan Barat, sakti peksos, Rutan di Sambas dan Singkawang, LPKA dan LPKS di Kota Pontianak.

Sehubungan dengan itu, disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya. Terima kasih juga disampaikan kepada tim editor Sosio Konsepsia atas dimuatnya naskah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adistia, D., Triyoso, P., Nurdayasakti, S. (2015). Dampak Penempatan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Berkaitan dengan Tujuan Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan. Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. Februari 2015
- Chusna, P. A. (2017). Pengaruh Media Gadget Pada Perkembangan Karakter Anak. *Media Komunikasi Sosial Keagamaan*: Vol. 17, No. 2, November 2017
- Dellyana, S. (1988). *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*. Majalah Liberty, Yogyakarta
- Firdaus, A., Syahrin, A., Marlina., M. Suhaidi.

- (2016). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak (*Juvenile Justice System*) Di Indonesia . *USU Law Journal*, Vol.4.No.3 (Juni 2016) 1-13
- Irmayani, N. R. (2018). Pemenuhan Hak-Hak Anak Selama Berada di Rumah Tahanan: Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia. *Asian Social Work Journal*. Volume 3, Issue 2, April 2018.
- Joni, M. & Tanamas, Z. Z.(1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Jaya, P. H. I (2012). Efektifitas Penjara Dalam Menyelesaikan Masalah Sosial. *Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*. UIN Sunan Kalijaga.
- Kementerian Sosial, (2015). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia (2017). *Peran Kemensos dalam Penanganan ABH. Lokakarya Menuju Indonesia Bebas ABH dari Lapas Dewasa tahun 2018*, (power point), Bogor
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2019). Kasus Pelanggaran Hak Anak terbanyak ABH. <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-4-885-kasus-pelanggaran-hak-anak-terbanyak-abh>. Diakses 29 Juli 2019.
- Kurniasari, A., Huruswati, I., Widodo, N., Wismayanti, Y, F., Subardhini, M., Unayah, N., Sudibyonoto. (2007). Studi Penanganan Anak Berkonflik Hukum. Puslitbangkesos, Badiklitkesos, Departemen Sosial.
- Kurniasari, A., Husmiati, Irmayani, N. R., Susantyo. B., Astuti, M., Setiawan, H. H., Widodo, N. (2017). *Kondisi Anak Berkonflik Hukum Selama Proses Diversi*. Puslitbangkesos, Badiklitkesos, Kemsos.
- Nurudin. (2010). Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Pemaknaan Remaja Perempuan Tentang Tindakan Pelecehan Seksual Di Kabupaten Klaten. *Skripsi*. Fakultas Politik dan Ilmu Sosial. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)
- Rinita, I, I. (2012). Analisa Yuridis Penerapan Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Tesis*. Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Salkind, N. J. (2006). *Encyclopedia of Human Development*. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publication.
- Santrock, J. W. (2009). *Child Development* (Twelfth Edition ed.). New York: Mc Graw Hill.
- Setiawan, H, H. (2014). Reintegrasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum” (ABH) Dalam Perspektif Ekologi Sosial. *Tesis*. Jakarta. Fakultas Ilmu Sosial Politik. Universitas Indonesia.

- Setyobudi, M. T. (2012). Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang *Tesis*. Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Susantyo, B. (2011). Memahami Perilaku Agresif: Sebuah Tinjauan Konseptual. *Informasi*, Vol. 16 No. 03 Tahun 2011.
- Susantyo, B., Setiawan, H. H., Irmayani, N .R., Sabarisman, M. (2015). *Kesiapan Kementerian Sosial dalam implementasi Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial.
- Susantyo, B. (2016). Faktor-Faktor Determinan Penyebab Perilaku Agresif Remaja Di Permukiman Kumuh Di Kota Bandung. *Jurnal Sosiokonsepsia* Vol 6 No 1 Desember 2016.
- Susantyo, B. (2017). Lingkungan dan Perilaku Agresif Individu. *Sosioinforma* Vol 3 No 1 Tahun 2017.
- Susantyo, B. (2018). Perbedaan Perilaku Agresif Remaja Di Permukiman Kumuh Di Kota Bandung. *Jurnal Creative Research*. BP2D Jawa Barat. Vol 04 No 1 Juni 2018.
- Sofian, A., Hermawati, I., Winarno, E., Tursilarini, T. Y. Ramadani, D. (2017). *Kekerasan Seksual Anak Terhadap Anak*. Studi di Lima Kota (DKI Jakarta, Magelang, Makassar, Mataram dan D.I. Yogyakarta). B2P3KS-ECPAT, Yogyakarta.
- Triati, E. (2018). Situasi Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di lembaga Pemasyara-katan/Rumah Tahanan Dewasa: Studi Kasus Di Sidoarjo Dan Surabaya, Jawa Timur. *Jurnal Transformasi Administrasi* Vol 08 No 01 Tahun 2018.
- Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang No 23 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- UNICEF. (no date). Justice For Children: *Detention As A Last Resort*. Innovative Initiatives in the East Asia and Pacific Region.

DUKUNGAN SOSIAL DAN FUNGSI KELUARGA PASCAGEMPA DI WILAYAH PEGUNUNGAN DAN PESISIR KABUPATEN LOMBOK TIMUR

SOCIAL SUPPORT AND FAMILY FUNCTIONING POST EARTHQUAKE IN MOUNTAINOUS AND COASTAL AREAS OF LOMBOK TIMUR DISTRICTS

R Sukarni, Diah Krisnatuti dan Tin Herawati

Program Studi Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, Fakultas Ekologi Manusia,
Institut Pertanian Bogor, Indonesia, 16680.

E-mail: rsukarni_raden@apps.ipb.ac.id

Diterima: 12 Juli 2019, Direvisi: 17 Agustus 2019; Disetujui: 26 Agustus 2019

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dukungan sosial dan fungsi keluarga pascagempa di Kabupaten Lombok Timur yang dibedakan berdasarkan kondisi geografis yaitu daerah pegunungan dan pesisir. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 456 orang. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *random sampling disproportional*, dengan jumlah sampel 120 orang istri yang memiliki anak usia balita dari dua wilayah yang berbeda yaitu (60 orang dari pegunungan dan 60 orang dari pesisir). Data primer yang dikumpulkan menggunakan instrumen Multidimensional Scale of Perceived Sosial Support (MSPSP) untuk mengukur dukungan sosial dan The McMaster Family Assesment Device untuk melihat fungsi keluarga. Desain penelitian ini adalah *cross-sectional study*. Penelitian dilaksanakan selama bulan Januari hingga Februari 2019. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang nyata pada dukungan sosial dan fungsi keluarga antara keluarga korban bencana di daerah pegunungan dan pesisir. Pencapaian terendah dimensi fungsi keluarga adalah pada fungsi umum dengan nilai *mean*= 60.7 di wilayah pegunungan dan 65.1 di wilayah pesisir). Sedangkan nilai rata tertinggi adalah dimensi keterlibatan afeksi dengan nilai *mean*= 78.6 di wilayah pegunungan dan 79.2 di wilayah pesisir). Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah tempat tinggal berpengaruh positif terhadap fungsi keluarga yang dibuktikan dengan nilai $\beta=0.493$. Selain itu, dukungan sosial berpengaruh positif terhadap fungsi keluarga dengan nilai $\beta=0.398$. Rekomendasi yang diberikan adalah pemerintah diharapkan memberikan informasi yang akurat mengenai perkembangan penanganan rekonstruksi fisik korban pascabencana, dan meningkatkan pelatihan-pelatihan terkait program pemberdayaan perekonomian keluarga melalui wirausaha produk lokal untuk memotivasi masyarakat agar lebih berdaya. Selain itu, pemerintah diharapkan memaksimalkan program-program yang telah direncanakan seperti kampung siaga bencana, dan dukungan psikososial untuk meningkatkan fungsi keluarga dan dukungan sosial.

Kata Kunci: korban bencana di pegunungan dan pesisir, dukungan sosial, fungsi keluarga.

Abstract

The purpose of this study is to analyze social support and post-earthquake family functions in East Lombok Regency which are distinguished based on geographical conditions, namely mountainous and coastal areas. The population in this study amounted to 456 people. The sampling technique used in this study is disproportional random sampling, with a sample of 120 wives who have children under five from two different regions (60 people from the mountains and 60 people from the coast). Primary data collected uses the Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSP) instrument to measure social support and The McMaster Family Assessment Device to see family functions. The design of this study was a cross-sectional study. The study was from January to February 2019. Based on the results of the study, it found that there were significant differences in social support and family functions between the families of disaster victims in mountainous and coastal areas. The lowest achievement of the family function dimension is the general function with a mean value = 60.7 in the mountainous region and 65.1 in the coastal region. While the highest average value is the dimensions of affection involvement, the mean value = 78.6 in

the mountainous region and the mean value = 79.2 in the coastal area. The results showed that the area of residence had a positive effect on family function, as evidenced by the value $\beta = 0.493$. In addition, social support has a positive effect on family function with a value of $\beta = 0.398$. The recommendation given is that The government is expected to provide accurate information regarding the development of the handling of physical reconstruction of post-disaster victims and increase training related to family economic empowerment programs through local product entrepreneurship to motivate the community to be more empowered. In addition, the government is expected to maximize planned programs such as disaster preparedness villages, and psychosocial support to improve family functioning and social support.

Keywords: *disaster victims in the mountains and coast, social support, family functions.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak pada jalur gempa bumi dan gunung berapi. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia rawan terhadap berbagai bencana alam. Berdasarkan informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang tahun 2018, tercatat 1 999 kejadian bencana di Indonesia yang mengakibatkan 3.548 orang meninggal dunia dan hilang, 13.112 orang luka-luka, 3,06 juta mengungsi dan terdampak bencana (BNPB 2018). Utami (2018) menyebutkan tingginya korban bencana baik meninggal atau luka-luka di Indonesia dikarenakan sebagian masyarakat tinggal pada daerah dekat dengan pusat sumber bencana. Berdasarkan data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) sebanyak 5 juta orang tinggal di wilayah sekitar tubuh gunung api dan 2.796.138 jiwa penduduk di seluruh Indonesia tinggal di pesisir pantai yang berada di dekat daerah penunjaman lempeng bumi atau 4 (empat) kawasan *megathrust* yang berpotensi tsunami (BNPB, 2013).

Hasil peta kawasan bencana yang diterbitkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), kawasan Lombok utara dan timur rentan bencana gempa bumi karena letaknya dekat dengan pusat gempa, dan merupakan dataran hingga perbukitan terjal yang didominasi batuan rombakan gunung api muda yang telah mengalami pelapukan sehingga rawan terhadap guncangan gempa

bumi yang terjadi dan berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap bangunan. Bencana gempa bumi yang terjadi di Lombok Utara dan Lombok Timur serta kawasan di sekitarnya pada Minggu 5 Agustus 2018 berkekuatan 7 pada Skala Richter, merupakan tipe gempa merusak dan mengakibatkan korban jiwa. Menurut hasil survei dari Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Nusa Tenggara Barat tercatat 563 jiwa korban meninggal dunia, 417.529 jiwa mengungsi dan 71.937 unit rumah rusak.

Paudel & Ryu (2018) mengatakan bencana alam dapat memicu kemerosotan modal manusia yaitu kemiskinan baru karena korban bencana kehilangan harta benda, mata pencaharian dan bahkan kehilangan kepala keluarga sebagai pencari nafkah utama. Selain berdampak secara fisik, keluarga mengalami stress pasca trauma. Minihan, Liddell, Byrow, Bryant, dan Nickerson (2018) mengungkapkan paparan bencana berkontribusi pada munculnya stres pasca trauma pada korban bencana. Korban bencana mengalami tekanan psikologis yang berdampak merugikan bagi kesehatan mental (Catani, Jacob, Schauer, Kohila, dan Neuner, 2008). Stress pasca trauma menimbulkan banyak gejala yang mengganggu seperti kecemasan, dan ketakutan (Waitz, 1983; Radloff, 1977). Orang yang sering mengalami berbagai situasi yang sifatnya mencekam dan ketidakpastian dalam waktu yang lama akan mendorong stres menjadi kronis (Maryam, 2007).

Kesulitan secara fisik dan psikologi akibat

bencana membuat keluarga membutuhkan dukungan sosial. Dukungan sosial adalah persepsi bantuan yang dirasakan secara aktual dan ekspresif seperti informasi atau saran, bantuan nyata, atau tindakan berbentuk verbal dan non-verbal yang ditawarkan oleh komunitas sosial (Choi, 1997) provisions supplied by the community, social networks, and confiding ~artners”. Glass, Flory, Hankin, Kloos, dan Turecki (2009) menjelaskan menjelaskan bahwa dukungan sosial berhubungan dengan tekanan psikologis yang rendah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi dukungan sosial maka gejala stres semakin rendah karena merasa orang lain mengasahi dan membantu agar segala sesuatu menjadi lebih mudah. Dukungan sosial dapat melindungi orang yang sedang berada dalam kondisi stress (Cobb, 1976). Dukungan dari keluarga menyebabkan perubahan yang positif pada kesehatan mental keluarga korban bencana (Nam, Kim, DeVlyder, & Song, 2016).

Hasil penelitian Platt, Lowe, Galea, Norris, dan Koenen, (2016) menjelaskan terdapat tiga jenis dukungan yang sangat penting dalam melindungi korban bencana dari gangguan stres pasca trauma yaitu dukungan emosi (misalnya empati, nasihat, cinta dan kasih sayang), dukungan informasi (misalnya ketersediaan informasi penanganan bencana dan mengatasi sumber stres), dan dukungan nyata (misalnya makanan, waktu dan tenaga), dimana berbagai jenis dukungan sosial ini akan menurun seiring berjalannya waktu dan jenis dukungan emosi paling signifikan dipertahankan karena tidak terkendala biaya dan sumber penyedia dukungan. Dukungan emosi dapat diperkuat dengan bantuan tenaga ahli/psikolog dan interaksi yang baik dengan masyarakat, keluarga dan teman/ tetangga.

Menurut Pilisuk dan Parks (1983), keluarga inti dan keluarga besar menjadi basis psikologis dari dukungan sosial melalui perasaan empati,

altruisme, dan solidaritas, selain itu sumber dukungan sosial yang dapat melengkapi ikatan keluarga adalah jaringan informal teman-teman atau kelompok dukungan sukarela dan layanan agen formal. Dukungan sosial memberikan pengaruh yang menguntungkan pada situasi stres (Minnes, 1988). Dukungan sosial pada penelitian ini mengadaptasi dari instrumen *Multidimensional Scale of Perceived Sosial Support* (MSPSP) yang dikembangkan oleh Zimet, Dahlem, Zimet, dan Farley, (1988). Dukungan sosial diukur dengan melihat tiga sumber penyedia dukungan yaitu dukungan keluarga, teman dan pemerintah. Dukungan keluarga adalah adalah persepsi bantuan yang dirasakan secara aktual dan ekspresif yang disediakan oleh keluarga. Dukungan teman adalah persepsi bantuan yang dirasakan secara aktual dan ekspresif provisions supplied by the community, social networks, and confiding ~artners” yang disediakan oleh teman. Dukungan pemerintah adalah persepsi bantuan yang dirasakan secara aktual dan ekspresif yang disediakan oleh pemerintah.

Bencana gempa bumi di Lombok memberikan kerusakan terluas pada wilayah perbukitan/pegunungan dibandingkan daerah pesisir. Kondisi geografis suatu wilayah memberikan dampak yang berbeda bagi masyarakat dalam mengakses sumberdaya. Perbedaan kondisi wilayah pegunungan dan pesisir yaitu; wilayah pegunungan memiliki lahan pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat sedangkan, wilayah pesisir memiliki *open acsess* terhadap laut dengan segala isinya sehingga pemanfaatannya lebih terbuka. Populasi yang paling rentan terhadap kondisi lingkungan yang beresiko seperti daerah-daerah yang hancur oleh banjir, kekeringan, gempa bumi, dan sebagainya adalah ibu dan anak, resiko lingkungan yang buruk menyebabkan meningkatnya angka

kematian ibu dan anak (Rylander *et al.* 2013). Hasil penelitian Sim *et al.* 2018, menunjukkan bahwa rendahnya keamanan ekonomi korban bencana memiliki dampak nyata pada kesehatan mental orang tua, kualitas pengasuhan, dan hasil psikososial anak.

Cummings, Keller, dan Davies, (2005) menjelaskan bahwa gejala stres akan memberikan pengaruh pada kurang efektifnya fungsi keluarga. Stres keluarga berdampak pada cara orangtua memenuhi fungsi keluarganya yaitu dalam kisaran “tidak sehat”, terutama dalam komunikasi, kontrol perilaku dan peran keluarga (Banovcinova *et al.* 2014). Fungsi keluarga adalah suatu proses yang dijalankan keluarga dalam menyelesaikan serangkaian tugas yang dimiliki terdiri atas tugas dasar (kemampuan pemenuhan materi seperti makan dan pakaian), tugas perkembangan (mendorong pertumbuhan dan perkembangan anggota) dan tugas kritis (kemampuan menangani semua jenis keadaan darurat keluarga) (Dai & Wang 2015).

Ghanbaripناه *et al.* (2013) menjelaskan bahwa keluarga yang sehat melindungi kesejahteraan dengan memberikan dukungan emosional, memiliki hubungan yang positif, dan kesehatan fisik, sedangkan keluarga yang menghadapi banyak krisis dan tekanan mengarah pada ketidakseimbangan hubungan, terjadi perubahan pola interaksi keluarga hingga (Olson & Defrain, 2001). muncul masalah yang lebih besar. Secara spesifik Sangalang *et al.* (2017) menjelaskan bahwa penurunan fungsi keluarga akibat dari gejala stres mempengaruhi pengasuhan orangtua, dan gejala stres juga dapat berkontribusi langsung pada kualitas keluarga, kurangnya komunikasi, rasa pengabaian pada anak-anak, konflik keluarga yang lebih besar dan rendahnya kohesi keluarga.

Pada penelitian ini instrumen fungsi keluarga yang digunakan adalah *The McMaster*

Family Assesment Device (FAD) yang dikembangkan oleh Epstein, Bishop, dan Levin (1983). Terdapat tujuh dimensi untuk melihat fungsi keluarga. Semakin banyak interaksi positif yang ditunjukkan keluarga maka semakin tinggi fungsi keluarga. Ketujuh dimensi tersebut adalah pemecahan masalah, komunikasi, peran, responsif afektif, keterlibatan afektif, kontrol perilaku, dan fungsi umum. Pemecahan masalah adalah kemampuan keluarga untuk menyelesaikan masalah yang mengancam integritas dan kapasitas sistem keluarga dengan mengukur pola interaksi keluarga. Komunikasi adalah cara bertukar informasi yang dilakukan antar anggota keluarga. Peran adalah pola perilaku individu dalam memelihara dan mengelola sistem keluarga meliputi penyediaan sumberdaya, dan dukungan. Responsive afektif adalah kemampuan keluarga untuk menanggapi berbagai rangsangan dengan kualitas dan kuantitas perasaan yang tepat. Keterlibatan afektif adalah kemampuan dalam menunjukkan minat dan penghargaan terhadap kegiatan dan minat anggota keluarga. Kontrol perilaku adalah kemampuan untuk mengontrol, mengendalikan dan mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi yang tepat. Fungsi umum adalah mengukur keharmonisan keluarga yang dibentuk dari penggabungan semua dimensi (pemecahan masalah, komunikasi, peran, respon afektif, keterlibatan afektif dan kontrol perilaku) menjadi satu dimensi yang bersifat umum. Miller, Epstein, Bishop, dan Keitner, (1985) menjelaskan bahwa tujuh dimensi yang mengukur fungsi keluarga pada instrumen *The McMaster Family Assesment Device* (FAD) sangat signifikan dalam mengidentifikasi keluarga yang berfungsi dengan baik atau terdapat masalah dalam menjalankan fungsi keluarga dan menunjukkan kohesi serta kemampuan adaptasi keluarga dalam situasi yang dihadapi.

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa stres dapat menurunkan fungsi keluarga. Keluarga membutuhkan dukungan sosial untuk dapat mengatasi stres sehingga fungsi keluarga bisa dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dukungan sosial dan fungsi keluarga pascagempa di wilayah pegunungan dan pesisir.

METODE

Desain penelitian ini menggunakan *cross-sectional study*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan metode survei menggunakan kuesioner melalui wawancara. Penelitian ini dilaksanakan di dua wilayah, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Adapun pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive*. Contoh dalam penelitian ini ialah istri yang tinggal di wilayah pegunungan dan pesisir yaitu di; Kecamatan Sembalun mewakili wilayah pegunungan, dan Kecamatan Sambelia mewakili wilayah pesisir, di Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan rekomendasi pemerintah kecamatan dipilih hunian sementara (huntara) dengan alasan jumlah rumah rusak berat terbanyak yaitu Desa Sembalun dan Desa Sugian, dengan hunian sementara yang di bangun pada tanah milik responden.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga Februari 2019. Populasi penelitian secara keseluruhan adalah keluarga korban bencana gempa bumi Lombok wilayah pegunungan dan pesisir. Contoh adalah responden atau peserta penelitian yang bersedia diwawancarai sesuai dengan instrumen penelitian. Kriteria peserta penelitian; (1) berasal dari keluarga lengkap (utuh), (2) memiliki anak usia balita dan (3) bersedia dijadikan contoh. Jumlah populasi 2.371 kepala keluarga wilayah pegunungan, dan 125 kepala keluarga wilayah pesisir.

Berdasarkan hasil penjarangan terhadap kesesuaian kriteria penelitian terdapat 331 kepala keluarga wilayah pegunungan, dan 125 kepala keluarga wilayah pesisir. Teknik penarikan contoh yang digunakan adalah *random sampling disproporsional*. Berdasarkan data kepala keluarga dari pemerintah *by name, by address* dipilih secara acak (60 dari 331 kepala keluarga dari wilayah pegunungan dan 60 dari 125 kepala keluarga dari wilayah pesisir) dengan microsoft excel. Jumlah contoh dalam penelitian ini adalah 120 orang istri dengan perbandingan jumlah contoh, yaitu 60 orang responden wilayah pegunungan dan 60 orang responden wilayah pesisir.

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer yang dikumpulkan meliputi karakteristik demografi (usia, pendidikan, pekerjaan, jumlah anak dan besar keluarga), dukungan sosial menggunakan instrumen *Multidimensional Scale of Perceived Sosial Support* (MSPSP) yang dikembangkan oleh Zimet *et al.* (1988). Variabel ini dijawab dengan menggunakan skala Likert meliputi (STS=Sangat Tidak Setuju; TS =Tidak Setuju; N=Netral; S=Setuju; dan SS=Sangat Setuju) dan terdiri dari 12 pernyataan. Fungsi keluarga menggunakan instrumen *The McMaster Family Assesment Device* (FAD) yang dikembangkan oleh Epstein *et al.* (1983). Instrumen ini diadaptasi pada keluarga korban bencana dengan melakukan uji coba instrumen pada lima belas partisipan untuk melihat keterbacaan instrumen. Kuisisioner ini menggunakan 4 skala penilaian (TP=Tidak Pernah; J=Jarang; SR=Sering; SL=Selalu) dan terdiri dari 40 item pernyataan.

Instrumen *Multidimensional Scale of Perceived Sosial Support* (MSPSP) dan *The McMaster Family Assesment Device* (FAD) pada penelitian ini diadaptasi pada keluarga korban bencana dengan melakukan uji coba

instrumen untuk melihat keterbacaan instrumen. Instrumen di uji coba pada lima belas partisipan yang terkena bencana. Hasil uji keterbacaan ditemukan bahwa terdapat bahasa yang masih membingungkan bagi partisipan. Selanjutnya dilakukan revisi, kemudian uji reliabilitas dan validitas instrumen. Hasil uji reliabilitas menunjukkan *Cronbach's Alpha* instrumen MSPSP sebesar 0.818, dan *Cronbach's Alpha* instrumen FAD sebesar 0.846 sehingga alat ukur MSPSP dan FAD cukup reliabel untuk mengukur dukungan sosial dan fungsi keluarga. Sementara itu hasil uji validitas pada lima belas partisipan menunjukkan setiap *item* valid untuk 12 *item* instrumen dukungan sosial dan dari 53 *item* instrumen fungsi keluarga terdapat 40 *item* yang valid dan disesuaikan dengan kondisi sosial di Indonesia.

Data dikumpulkan melalui wawancara, kemudian diolah dan dianalisis melalui *Microsoft Excel 2016* dan *SPSS for windows version 24*. Proses pengolahan data meliputi *editing, coding, entry, scoring*, dan *analyzing*. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensia (*Independent Sample T-Test*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Wilayah

Lokasi penelitian berada di dua desa yang mewakili wilayah pegunungan dan pesisir, yaitu Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun dan Desa Sugian Kecamatan Sambelia. Desa Sembalun Bumbung merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian dari permukaan air laut yaitu 1177 mdpl. Desa Sugian merupakan daerah yang mewakili wilayah pesisir, dengan ketinggian Desa Sugian dari permukaan air laut adalah 19 mdpl.

Pada penelitian ini, wilayah pegunungan adalah dataran yang terletak pada ketinggian

di atas 700 m dari permukaan air laut dan terdiri dari beberapa gunung yang membentuk kawasan pegunungan. Sedangkan, wilayah pesisir adalah suatu hamparan tanah lapang dengan ketinggian yang relatif rendah yaitu tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut yang mencakup pesisir, pantai, dan perairan laut dekat pantai (*near shore*).

Karakteristik Demografi

Karakteristik demografi dalam penelitian ini diukur melalui usia, Pendidikan, jumlah anak, besar keluarga dan pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan, usia korban bencana termasuk dalam dewasa awal baik pada istri di wilayah pegunungan (98.3%) maupun di pesisir (100.0%). Sebagian besar pendidikan korban bencana di wilayah pegunungan (83.3%) dan di pesisir (85.1%) berada pada jenjang pendidikan SMP ke bawah. Rata-rata jumlah anak yang dimiliki korban bencana di wilayah pegunungan dan pesisir adalah 2 orang. Rata-rata besar keluarga yang dimiliki korban bencana di wilayah pegunungan dan pesisir adalah 5 orang. Berdasarkan pembagian wilayah tempat tinggal, istri di wilayah pesisir lebih banyak yang bekerja sebagai buruh, sedangkan istri di wilayah pegunungan lebih banyak bekerja sebagai petani. Tidak terdapat perbedaan yang nyata usia, lama pendidikan, jumlah anak dan besar keluarga korban bencana berdasarkan wilayah tempat tinggal (Tabel 1).

Tabel 1. Sebaran dan data statistik berdasarkan karakteristik demografi dan wilayah tempat tinggal

Karakteristik demografi	Pegunungan	Pesisir
Kategori usia (tahun)		
Dewasa awal (18-40 tahun)	98.3	100.0
Dewasa madya (41-60 tahun)	1.7	-
Dewasa akhir (>60 tahun)	-	-
Rata-rata	28.9	27.8
SD	6.1	6.6
Min-Max	19-42	18-40

p-value	0.328	
Kategori pendidikan (tingkat)		
Tidak Tamat SD	16.7	26.7
Tamat SD	23.3	36.7
Tamat SMP	43.3	21.7
Tamat SMA	13.3	10.0
Diploma (D1/D2/D3)	0.0	0.0
Sarjana (S1/S2/S3)	3.3	5.0
Rata-rata lama (tahun)	8.4	7.5
SD	3.3	3.5
Min-Max	1-16	0-16
p-value	0.164	
Jumlah anak (orang)		
1	28.3	33.3
2	43.3	25.0
3	20.0	23.3
4	6.7	10.0
5	1.7	1.7
6	0.0	6.7
Rata-rata	2	2
SD	1	1
Min-Max	1-5	1-6
p-value	0.156	
Besar keluarga (orang)		
Kecil (≤ 4)	50.0	56.7
Sedang (5-7)	41.7	40.0
Besar (≥ 8)	8.3	3.3
Rata-rata	5.0	5.0
SD	1.9	1.4
Min-Max	3-12	3-8
p-value	0.126	
Kategori Pekerjaan		
Tidak bekerja	18.3	28.3
Petani	36.7	8.3
Buruh	35.0	55.0
PNS/ABRI/Polisi	0.0	0.0
Pegawai swasta	3.3	5.0
Wiraswasta	6.7	3.3

Dukungan Sosial

Tabel 2 menunjukkan bahwa dukungan sosial korban bencana di wilayah pegunungan lebih tinggi dari pada di wilayah pesisir secara signifikan ($p\text{-value}=0.000$). Proporsi dukungan sosial terbanyak ditunjukkan oleh setengah

korban bencana (50.0%) di wilayah pegunungan berada pada dukungan sosial terkategori sedang dan tiga perempat korban bencana (78.3%) di wilayah pesisir berada pada dukungan sosial kategori rendah. Hal ini berarti dukungan sosial korban bencana di wilayah pegunungan sudah ada yang dipersepsikan baik. Namun, masih ada yang dipersepsikan belum maksimal. Sedangkan korban bencana di wilayah pesisir mempersepsikan dukungan sosial rendah yang menandakan bahwa kurang maksimalnya dukungan sosial.

Tabel 2. Sebaran dan data statistik berdasarkan kategori dukungan sosial dan wilayah tempat tinggal

Dukungan sosial	Persentase Kategori	
	Pegunungan	Pesisir
Rendah (<60)	40.0	78.3
Sedang (60-79)	50.0	16.7
Tinggi (≥ 80)	10.0	5.0
Total	100.0	100.0
Min-maks	29.2-100	4.2-87.5
Mean \pm SD	62.7 \pm 15.0	40.7 \pm 20.3
p-value	0.000**	

Keterangan: ** Signifikan pada $p<0.01$

Dukungan sosial korban bencana di wilayah pegunungan berada pada kategori sedang disebabkan oleh 70.0 persen korban bencana menyatakan mendapatkan bantuan berupa makanan, dan hunian sementara, dan memiliki keluarga yang membuat merasa nyaman dengan memberikan nasihat dan perhatian. Namun, 58.3 persen korban bencana menyatakan tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan tidak memiliki keluarga yang memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok yang dibutuhkan. Akan tetapi, korban bencana di wilayah pesisir mempersepsikan dukungan sosial terkategori rendah. Hal ini disebabkan oleh 75.0 persen korban bencana menyatakan tidak mendapat solusi untuk memperbaiki keadaan, dan tidak

memiliki teman yang memberikan bantuan berupa waktu dan tenaga saat dibutuhkan.

Pengukuran dukungan sosial pada penelitian ini dilihat dalam tiga dimensi yaitu; dukungan keluarga, teman dan pemerintah. Tabel 5 menunjukkan bahwa dimensi dukungan keluarga yang dirasakan korban bencana di wilayah pegunungan lebih tinggi dari pada pesisir secara signifikan ($p\text{-value}=0.000$). Sebanyak 20.0 persen korban bencana di wilayah pegunungan memiliki dukungan keluarga berada pada ketegori tinggi dan 73.3 persen korban bencana di wilayah pesisir memiliki dukungan keluarga berada pada ketegori rendah.

Korban bencana wilayah pegunungan mempersepsikan dimensi dukungan keluarga pada kategori tinggi karena (65.0%) korban bencana di wilayah pegunungan menyatakan setuju memiliki keluarga yang membuat merasa nyaman dengan memberikan nasihat dan perhatian, dan (63.3%) setuju memiliki keluarga yang memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Hal ini berbeda dengan korban bencana wilayah pesisir yang mempersepsikan dimensi dukungan keluarga pada kategori rendah. Hal ini disebabkan oleh (60.0%) korban bencana di wilayah pesisir menyatakan tidak setuju memiliki keluarga yang memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi, (68.3%) tidak setuju membicarakan masalah yang dihadapi kepada keluarga, (58.3%) tidak setuju memiliki keluarga yang membuat merasa nyaman dengan memberikan nasihat dan perhatian, dan (63.3%) tidak setuju memiliki keluarga yang memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok saat mereka membutuhkan.

Dimensi dukungan teman korban bencana wilayah pegunungan lebih tinggi daripada responden wilayah pesisir secara signifikan ($p\text{-value}=0.000$). Hasil menunjukkan bahwa

Tabel 3. Sebaran responden berdasarkan kategori dimensi dukungan sosial dan wilayah tempat tinggal

Dimensi dukungan sosial	Persentase Kategori	
	Pegunungan	Pesisir
Dukungan keluarga		
Rendah (<60)	41.7	73.3
Sedang (60-79)	38.3	20.0
Tinggi (≥80)	20.0	6.7
Total	100.0	100.0
Min-maks	0.0-100	0.0-87.0
Mean±SD	61.6±18.7	45.6±23.8
p-value	0.000**	
Dukungan teman		
Rendah (<60)	46.7	76.7
Sedang (60-79)	28.3	15.0
Tinggi (≥80)	25.0	8.3
Total	100.0	100.0
Min-maks	18.0-100	0.0-93.0
Mean±SD	62.6±18.9	40.9±25.6
p-value	0.000**	
Dukungan pemerintah		
Rendah (<60)	43.3	81.7
Sedang (60-79)	26.7	10.0
Tinggi (≥80)	30.0	8.3
Total	100.0	100.0
Min-maks	18.0-100	0.0-93.0
Mean±SD	62.9±21.1	34.8±26.1
p-value	0.000**	

Keterangan: ** Signifikan pada $p < 0.01$

25.0 persen korban bencana di wilayah pegunungan berada pada dukungan teman ketegori tinggi dan 76.7 persen korban bencana wilayah pesisir memiliki dukungan teman terkategori rendah. Dimensi dukungan teman pada korban bencana wilayah pegunungan terkategori tinggi karena 63.3 persen korban bencana di wilayah pegunungan menyatakan setuju memiliki teman yang membuat merasa nyaman dengan memberikan nasihat dan perhatian dan 53.3 persen setuju memiliki teman yang memberikan bantuan berupa waktu dan tenaga, 53.3 persen setuju memiliki teman yang memberikan solusi terhadap masalah

yang dihadapi, dan 53.3 persen setuju memiliki teman yang menemani pada saat bahagia dan sedih. Sedangkan dimensi dukungan teman pada korban bencana wilayah pesisir berada pada kategori rendah. Hal ini disebabkan oleh 66.7 persen korban bencana di wilayah pesisir menyatakan tidak setuju memiliki teman yang membuat merasa nyaman dengan memberikan nasihat dan perhatian dan 73.3 persen tidak setuju memiliki teman yang memberikan bantuan berupa waktu dan tenaga, 63.4 persen tidak setuju memiliki teman yang memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi, dan 65.0 persen tidak setuju memiliki teman yang menemani pada saat bahagia dan sedih

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dimensi dukungan pemerintah pada korban bencana di wilayah pegunungan dan pesisir ($p\text{-value} = 0.000$). Dimensi dukungan pemerintah pada korban bencana di wilayah pegunungan lebih tinggi dari pada pesisir. Hasil juga menunjukkan 30.0 persen korban bencana di wilayah pegunungan mempersepsikan dukungan pemerintah berada pada kategori tinggi, dan 76.7 persen korban bencana di wilayah pesisir mempersepsikan pada kategori rendah. Korban bencana di wilayah pegunungan mempersepsikan dimensi dukungan pemerintah terkategori tinggi karena 70.0 persen korban bencana di wilayah pegunungan menyatakan setuju mendapatkan bantuan berupa makanan, dan hunian sementara dan 60.0 persen setuju merasa nyaman dengan adanya bantuan menghilangkan trauma dan kekhawatiran selama di hunian sementara. Hal ini berbeda dengan korban bencana di wilayah pesisir berada pada kategori rendah. Hal ini disebabkan oleh 71.7 persen korban bencana di wilayah pesisir menyatakan tidak setuju mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, 73.3 persen tidak setuju merasa nyaman dengan

adanya bantuan menghilangkan trauma dan kekhawatiran selama di hunian sementara, dan 75.0 persen tidak setuju mendapat solusi untuk memperbaiki keadaan.

Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga pada korban bencana wilayah pesisir lebih tinggi dari pada wilayah pegunungan secara signifikan ($p\text{-value} = 0.019$). hal ini berarti korban bencana di wilayah pesisir memiliki fungsi keluarga lebih baik daripada korban bencana di wilayah pegunungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar korban bencana (86.7%) di wilayah pegunungan berada pada fungsi keluarga kategori sedang, dan 26.7 persen korban bencana di wilayah pesisir berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian dari fungsi keluarga korban bencana di wilayah pegunungan masih ada yang rendah. Sedangkan fungsi keluarga di wilayah pesisir sudah ada yang berada pada kategori tinggi yaitu sudah baik pelaksanaannya.

Tabel 4. Sebaran dan data statistik berdasarkan kategori fungsi keluarga dan wilayah tempat tinggal

Fungsi keluarga	Persentase Kategori	
	Pegunungan	Pesisir
Rendah (<60)	5.0	8.3
Sedang (60-79)	86.7	65.0
Tinggi (≥ 80)	8.3	26.7
Total	100.0	100.0
Min-maks	46.7-83.3	55.0-89.2
Mean \pm SD	70.1 \pm 6.7	73.4 \pm 8.6
p-value	0.019*	

Keterangan: * Signifikan pada $p < 0.05$

Fungsi keluarga pada korban bencana wilayah pegunungan terkategori sedang disebabkan oleh korban bencana di wilayah pegunungan menyatakan pembagian tugas dalam keluarga merata, dan sering saling menghargai dan menghormati saat

menyampaikan saran dan masukan. Namun, sulit merencanakan kegiatan keluarga karena tidak menemukan kesepakatan bersama, dan sulit memahami perasaan anggota keluarga yang lain melalui apa yang dikatakan. Korban bencana di wilayah pesisir memiliki fungsi keluarga terkategori tinggi. Hal ini disebabkan oleh korban bencana di wilayah pesisir menyatakan sering saling memberikan perhatian agar terhindar dari gangguan emosional. Selain itu, puas dengan tugas keluarga yang diberikan, terbiasa menunjukkan kasih sayang satu sama lain, dan sering memberikan dukungan berupa perhatian saat anggota keluarga sedang mengalami masalah (Tabel 4).

Pengukuran fungsi keluarga dalam penelitian ini dilihat pada tujuh dimensi yaitu; dimensi pemecahan masalah, komunikasi, peran, respon afeksi, keterlibatan afeksi, kontrol perilaku dan fungsi umum. Tabel 5 menunjukkan bahwa pencapaian terendah dimensi fungsi keluarga pada korban bencana di wilayah pegunungan dan pesisir yaitu dimensi fungsi umum. Sedangkan, rata-rata tertinggi pencapaian dimensi fungsi keluarga pada kedua wilayah yaitu dimensi keterlibatan afeksi. Hasil uji beda menunjukkan bahwa dimensi peran, respon afeksi dan fungsi umum pada korban bencana wilayah pesisir lebih tinggi daripada pegunungan.

Tabel 5. Sebaran kategori dimensi fungsi keluarga berdasarkan wilayah tempat tinggal

Dimensi fungsi keluarga	Persentase Kategori	
	Pegunungan	Pesisir
Pemecahan masalah		
Rendah (<60)	18.3	18.3
Sedang (60-79)	46.7	40.0
Tinggi (≥80)	35.0	41.7
Total	100.0	100.0
Min-maks	33.0-100	33.3-100
Mean±SD	68.7±15.7	73.3±17.4
p-value	0.167	

Dimensi fungsi keluarga	Persentase Kategori	
	Pegunungan	Pesisir
Komunikasi		
Rendah (<60)	36.7	23.3
Sedang (60-79)	33.3	41.7
Tinggi (≥80)	30.0	35.0
Total	100.0	100.0
Min-maks	25.0-100	33.3-100
Mean±SD	68.1±15.1	73.4±16.9
p-value	0.090	
Peran		
Rendah (<60)	28.3	16.7
Sedang (60-79)	65.0	68.3
Tinggi (≥80)	6.7	15.0
Total	100.0	100.0
Min-maks	37.0-87.0	41.7-95.8
Mean±SD	64.5±10.6	70.8±10.6
p-value	0.003**	
Respon afeksi		
Rendah (<60)	48.3	33.3
Sedang (60-79)	41.7	38.3
Tinggi (≥80)	10.0	28.3
Total	100.0	100.0
Min-maks	33.0-91.0	25.0-100
Mean±SD	62.7±12.4	69.5±15.3
p-value	0.012**	
Keterlibatan afeksi		
Rendah (<60)	3.3	5.0
Sedang (60-79)	33.3	40.0
Tinggi (≥80)	63.3	55.0
Total	100.0	100.0
Min-maks	40.0-100	46.7-100
Mean±SD	78.6±11.8	79.2±14.3
p-value	0.926	
Kontrol perilaku		
Rendah (<60)	5.0	6.7
Sedang (60-79)	51.7	61.7
Tinggi (≥80)	43.3	31.7
Total	100.0	100.0
Min-maks	52.0-95.0	23.8-95.2
Mean±SD	74.8.6±9.2	73.4±11.5
p-value		
Fungsi umum		
Rendah (<60)	41.7	35.0
Sedang (60-79)	58.3	51.7

Dimensi fungsi keluarga	Persentase Kategori	
	Pegunungan	Pesisir
Tinggi (≥ 80)	0.0	13.3
Total	100.0	100.0
Min-maks	33.0-79.0	37.5-87.5
Mean \pm SD	60.7 \pm 9.2	65.1 \pm 11.8
p-value	0.040*	

Keterangan: * Signifikan pada $p < 0.05$; ** Signifikan pada $p < 0.01$

Pemecahan masalah adalah kemampuan keluarga untuk menyelesaikan masalah yang mengancam integritas dan kapasitas sistem keluarga dengan mengukur pola interaksi keluarga. Berdasarkan dimensi pemecahan masalah, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pemecahan masalah pada keluarga di wilayah pegunungan dan keluarga di wilayah pesisir. Hasil menunjukkan bahwa 46.7 persen korban bencana di wilayah pegunungan memiliki pemecahan masalah berada pada kategori sedang dan 41.7 persen korban bencana di wilayah pesisir terkategori tinggi.

Dimensi pemecahan masalah pada korban bencana di wilayah pegunungan pada kategori sedang karena 93.4 persen korban bencana di wilayah pegunungan menyatakan sering saling menghargai dan menghormati saat menyampaikan saran dan masukan, dan 91.7 persen sering saling memberikan perhatian agar terhindar dari gangguan emosional. Namun, 35.0 persen korban bencana wilayah pegunungan menyatakan tidak pernah mengevaluasi bersama keberhasilan suatu keputusan, 18.3 persen tidak pernah berdiskusi untuk mendapatkan keputusan bersama, dan 13.4 persen tidak pernah mencoba memecahkan masalah secara bersama-sama dengan berbagai cara. Korban bencana wilayah pesisir menunjukkan dimensi pemecahan masalah berada pada kategori tinggi. Hal ini disebabkan oleh 85.0 persen korban bencana

wilayah pesisir menyatakan sering berdiskusi untuk mendapatkan keputusan bersama, 90.0 persen sering saling memberikan perhatian agar terhindar dari gangguan emosional, 93.3 persen sering saling menghargai dan menghormati saat menyampaikan saran dan masukan, dan 88.3 persen sering mencoba memecahkan masalah secara bersama-sama dengan berbagai cara.

Komunikasi adalah cara bertukar informasi yang dilakukan antar anggota keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara komunikasi pada korban bencana di wilayah pegunungan dan pesisir. Sebanyak 33.3 persen korban bencana di wilayah pegunungan dan 41.7 persen korban bencana di wilayah pesisir berada pada dimensi komunikasi kategori sedang. Hal ini disebabkan oleh 88.3 persen korban bencana di wilayah pegunungan dan 76.7 persen korban bencana di wilayah pesisir menyatakan sering terbuka menyampaikan masalah agar dipahami anggota keluarga lainnya dan 81.6 persen korban bencana di wilayah pegunungan dan 86.7 persen korban bencana di wilayah pesisir sering membiasakan bersikap jujur. Namun, sebanyak 36.7 persen korban bencana di wilayah pegunungan dan 31.7 persen korban bencana di wilayah pesisir menyatakan sulit memahami perasaan anggota keluarga yang lain melalui apa yang mereka katakan dan 23.3 persen korban bencana di wilayah pegunungan dan 8.3 persen korban bencana di wilayah pesisir tidak berbicara satu sama lain ketika marah.

Peran adalah pola perilaku individu dalam memelihara dan mengelola sistem keluarga meliputi penyediaan sumberdaya, dan dukungan. Dimensi peran korban bencana di wilayah pesisir lebih tinggi daripada responden di wilayah pegunungan secara signifikan ($p\text{-value}=0.003$). Hal ini berarti korban bencana di wilayah pesisir memiliki dimensi peran

lebih baik daripada korban bencana di wilayah pegunungan. Hasil menunjukkan 28.3 persen korban bencana wilayah pegunungan berada pada dimensi peran kategori rendah dan 15.0 persen korban bencana wilayah pesisir memiliki dimensi peran terkategori sedang.

Dimensi peran pada korban bencana wilayah pegunungan terkategori rendah karena 55.0 persen korban bencana di wilayah pegunungan menyatakan memiliki kesulitan memenuhi biaya hidup setiap bulan, 43.3 persen memiliki waktu yang sedikit untuk menyalurkan hobi, 35.0 persen tidak pernah membahas pembagian peran dalam pekerjaan rumah tangga, dan 30.0 persen tidak pernah mengevaluasi tanggung jawab yang telah disepakati. Hal ini berbeda dengan korban bencana di wilayah pesisir yang berada pada dimensi peran kategori sedang. Hal ini disebabkan oleh 80.0 persen korban bencana di wilayah pesisir menyatakan sering mengevaluasi tanggung jawab yang telah disepakati, 86.6 persen sering mengingatkan untuk memenuhi tanggung jawab dalam keluarga dan 60.0 persen tidak memiliki kesulitan memenuhi biaya hidup setiap bulan. Namun, sebanyak 40.0 persen tidak pernah mengingatkan untuk saling membantu dalam pekerjaan rumah, 36.6 persen tidak pernah membahas pembagian peran dalam pekerjaan rumah tangga dan 38.3 persen memiliki waktu yang sedikit untuk menyalurkan hobi.

Respon afektif adalah kemampuan keluarga untuk menanggapi berbagai rangsangan dengan kualitas dan kuantitas perasaan yang tepat. Dimensi respon afektif korban bencana di wilayah pesisir lebih tinggi daripada korban bencana wilayah pegunungan secara signifikan ($p\text{-value}=0.012$). Hal ini berarti korban bencana di wilayah pesisir memiliki dimensi respon afektif lebih baik daripada korban bencana di wilayah pegunungan. Hasil menunjukkan sebanyak 48.3 persen korban bencana wilayah

pegunungan berada pada dimensi respon afektif kategori rendah dan 28.3 persen korban bencana wilayah pesisir berada pada kategori sedang.

Dimensi respon afektif pada korban bencana wilayah pegunungan terkategori rendah karena 16.7 persen korban bencana tidak pernah bersikap lembut satu sama lain, 75 persen tidak pernah menunjukkan rasa sedih dengan menangis di depan anggota keluarga dan 11.7 persen tidak terbiasa menunjukkan kasih sayang satu sama lain antar anggota keluarga. Sedangkan korban bencana wilayah pesisir memiliki dimensi respon afektif pada kategori sedang. Hal ini disebabkan oleh 91.6 persen korban bencana di wilayah pesisir menyatakan saling menanggapi satu sama lain secara emosional, dan 86.7 persen terbiasa menunjukkan kasih sayang satu sama lain antar anggota keluarga. Namun, 66.7 persen korban bencana di wilayah pesisir menyatakan tidak pernah menunjukkan rasa sedih dengan menangis di depan anggota keluarga, dan 15.0 persen tidak pernah bersikap lembut satu sama lain.

Keterlibatan afektif adalah kemampuan dalam menunjukkan minat dan penghargaan terhadap kegiatan dan minat anggota keluarga. Hasil uji beda menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara keterlibatan afektif pada korban bencana di wilayah pegunungan dan korban bencana di wilayah pesisir. Sebanyak 33.3 persen korban bencana di wilayah pegunungan dan 40.0 persen korban bencana wilayah pesisir berada pada keterlibatan afektif kategori sedang.

Dimensi keterlibatan afektif pada korban bencana wilayah pegunungan dan pesisir terkategori sedang karena 88.3 persen korban bencana wilayah pegunungan dan 90.0 persen korban bencana wilayah pesisir menyatakan sering saling membantu ketika anggota

keluarga dalam masalah, dan 88.3 persen korban bencana wilayah pegunungan dan 90.0 persen korban bencana wilayah pesisir sering menunjukkan pengertian satu sama lain, ketika mendapatkan musibah. Namun, sebanyak 10.0 persen korban bencana wilayah pegunungan dan 18.3 persen korban bencana wilayah pesisir menyatakan saling membantu ketika ada hal yang menguntungkan, dan 18.3 persen korban bencana wilayah pegunungan dan 25.0 persen korban bencana wilayah pesisir bermaksud baik, namun dianggap mengganggu kehidupan anggota keluarga lainnya

Kontrol perilaku adalah kemampuan untuk mengontrol, mengendalikan dan mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi yang tepat. Hasil uji beda menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kontrol perilaku pada korban bencana di wilayah pegunungan dan korban bencana di wilayah pesisir. Sebanyak 51.7 persen korban bencana wilayah pegunungan dan 61.7 persen korban bencana wilayah pesisir memiliki kontrol perilaku pada kategori sedang.

Dimensi kontrol perilaku pada korban bencana di wilayah pegunungan dan pesisir berada pada kategori sedang disebabkan oleh 96.7 persen korban bencana di wilayah pegunungan dan 91.7 persen korban bencana di wilayah pesisir menyatakan tidak mudah melanggar aturan didalam keluarga, 100 persen korban bencana di wilayah pegunungan dan 93.3 persen korban bencana di wilayah pesisir tidak pernah memberi hukuman/peringatan fisik dengan memukul, dan 96.6 persen korban bencana di wilayah pegunungan dan 96.6 persen korban bencana di wilayah pesisir tidak pernah tidak peduli dengan apapun yang terjadi di keluarga. Namun, sebanyak 30.0 persen korban bencana di wilayah pegunungan dan 25.0 persen korban bencana di wilayah pesisir tidak memiliki aturan apa pun di dalam keluarga, 20.0

persen korban bencana di wilayah pegunungan dan 25.0 persen korban bencana di wilayah pesisir tidak ada sanksi ketika ada aturan yang dilanggar dan 21.6 persen korban bencana di wilayah pegunungan dan 21.7 persen korban bencana di wilayah pesisir tidak pernah saling berdiskusi untuk mengatasi kejadian darurat.

Fungsi umum adalah mengukur keharmonisan keluarga yang dibentuk dari penggabungan semua dimensi (pemecahan masalah, komunikasi, peran, respon afektif, keterlibatan afektif dan kontrol perilaku) menjadi satu dimensi yang bersifat umum. Dimensi fungsi umum korban bencana di wilayah pesisir lebih tinggi daripada korban bencana di wilayah pegunungan secara signifikan ($p\text{-value}=0.040$). Hal ini berarti korban bencana di wilayah pesisir memiliki dimensi fungsi umum lebih baik daripada korban bencana di wilayah pegunungan. Sebanyak 41.7 persen korban bencana wilayah pegunungan dan 51.7 persen korban bencana wilayah pesisir berada pada dimensi fungsi umum kategori sedang.

Dimensi fungsi umum pada korban bencana wilayah pegunungan dan pesisir terkategori sedang karena 86.7 persen korban bencana wilayah pegunungan dan 78.4 persen korban bencana wilayah pesisir menyatakan sering berbagi cerita antar anggota keluarga, 90.0 persen korban bencana wilayah pegunungan dan 90.0 persen korban bencana wilayah pesisir sering saling menerima satu sama lain apapun kondisinya, dan 85.0 persen korban bencana wilayah pegunungan dan 90.0 persen korban bencana wilayah pesisir sering memberikan dukungan berupa perhatian saat anggota keluarga sedang mengalami masalah. Namun, sebanyak 21.6 persen korban bencana wilayah pegunungan dan 21.7 persen korban bencana wilayah pesisir menyatakan tidak pernah berdiskusi untuk mengatasi masalah darurat yang dihadapi, dan 46.7 persen korban

bencana wilayah pegunungan dan 35.0 persen korban bencana wilayah pesisir sulit untuk merencanakan kegiatan keluarga karena tidak menemukan kesepakatan satu sama lain.

Pengaruh antara Karakteristik Keluarga, Tingkat Stress, Strategi Koping, Dukungan Sosial terhadap Fungsi Keluarga

Hasil analisis regresi linier model variabel-variabel terhadap fungsi keluarga pada Tabel (6) menunjukkan angka *Adjusted R Square* sebesar 0.167 yang berarti model tersebut menjelaskan 16.7 persen model variabel-variabel memengaruhi fungsi keluarga dan sisanya 83.3 persen dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah tempat tinggal berpengaruh positif terhadap fungsi keluarga ($\beta=0.459$). Hal ini menunjukkan bahwa keluarga di wilayah pesisir menjalankan fungsi keluarga yang lebih tinggi dibandingkan keluarga di wilayah pegunungan.

Dukungan sosial berpengaruh positif terhadap fungsi keluarga ($\beta=0.486$). Setiap kenaikan satu satuan dukungan sosial maka akan menaikkan fungsi keluarga sebesar 0.150 poin. Setiap kenaikan satu satuan dukungan sosial maka akan menaikkan fungsi keluarga sebesar 0.188 poin. Hal ini berarti semakin tinggi dukungan sosial maka semakin tinggi fungsi keluarga.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban bencana mengalami berbagai dampak dari bencana baik fisik maupun psikologi. Murni (2017) menyatakan bahwa korban bencana memiliki akses sumberdaya yang terbatas karena kehilangan mata pencaharian, aset berharga, dan keterbatasan pilihan untuk keluar dari masalah yang dihadapi pascabencana. Selain itu, bencana menjadi sumber stres bagi

korban bencana sehingga fungsi keluarga yang dijalankan menjadi terganggu. Gejala stres akan memberikan pengaruh pada kurang efektifnya fungsi keluarga (Cummings *et al.* 2005).

Dukungan sosial memiliki peran penting pada situasi sulit yang dihadapi korban bencana. Dukungan sosial dapat memberi pengaruh positif pada kondisi fisik dan psikologi keluarga korban bencana. dukungan sosial merupakan bagian dari cara untuk mengatasi dan pemulihan dari dampak terkena bencana, dengan aktifnya sumberdaya sosial memainkan peran maka membangun ketahanan dan mengurangi resiko paparan bencana (Sunarti dan Syahrini 2011). Dukungan sosial di wilayah pegunungan lebih tinggi daripada pesisir. Hasil ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, Rahmi dan Satria (2015) menyebutkan bahwa masyarakat pesisir memiliki jaringan sosial yang kuat dan pemahaman terhadap bencana yang baik sehingga kerentanan terhadap bencana rendah. Perbedaan karakteristik sosial keluarga di wilayah pesisir dan pegunungan juga diduga berpengaruh terhadap persepsi dukungan yang diterima. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Weems *et al.* 2007). Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa perbedaan jarak wilayah dengan pusat bencana berhubungan dengan dukungan sosial, yaitu wilayah yang lebih jauh dari pusat utama terjadinya bencana mendapatkan dukungan yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah pegunungan berada lebih dekat dengan pusat gempa memiliki dukungan yang lebih tinggi daripada pesisir yang berada lebih jauh dengan pusat terjadinya bencana.

Keluarga berfungsi dengan baik ketika, anggota keluarga cenderung tidak berkembang masalah psikologis, kohesif dalam tindakan, mampu beradaptasi dengan stresor, dan memiliki aturan dan batasan keluarga yang jelas (Petrocelli *et al.* 2003). Fungsi keluarga

pada keluarga di wilayah pesisir lebih tinggi daripada keluarga di wilayah pegunungan. Pada dimensi peran, respon afeksi dan fungsi umum lebih tinggi di wilayah pesisir dari pada pegunungan. Hal ini diduga karena perbedaan paparan bencana yang dirasakan dimana korban bencana di Pegunungan lebih parah kerusakannya dari pada keluarga di pesisir. Sejalan dengan penelitian McDermott dan Cobham (2012). Temuan penelitian tersebut menjelaskan bahwa paparan bencana secara signifikan meningkatkan disfungsi keluarga, bencana membuat keluarga hanya berusaha menyelesaikan tugas-tugas praktis yang mendesak.

Dukungan sosial yang tinggi dapat meningkatkan fungsi keluarga. Sejalan dengan penelitian Eskisu (2014), yaitu dukungan sosial yang tinggi meningkatkan fungsi keluarga terutama dalam penyelesaian masalah dan komunikasi. Anglely *et al.* (2015) menyebutkan bahwa dukungan sosial berhubungan signifikan dengan fungsi keluarga sehingga memberikan efek positif pada kompetensi pengasuhan anak. dukungan sosial menjadi sumberdaya yang penting bagi korban bencana. Pada kondisi ini dukungan sosial dari berbagai elemen sangat dibutuhkan agar keluarga mampu menjalankan peran-peran pentingnya. Bahransyaf (2017) menyatakan bahwa pemberdayaan dan penguatan pada korban bencana melalui pembukaan akses ekonomi lokal penting dilakukan agar korban bencana dapat eksis menapaki kehidupan dan penghidupan sosial ekonomi di masa mendatang.

KESIMPULAN

Karakteristik demografi (usia, pendidikan, jumlah anak, besar keluarga dan pekerjaan) antara wilayah pegunungan dan pesisir pada penelitian ini tidak terdapat perbedaan yang nyata. Namun, berdasarkan sebaran pekerjaan

menunjukkan sebagian besar istri di wilayah pegunungan dalam penelitian ini bekerja sebagai petani, dan sebagian besar istri di wilayah pesisir dalam penelitian ini bekerja sebagai buruh. Rata-rata jumlah anak yang dimiliki adalah 2 orang. Dukungan sosial di wilayah pegunungan lebih tinggi dari pada wilayah pesisir. Fungsi keluarga di wilayah pesisir lebih tinggi dari pada keluarga di wilayah pegunungan. Hal ini berarti korban bencana di wilayah pesisir memiliki fungsi keluarga lebih baik daripada korban bencana di wilayah pegunungan. Pada dimensi peran, respon afeksi dan fungsi umum lebih tinggi di wilayah pesisir dari pada pegunungan. Hal ini berarti korban bencana di wilayah pesisir memiliki dimensi peran, respon afeksi dan fungsi umum lebih baik daripada korban bencana di wilayah pegunungan.

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi keluarga yaitu wilayah tempat tinggal, dan dukungan sosial.

SARAN

1. Bagi pihak keluarga: Dukungan sosial dapat ditingkatkan melalui partisipasi pihak keluarga dalam meningkatkan komunikasi yang baik agar saling menguatkan sehingga tidak merasa terbebani secara berlebihan dengan masalah yang dihadapi.
2. Bagi pemerintah diharapkan memberikan informasi yang akurat mengenai perkembangan penanganan rekonstruksi fisik korban pascabencana, dan meningkatkan pelatihan-pelatihan terkait program pemberdayaan perekonomian keluarga melalui wirausaha produk lokal untuk memotivasi masyarakat agar lebih berdaya.
3. Kementerian sosial diharapkan dapat memaksimalkan program-program yang sudah direncanakan seperti kampung siaga bencana, dukungan psikososial

untuk meningkatkan fungsi keluarga dan dukungan sosial pada keluarga korban bencana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang telah memberikan dukungan finansial terhadap pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Angle, M., Divney, A., Magriples, U., & Kershaw, T. (2015). Social support, family functioning and parenting competence in adolescent parents. *Maternal and child health journal*, 19(1), 67-73.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2018). 1.999 Kejadian Bencana Selama Tahun 2018, Ribuan Korban Meninggal Dunia [Internet]. [diunduh pada 25 Oktober 2018]. Tersedia pada: <https://www.bnpb.go.id/1999-kejadian-bencana-selama-tahun-2018-ribuan-korban-meninggal-dunia>
- Bahransyaf, D. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana Berbasis Penelitian. *Sosio Konsepsia*, 14(1), 47-56.
- Banovicinova, A., Levicka, J., & Veres, M. (2014). The impact of poverty on the family system functioning. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 132, 148-153.
- Catani, C., Jacob, N., Schauer, E., Kohila, M., & Neuner, F. (2008). Family violence, war, and natural disasters: A study of the effect of extreme stress on children's mental health in Sri Lanka. *BMC psychiatry*, 8(1), 33.
- Choi, G. (1997). Acculturative stress, social support, and depression in Korean American families. *Journal of Family Social Work*, 2(1), 81-97.
- Cobb, S. (1976). Social support as a moderator of life stress. *Psychosomatic medicine*, 38(5), 300-314.
- Cummings EM, Keller PS, Davies PT. (2005). Towards a family process model of maternal and paternal depressive symptoms: Exploring multiple relations with child and family functioning. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*. 46(5): 479-489. doi: 10.1111/j.1469-7610.2004.00368.x
- Dai L, Wang L. (2015). Review of family functioning. *Open Journal of Social Sciences*, 3(12), 134.
- Epstein, N. B., Bishop, D. S., & Levin, S. (1978). The McMaster model of family functioning. *Journal of Marital and Family therapy*, 4(4), 19-31.
- Eskisu M. (2014). The Relationship between bullying, family functions and perceived social support among high school students. *Social and Behavioral Sciences*. 159 (2014): 492 – 496.
- Ghanbaripanah, A., Mustaffa, M. S., & Ahmad, R. (2013). Structural Analysis of Family Dynamics Across Family Life Cycle in Iran. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 84, 486-490.
- Glass, K., Flory, K., Hankin, B. L., Kloos, B., & Turecki, G. (2009). Are coping strategies, social support, and hope associated with psychological distress among Hurricane Katrina survivors?. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 28(6), 779-795.

- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018). Displacement tracking matrix (system manajemen informasi untuk merekam dan memantau pengungsi) gempa bumi Lombok 2018 round 1. Tersedia pada: <https://app.powerbi.com/w?r=eyjrijoide1njhmzwytmnini00njy1lwjkzdetoduxn2yzogviwyxiiwidci6ije1odgynjjklitzmitndninc1izdzllwjzqtq5yzhlNje4niisimmiojh9>.
- Nam, B., Kim, J. Y., DeVlyder, J. E., & Song, A. (2016). Family functioning, resilience, and depression among North Korean refugees. *Psychiatry research*, 245, 451-457.
- Cummings EM, Keller PS, Davies PT. (2005). Towards a family Process model of maternal and paternal depressive symptoms: Exploring Multiple relations with child and family functioning. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 46(5), 479 -489.
- Maryam S.(2007). Strategi coping keluarga yang terkena musibah gempa dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- McDermott BM, Cobham VE. (2012). Family functioning in the aftermath of a natural disaster. *BMC psychiatry*. 12(1): 55. doi: 10.1186/1471-244X-12-55
- Miller, I. W., Epstein, N. B., Bishop, D. S., & Keitner, G. I. (1985). The McMaster family assessment device: reliability and validity. *Journal of Marital and Family Therapy*, 11(4), 345-356.
- Minihan, S., Liddell, B. J., Byrow, Y., Bryant, R. A., & Nickerson, A. (2018). Patterns and predictors of posttraumatic stress disorder in refugees: a latent class analysis. *Journal of affective disorders*, 232, 252-259.
- Minnes, P. M. (1988). Family stress associated with a developmentally Handicapped child. *International review of research in mental retardation*, 15, 195-226.
- Murni, R. (2017). Permasalahan Keluarga Pasca Bencana Banjir (Studi Kasus Desa Blanting, Kecamatan Sambelia, Kab. Lombok Timur). *Sosio Konsepsia*, 15(3), 254-266.
- Paudel, J., & Ryu, H. (2018). Natural disasters and human capital: The case of Nepal's earthquake. *World Development*, 111, 1-12.
- Petrocelli, J. V., Calhoun, G. B., & Glaser, B. A. (2003). The role of general family functioning in the quality of the mother-daughter relationship of female African American juvenile offenders. *Journal of Black Psychology*, 29(4), 378-392.
- Pilisuk, M., & Parks, S. H. (1983). Social support and family stress. *Marriage & Family Review*, 6(1-2), 137-156.
- Platt, J. M., Lowe, S. R., Galea, S., Norris, F. H., & Koenen, K. C. (2016). A longitudinal study of the bidirectional relationship between social support and posttraumatic stress following a natural disaster. *Journal of traumatic stress*, 29(3), 205-213.
- Radloff, L. S. (1977). The CES-D scale: A self-report depression scale for Research in the general population. *Applied psychological measurement*, 1(3), 385-401.
- Rahmi, Y., & Satria, A. (2013). Analisis

Hubungan Tingkat Kerentanan Masyarakat Pesisir Terhadap Bencana dengan Upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB). *Jurnal Penyuluhan*, 9(2).

Rylander, C., Øyvind Odland, J., & Manning Sandanger, T. (2013). Climate change and the potential effects on maternal and pregnancy outcomes: an assessment of the most vulnerable—the mother, fetus, and newborn child. *Global health action*, 6(1), 19538.

Sangalang, C. C., Jager, J., & Harachi, T. W. (2017). Effects of maternal Traumatic distress on family functioning and child mental health: An examination of Southeast Asian refugee families in the US. *Social Science & Medicine*, 184, 178-186.

Sim A, Fazel M, Bowes L, Gardner F. (2018). Pathways linking war and displacement to parenting and child adjustment: A qualitative study with Syrian refugees in Lebanon. *Social Science & Medicine*, 200, 19-26.

Sunarti, E., & Syahrini, J. S. (2011). Pengelolaan stres pada keluarga korban bencana longsor di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 4(2), 111-120.

Waitz, G., Stromme, S., & Railo, W. S. (1983). Conquer Stress with Grete Waitz, (terjemahan Sinta A. W). *Bandung: Angkasa*.

Weems, C. F., Watts, S. E., Marsee, M. A., Taylor, L. K., Costa, N. M., Cannon, M. F., ... & Pina, A. A. (2007). The psychosocial impact of Hurricane Katrina: Contextual differences in

psychological symptoms, social support, and discrimination. *Behaviour research and therapy*, 45(10), 2295-2306.

Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., & Farley, G. K. (1988). The multidimensional scale of perceived social support. *Journal of personality assessment*, 52(1), 30-41.

PEDOMAN BAGI PENULIS

Redaksi menerima kiriman artikel dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Artikel berupa hasil penelitian lapangan, bidang kesejahteraan sosial maksimal 3 tahun terakhir, dan belum pernah dipublikasikan oleh media lain.
2. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman 12 poin, 1,5 spasi, 15 - 25 halaman (A4), dan diserahkan dalam bentuk *soft copy* ke www.ejournal.kemsos.go.id
3. Sistematika artikel disusun tanpa penomoran sub judul (lihat *journal template*), dengan urutan sebagai berikut:
 - a). Judul (huruf besar) dan nama penulis (tanpa gelar akademik dan ditempatkan di bawah judul artikel), disertai lembaga, alamat dan email penulis. Jika penulis terdiri dari 4 orang atau lebih, yang dicantumkan adalah nama penulis utama, nama penulis-penulis lainnya dicantumkan pada catatan kaki halaman pertama naskah (dengan melampirkan identitas penulis);
 - b). Abstrak terdiri dari 150 - 200 kata, huruf Times New Roman dalam 1 (satu) paragraf berisi latar belakang (1-2 kalimat), tujuan, metode, hasil penelitian, dan kata kunci (*keywords*) maksimal 3 kata.
 - c). Pendahuluan (huruf besar); berisi narasi tentang latar belakang, tinjauan daftar pustaka, tujuan penelitian, dan metode;
 - d). Hasil dan Pembahasan (huruf besar);
 - e). Kesimpulan;
 - f). Saran;
 - g). Ucapan Terima Kasih;
 - h). Daftar Pustaka (huruf besar): Berasal dari Jurnal (diutamakan Jurnal Kesejahteraan Sosial/Pekerja Sosial), hasil-hasil penelitian, dan buku.
4. Judul, abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris
5. Kutipan yang langsung dan panjang (lebih dari tiga baris) diketik dengan jarak baris satu dengan bentuk indented style (bentuk berinden). Semua kutipan dan rujukan yang digunakan oleh penulis harus tercantum dalam daftar pustaka.
6. Penggunaan singkatan, harus dituliskan secara lengkap pada saat pertama kali disebutkan lalu dibubuhkan singkatannya dalam kurung. Istilah/kata asing atau daerah ditulis dengan *Italic* (dimiringkan). Simbol/lambang ditulis dengan jelas dan dapat dibedakan, seperti penggunaan angka 1 dan huruf I (juga angka 0 dan huruf O).
7. Tabel dan gambar dan judul tabel dan gambar ditulis dengan Times New Roman berukuran 10. Penomoran tabel menggunakan angka Arab (ikuti format APA). Tabel/gambar maksimal 3.
8. Penulisan daftar pustaka mengikuti format APA (*American Psychological Association*). Daftar pustaka sedapat mungkin menggunakan sumber primer (buku atau jurnal), diurutkan secara alfabetis berdasarkan nama keluarga/penulis. Minimal 80% rujukan berasal dari sumber yang up to date (diterbitkan tidak lebih dari 10 tahun terakhir). Rujukan dari internet mencantumkan tanggal diakses.
 - a) Bila daftar pustaka dirujuk dari buku dengan pengarang tunggal:
Arikunto, S. (2005). Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
 - b) Bila daftar pustaka dirujuk dari buku dengan 2 pengarang:
Wijaya, C. & Rusyan, T. (1992). Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
 - c) Bila daftar pustaka dirujuk dari buku lebih dari 2 pengarang:
Suharto, E., Suradi, Luhpuri, D., Sudrajat, A., Koswara, A., Marbun, J., Masngudin & Sabeni. (2003). Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial, Studi Kasus Rumah Tangga Miskin Indonesia. Bandung: STKS Bandung Press.
 - d) Bila daftar pustaka dirujuk dari jurnal:
Mujiyadi, B & Gunawan, (2000). Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Suatu Kajian terhadap Masyarakat di Sekitar Kawasan Industri, Informasi Vol.5 No. 1, Januari 2000. Jakarta: Balitbang Depsos RI,
 - e) Bila daftar pustaka dirujuk dari website:
Hamidah, (2000). Dampak Pelecehan Seksual, <http://Viking-Trisna.Blogspot.com/2010/04/Dampak-Pelecehan-seksual.html>, diakses 23 Juli 2012
 - f) Bila daftar daftar pustaka dirujuk dari Lembaga:
Kementerian Sosial RI. (2000). Pedoman Panti Sosial Bina Remaja, Jakarta: Direktorat Rehsos
 - g) Bila daftar pustaka dirujuk dari media massa:
Surbakti R. (2012). Otonomi daerah dari Presiden, Kompas 31 Juli 2012:6
 - h) Bila daftar daftar pustaka dirujuk dari Undang-Undang:
Republik Indonesia, (2002). Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Kementerian Sosial

